

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI DALAM
RANGKA PENINGKATAN PROFESIONALISME
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh :

NANI ANDRIYANI

NIM. 0410310095



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2008**

Motto

*“... As you sow, so
will u reap ...”*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan dan saran. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Tjahjanulin Domai, MS dan Bapak Imam Hardjanto, MAP selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril, waktu dan saran kepada penulis dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak M.Chori S.Sos., M.Si selaku Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Kota Batu, Bapak Syamsul Bakri S.Sos., MM selaku Kepala Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Daerah Kota Batu dan Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku salah satu staff Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Daerah Kota Batu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan selama penulis belajar di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Ayah, Ibuku dan saudara-saudaraku tercinta serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, bantuan moril dan do'a serta dengan sabar memberikan motivasi untuk terus semangat dan berjuang sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

7. Teman-teman FIA Publik '04, serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pencarian data dan penyusunan skripsi dari awal hingga skripsi ini selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin

Malang, Juli 2008

Penulis



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI
DALAM RANGKA PENINGKATAN
PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
Kota Batu)

DISUSUN OLEH : NANI ANDRIYANI
NIM : 0410310095
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 14 Juli 2008

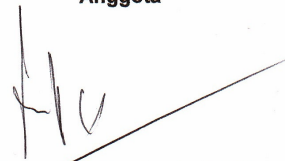
Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 130 890 054

Anggota



Drs. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 130 518 958



TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Rabu
 Tanggal : 06 Agustus 2008
 Jam : 08.00 WIB
 Judul : PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
 PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI DALAM RANGKA
 PENINGKATAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL
 (Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota
 Batu)

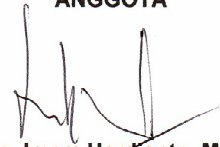
**DAN DINYATAKAN LULUS
MAJELIS PENGUJI**

KETUA



Drs. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 130 890 054

ANGGOTA



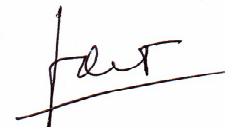
Drs. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 130 518 958

ANGGOTA



Prof. Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MSi
NIP. 130 936 634

ANGGOTA



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 130 704 333





PEMERINTAH KOTA BATU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 98, Telp. (0341) 591026, Fax (0341) 594444
BATU 65313

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / / 422.024 / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **M. CHORI, S.Sos., M.Si**
b. NIP : 010228404
c. Pangkat : Pembina / (IV/a)
d. Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **NANI ANDRIYANI**
b. NIM : 0410310095
c. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
d. Fakultas : Ilmu Administrasi
e. Universitas : Universitas Brawijaya
f. Alamat : Jl. Watu Aji No. 5 Malang
g. Judul / Tema Penelitian : Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu)

telah melaksanakan penelitian / orientasi sudi pada Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu terhitung mulai tanggal 10 Mei 2008 sampai dengan 10 Juli 2008 guna mendapatkan data pendukung dalam rangka penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, Juli 2008

a.n. Walikota Batu
Sekretaris Daerah

u.b.

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN



M. CHORI, S.Sos., M.Si

Pembina
NIP. 010228404

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Juli 2008

Yang membuat pernyataan,



Nani Andriyani

NIM. 0410310095

RINGKASAN

NANI ANDRIYANI, Juli 2008, **Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)**, Drs. Tjahjanulin Domai, MS ; Drs. Imam Hardjanto, MAP, 122 Hal + vii.

Penelitian ini mengangkat judul “Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)”. Hal ini di latar belakang karena belum terwujudnya sikap profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas jabatan yang disandangnya. Selama ini rekrutmen masih belum berfokus pada pengisian jabatan yang mendasarkan pada kompetensi. Penelitian ini dilakukan di Kota Batu dengan latar belakang bahwa perubahan status Kota Batu dari kota administratif menjadi kota otonom pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan tugas dan tanggung jawab aparatur yang ada, sehingga Pemerintah Kota Batu membutuhkan Pegawai Negeri Sipil baru yang profesional dan berkualitas guna melaksanakan urusan kewenangan yang semakin meningkat. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dan hubungan kompetensi dengan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara secara langsung, wawancara secara tertulis (melalui email) dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri dengan beberapa alat baik *interview guide* dan *field note*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 sudah diterapkan. Namun, pada pengadaan tahun 2006 dan tahun 2007 penerapan standar kompetensi belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terbukti dari adanya 20 (dua puluh) orang tenaga honorer pada tahun 2006 dan 19 (sembilan belas) orang tenaga honorer pada tahun 2007 yang menempati posisi guru namun tidak mempunyai pendidikan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk menempati posisi tersebut. Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Batu kemudian mengambil langkah dengan mengeluarkan peraturan yang berisi bahwa bagi tenaga honorer yang tidak mempunyai akta mengajar maka diberikan

kesempatan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk mengikuti pendidikan sehingga memperoleh ijazah atau akta sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu masih belum dapat terwujud secara maksimal karena masih adanya standar kompetensi yang belum diterapkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar dapat tercipta sikap profesionalisme Pegawai Negeri Sipil maka dalam rekrutmen atau pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil standar kompetensi sangat perlu untuk diterapkan dan diimplementasikan yang berlaku secara kontinu dan bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan.



SUMMARY

NANI ANDRIYANI, July 2008, **Civil Servant Supplying Through the Competent Standard Application in order to the Professionalism Increasing of Civil Servant (Study at Secretariat Employment in Batu City)**, Drs. Tjahjanulin Domai, MS ; Drs. Imam Hardjanto, MAP, 122 Hal + vii.

This research title is "Civil Servant Supplying through the Competent Standard Application in order to the Professionalism Increasing of Civil Servant (Study at Secretariat Employment in Batu City)". The background of this matter is because the professionalism attitude of civil servant is not form yet that caused by unconformity between officers with their job description. During the time the recruitment is still unfocused to the position filling that based something on competent. This research did in Batu City with the background that the status changing of Batu city from administrative city became autonomy city in 2001 based on law no 11 2001 about Batu city establishment, indirectly had an effect on the increasing of apparatus task and responsibilities existing, so the Batu City government need some new civil servant that have professionalism and quality in order to perform authority matter that more rising. The purpose of this writing is to know the competent standard application in Civil Servant Supplying Batu City and competent relation with the Professionalism of Civil Servant Batu City.

This research is using the descriptive research with qualitative analysis. Data sources composed by primary data and secondary data that collected with some data collecting methods pass through observation, interviewing in written (email) and documentation. These Research instruments consist of the researcher itself with some tools even in interview guide and field note. The data analysis in this research is using the qualitative data analysis, that by using logically thought to describing, explaining and analyze deeply and systematically about the true situation, then took some conclusion so that can got some solutions.

The result from this research shows that the application of competent standard in Civil Servant Supplying Batu City 2005 has been applied. But, supplying in 2006 and 2007 the application of competent standard is not maximal implemented yet. This is proven from 20 (twenty) temporary manpower in 2006 and 29 (twenty nine) temporary manpower in 2007 that occupy in teacher position but did not have education that appropriate with that position qualifications. To response this matter, Batu City government took step by issue some regulation contain that for temporary manpower who did not have teaching official document so given an opportunity for 1 (one) to 2 (two) years to take study so that get certificate or official document that appropriate with those that qualified. Thereby can be conclude that the professionalism attitude of civil servant Batu City still can be maximum formed because there is still some competent standard that applied yet in the Civil Servant Supplying. In order to create the professionalism attitude of civil servant so in recruitment or competent standard Civil Servant Supplying is very needed to be applied and implemented that applicable continuously and dynamically to follow the environment changing.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pegawai Negeri Sipil	11
1. Pegawai Negeri	11
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	11
3. Sifat Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil	15
4. Tugas-Tugas Pegawai Negeri Sipil	15
B. Rekrutmen (Pengadaan) Pegawai Negeri Sipil	15
1. Rekrutmen dalam Personal Manajemen	15
2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	18
3. Tahap-Tahap Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	19
4. Pihak-Pihak Terkait dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	21
C. Standar Kompetensi	22
1. Kompetensi	22
2. Manfaat Kompetensi	27
3. Standar Kompetensi	27
D. Profesionalisme	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi dan Situs Penelitian	33
D. Sumber dan Jenis Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Analisis Data	37

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kota Batu	39
a. Sejarah Pembentukan	39
b. Keadaan Geografis.....	40
c. Keadaan Demografis	40
d. Keadaan Sosial Ekonomi.....	40
e. Keadaan Pemerintahan	41
f. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu	43
2. Gambaran Umum Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu	46
a. Dasar Pembentukan	46
b. Indikator Kinerja.....	47
c. Tujuan	48
d. Sasaran.....	48
e. Struktur Organisasi.....	50
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	57
1. Penerapan Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu Tahun 2005-2007	57
a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007	58
1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005.....	64
2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006	66
3) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007	73
b. Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007.....	76
1) Pengetahuan	77
2) Keterampilan.....	78
3) Sikap.....	79
4) Bakat	80
2. Hubungan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007	81
a. Menguasai Pengetahuan di Bidangnya.....	82
b. Komitmen pada Kualitas.....	84
c. Dedikasi pada Kepentingan Masyarakat.....	86
d. Keinginan untuk Membantu Masyarakat.....	87
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007	88
a. Faktor Pendukung	88
b. Faktor Penghambat	90
C. Analisa Data Fokus Penelitian.....	94
1. Penerapan Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu Tahun 2005-2007	94
a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007	95

1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005.....	97
2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006.....	100
3) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007.....	102
b. Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007.....	104
1) Pengetahuan.....	104
2) Keterampilan.....	106
3) Sikap.....	107
4) Bakat.....	108
2. Hubungan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007.....	109
a. Menguasai Pengetahuan di Bidangnya.....	111
b. Komitmen pada Kualitas.....	112
c. Dedikasi pada Kepentingan Masyarakat.....	114
d. Keinginan untuk Membantu Masyarakat.....	115
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipi Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007.....	116
a. Faktor Pendukung.....	116
b. Faktor Penghambat.....	117
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1	Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
2	Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Golongan Pangkat	44
3	Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4	Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Eselon	45
5	Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Diklatpim	45
6	Kondisi Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
7	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Berdasarkan Jenis Jabatan	55
8	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
9	Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2005/2006 dan 2006/2007	56
10	Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur Umum Tahun 2005	65
11	Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur Honorer Tahun 2005	66
12	Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur Honorer Tahun 2006	70
13	Data Tenaga Honorer Kota Batu Tahun 2006 yang tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	70
14	Data Tenaga Honorer Sesuai Registrasi BKN dan Tenaga Honorer Yang telah Diusulkan Pengangkatannya Menjadi CPNS sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dan 2006	74
15	Data Tenaga Honorer Kota Batu Tahun 2007 yang Tidak Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	75
16	Penilaian pelaksanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil	85

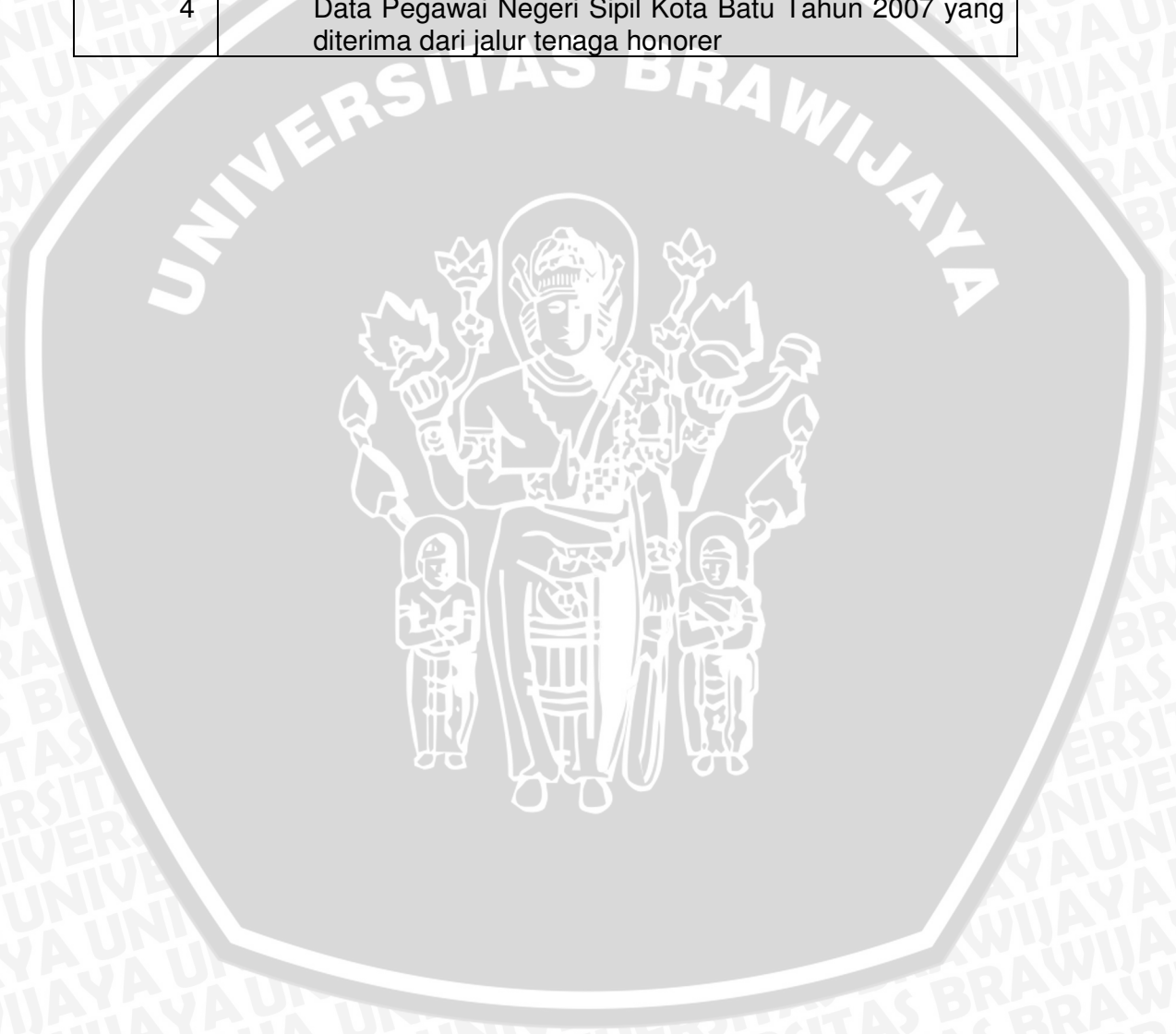
DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Hal
1	Analisis Data Model Interaktif	37
2	Susunan Organisasi Pemerintah Kota Batu	42
3	Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu	52



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005 yang diterima dari jalur pelamar umum
2	Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005 yang diterima dari jalur tenaga honorer
3	Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006 yang diterima dari jalur tenaga honorer
4	Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007 yang diterima dari jalur tenaga honorer



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Selama ini dominasi pusat terhadap daerah telah menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya, demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh pusat.

Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Otonomi Daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah memiliki makna yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena akan mampu mendorong demokratisasi, dalam arti memberi ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mengembangkan partisipasi, prakarsa dan kreativitasnya dalam menata dan membangun daerah, dengan mengacu pada persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini ditandai oleh perubahan mendasar dari pemerintahan yang sentralistik-otoriter-birokratik yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun ke pemerintahan yang partisipatoris-demokratik. Otonomi Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen mengenai pemerintahan, dalam pemberian kewenangan dan kemandirian pengambilan keputusan serta pengelolaan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://www.pu.go.id>)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan mampu berdaya saing diperlukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna pengembangan daerah dan selain itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerahnya. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi. Birokrasi sebagai pemberi bentuk kebijakan publik dengan sumber daya aparatur (Pegawai Negeri Sipil) yang mendukungnya harus mampu mengimplementasikan kebijakan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional.

Pembinaan dan pengembangan profesionalitas sumber daya manusia menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan otonomi daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Secara umum salah satu hambatan penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) adalah bentuk dan struktur organisasi konvensional yang mengarah kepada *bureaucratic* atau *hierarchical organization*, yang cenderung memperlakukan sumber daya manusianya sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor sumber daya lainnya. Baso (2003, h. 10) mengatakan bahwa organisasi birokrasi cenderung mematikan kreativitas dan inovasi serta *entrepreneurship* sumber daya manusia, karena segala aktivitas dan tindakan selalu harus melalui prosedur hirarkhis atau atas perintah dari atasan.

Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi organisasi secara umum adalah masalah kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS), maka persoalan yang harus segera dicermati

dan ditelusuri adalah tentang kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) dalam organisasi. Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas oleh pemerintah dibutuhkan pola kerja yang profesional dari Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah dalam bidang kepegawaian memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan normatif kepegawaian yang berlaku seragam bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal ini mengemban fungsi sebagai perumus kebijakan di bidang kepegawaian, yang diharapkan dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengadaan atau rekrutmen yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS). Sedangkan pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah tersebut menjadi kewenangan daerah. (Muluk, 2005, h. 149)

Untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan akuntabel, pemerintah saat ini sedang menata sistem kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya melalui pengadaan infrastruktur Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan standar kompetensi, perampingan penerimaan Pegawai Negeri Sipil, serta dibentuknya sistem penilaian kinerja yang rasional berdasarkan prinsip adil dan transparan (<http://www.balipost.co.id>)

Dalam rangka memperoleh Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas atau jabatan yang akan diduduki, maka dilaksanakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui proses rekrutmen dan seleksi yang selektif dengan menerapkan standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dimana mempunyai kompeten pada bidang tugasnya masing-masing. Dengan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, untuk kedepannya dapat

menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengadaan sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi pemekerjaan (*employee function*) Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ditujukan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan oleh instansi yang perhitungannya dilakukan secara rasional sesuai beban kerja. Kebutuhan rekrutmen pegawai pada sebuah instansi diperlukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan sumber daya di samping untuk regenerasi. Oleh karena itu, rekrutmen selalu disertai kualifikasi sumber daya yang memiliki kompetensi dan daya juang tinggi. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil menerapkan prinsip-prinsip transparan, obyektif, rasional, tidak diskriminatif (tidak didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah), akuntabel, serta bebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus direncanakan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harus efisien dan efektif. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara desentralisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan termasuk penyusunan formasi, pengumuman pendaftaran, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adanya formasi yang lowong ini disebabkan beberapa faktor, seperti adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan maupun adanya pengembangan organisasi.

Meskipun sistem pengadaan telah diatur dalam peraturan pemerintah sebagai upaya untuk menjaring Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang kompeten, namun dalam implementasinya belum memenuhi

kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS). Kondisi demikian ini antara lain disebabkan oleh perencanaan kepegawaian saat ini belum didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selama ini pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui seleksi cenderung tidak objektif dan bersifat formalitas terhadap ketentuan peraturan kepegawaian, hal ini dibuktikan dari banyaknya tuntutan dan gugatan para pencari kerja yang melihat bahwa pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil selama ini dilakukan cenderung bermuatan politik, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan hasilnya sudah dapat diketahui sebelum pengumuman hasil penyaringan ditetapkan. Akibat dari praktek pengadaan yang dilakukan selama ini tidak bersifat transparan dan obyektif, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil yang ada tidak sejalan dengan harapan pemberdayaan. Selain itu, dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil selama ini pada kenyataannya masih belum mendasarkan pada standar kompetensi, sehingga pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu terkadang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatannya. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,

“ Pengadaan Pegawai Negeri Sipil selama ini belum mendasarkan pada standar kompetensi, sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal. Untuk itu mulai sekarang akan dibuat standar kompetensi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku nasional dan sifatnya dinamis mengikuti perkembangan yang ada yang tujuannya adalah dalam peningkatan profesionalisme pegawai “ (<http://www.fajar.co.id>)

Pengadaan pegawai yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, belum mampu mengungkap kompetensi Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) sesuai dengan kebutuhan. Proses prosedur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil selama ini menurut opini yang berkembang di masyarakat, cenderung diwarnai oleh praktik-praktik *spoil system*, kolusi, daerahisme, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS).

Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS), antara lain ditentukan oleh rekrutmen yang merupakan proses aktivitas mencari dan menemukan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Secara organisatoris rekrutmen sebagai perencanaan sumber daya manusia harus terprogram secara komprehensif untuk dapat memprediksi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas serta

perencanaan yang profesional. Secara teoritis, banyak metode dan teknik seleksi untuk mengevaluasi pelamar sesuai jabatan yang lowong dalam organisasi.

Salah satu metode dan teknik seleksi Pegawai Negeri Sipil adalah seleksi internal atau yang berasal dari tenaga honorer. Pada tahun 2004, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik pusat maupun daerah, hanya berasal dari pelamar umum dan pengadaan tersebut diprioritaskan untuk mengisi jabatan dosen dan guru, tenaga kesehatan dan tenaga strategis lainnya. Sedangkan mulai tahun 2005-2009 pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik pusat maupun daerah disamping dari pelamar umum juga adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tetapi kebijakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2005-2009 lebih memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi khusus dan pelamar umum melalui seleksi umum. Hal ini terkait erat dengan program pemerintah untuk mengurangi dan bahkan menghapus tenaga honorer. Berdasarkan data yang ada, prioritas tenaga yang dibutuhkan (baik dari honorer maupun pelamar umum) adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain; dan tenaga teknis lain yang dibutuhkan pemerintah.

Di era otonomi sekarang ini, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar mengacu pada kemampuan individu sesuai kompetensi yang dimiliki untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penyusunan standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk reformasi birokrasi, dimana birokrasi pemerintah daerah perlu ditunjang oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini mutlak dan mendesak untuk direalisasikan, khususnya persyaratan kompetensi bagi setiap orang yang akan duduk dalam suatu jabatan. Standar kompetensi menurut Prayitno dan Suprpto (2002, h. 2) adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Standar kompetensi ini dapat dilakukan melalui tes kompetensi dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan bakat.

Sesuai dengan konsep yang termuat dalam Otonomi Daerah yang secara otomatis pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar kompetensi dalam upayanya untuk menyiapkan birokrasi daerah sehingga nantinya akan mampu memberikan

kontribusi bagi daerah tersebut dan juga pada akhirnya akan mampu bersaing dan lebih unggul dari daerah lain. Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan standar kompetensi adalah Pemerintah Kota Batu.

Kota Batu sebagai bagian integral dari sistem Negara Indonesia, juga memerlukan aparatur pemerintah yang secara formal ikut memutar roda pemerintahan. Sejak perubahan status Kota Batu dari kota administratif menjadi Kota Otonom pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, maka secara tidak langsung tugas dan tanggung jawab aparatur yang ada juga meningkat, sehingga membutuhkan Pegawai Negeri Sipil baru yang berkualitas guna melaksanakan urusan dan kewenangan yang meningkat.

Kota Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Malang juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik sehingga akan mampu berdaya saing. Untuk itu maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Sebagai kota yang baru berdiri pada tahun 2001, menjadikan Kota Batu sebagai obyek yang menarik untuk diteliti dimana sebagai kota yang baru terbentuk Kota Batu membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menempati posisi-posisi krusial dalam membangun Kota Batu.

Dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) di Kota Batu yang mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, maka manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) merupakan suatu hal yang sangat penting dan strategis, terutama dalam aspek perencanaan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang komprehensif dan terprogram untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesionalisme dan berkualitas. Hal ini bermuara pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil guna menjangkau Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sehingga dapat berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat begitu pentingnya penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan profesionalitas pegawai Negeri Sipil, maka penulis tertarik untuk meneliti topik “ **Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005-2007 ?
2. Bagaimana hubungan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 ?
3. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis dapat merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005-2007
2. Untuk mengetahui hubungan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan segi teoritis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang meliputi :

1. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik, agar dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam lingkup Administrasi Publik.
2. Bagi peneliti merupakan suatu kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang teori yang diperoleh selama kuliah serta aplikasinya untuk memecahkan permasalahan yang timbul serta dapat memberikan masukan dalam pengembangan wawasan berpikir.

3. Bagi lembaga atau organisasi yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai bahan masukan bagi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu
4. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pengkajian mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah merupakan susunan skripsi secara singkat, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan sehingga akhirnya nampak secara garis besar isi dan pola pemikiran-pemikiran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara garis besar adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan-landasan teori yang akan mendasari penulisan skripsi, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri, Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Sifat Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan Tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil); Rekrutmen (Pengadaan) Pegawai Negeri Sipil (Rekrutmen dalam Personal Manajemen, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Tahap-Tahap Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil); Standar Kompetensi (Kompetensi, Manfaat Kompetensi, Standar Kompetensi); Profesionalisme.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisa dan interpretasi data yang didapat selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari skripsi. Pada bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya serta pengajuan saran yang mungkin dapat dipergunakan oleh Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Batu dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pegawai Negeri Sipil

1. Pegawai Negeri

Pegawai negeri menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dibagi menjadi :

a. Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : (Pasal 2 ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999)

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari dua segi : (Sjamsuddin, 2005, h. 42-44)

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif (penetapan tentang makna yang berikan oleh UU) tentang pegawai negeri terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan pegawai negeri dengan

pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1 : Pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

b. Perluasan Pengertian

Di samping pengertian stipulatif tersebut di atas ada beberapa golongan pegawai yang sebenarnya bukan pegawai negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal-hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri artinya, disamping pengertian yang stipulatif itu ada perluasan pengertian yang hanya berlaku untuk hal-hal tertentu. Perluasan pengertian tersebut antara lain di dalam :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam pasal 415-437 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah mereka yang melakukan kejahatan berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi satu jabatan publik tetap maupun sementara. Jadi orang yang diserahi jabatan publik itu belum tentu pegawai negeri menurut pengertian UU No. 43 Tahun 1999. Jika melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik maka ia dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- 2) Ketentuan pasal 92 KUH Pidana yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUH Pidana, " Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa " dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri. Mereka (yang disebutkan dalam pasal 92 KUH Pidana) bukanlah pegawai negeri menurut pengertian UU No. 43 Tahun 1999, tetapi jika terjadi kejahatan dalam kualitas atau kedudukan masing-masing maka mereka itu dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri.
- 3) Ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang ini memperluas juga pengertian pegawai negeri, sehingga mencakup " Orang-orang yang menerima gaji atau upah atau keuangan negara atau keuangan daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Mereka yang menerima gaji atau upah atau kelnggaran-kelonggaran tersebut boleh jadi bukan pegawai negeri menurut pengertian UU No. 43 Tahun 1999, tetapi jika mereka melakukan korupsi atau gaji atau upah atau kelonggaran-kelonggaran tersebut maka mereka dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri khusus dalam kaitannya dengan tindak korupsinya

itu, artinya, bisa dituntut dengan pidana sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999.

- 4) Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Ada beberapa golongan yang bukan pegawai negeri menurut pengertian UU No. 43 Tahun 1999, tetapi PP No. 6 tahun 1974 memberikan perluasan sehingga mencakup banyak golongan pegawai lainnya. Menurut PP No. 6 Tahun 1974 pegawai negeri adalah :

- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b) Anggota ABRI
- c) Pegawai Negeri diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom
- d) Pegawai otonom
- e) Pegawai Perusahaan Jawatan
- f) Pegawai Perusahaan Umum
- g) Pegawai BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang
- h) Pegawai Bank Milik Negara

Selain itu PP No. 6 Tahun 1974 secara eksplisit menyebutkan juga beberapa (yang sebenarnya bukan pegawai negeri) yang dipersamakan dengan pegawai negeri, yaitu :

- a) Pegawai Perusahaan (Perseroan)
- b) Pegawai Perseroan Terbatas (PT) milik Negara yang belum digolongkan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969
- c) Pegawai Perusahaan daerah

Dari pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : (Djatmika, 1987, h. 8)

- a. Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan
Unsur pertama ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara berhak menjadi Pegawai Negeri tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud terdiri dari:
 - 1) Syarat administratif meliputi; tanda bukti lulus lembaga pendidikan (ijazah) yang dimiliki untuk mengukur tingkat kecakapan, sertifikat-sertifikat lain dari lembaga/kursus sebagai bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai keahlian dan ketrampilan yang ditentukan, surat keterangan kelakuan baik serta surat keterangan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - 2) Syarat kepribadian, berkenaan dengan usia, sehat jasmani dan rohani
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri bukan berasal dari hasil pemilihan, melainkan dari pengangkatan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Pegawai Negeri.
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya
Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan tugas bukan untuk kepentingan pribadinya atau golongannya.
- d. Mendapat gaji menurut perundang-undangan yang berlaku

Unsur keempat mengandung pengertian, bahwa istilah hak yang diterima setelah yang bersangkutan bekerja adalah gaji bukan upah atau bayaran. Penentuan gaji bersifat nasional dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Pegawai Negeri Sipil yang secara resmi diangkat oleh pemerintah, juga terdapat pegawai atau tenaga yang membantu sebagian tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang kemudian disebut dengan tenaga honorer, adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (pasal 1 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil).
- b. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : (pasal 3 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2007)
 - 1) Tenaga guru;
 - 2) Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 - 3) Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan
 - 4) Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.
- c. Pengangkatan tenaga honorer didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut : (pasal 3 ayat 2 UU No. 43 Tahun 2007)
 - 1) Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus.
 - 2) Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus.
 - 3) Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.
 - 4) Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus.

3. Sifat Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil

Sifat hubungan kerja antara Pegawai Negeri Sipil dengan pemerintah sebagai pemberi kerja menurut Effendi (2006, h. 16) adalah bersifat "Openbare Dienstbetrekking" yakni merupakan hubungan dinas publik terhadap pemerintah dengan sistem hubungan sub-ordinatif antara atasan dengan bawahan.

Antara atasan dengan bawahan saling bekerja untuk tujuan penyelenggaraan kepentingan negara atau pemerintah, bukan untuk kepentingan golongan apalagi untuk kepentingan pribadi dan tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan diri sendiri dalam melakukan pekerjaan jabatannya.

4. Tugas-Tugas Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan kepentingan negara yang bertindak sebagai petugas publik yang menyelenggarakan tugas-tugas negara dapat dibedakan menjadi 3 bagian : (Effendi, 2006, h. 17)

- a. Tugas negara yang bersifat *essentiil*, yaitu berupa tugas utama dari negara yang meliputi tugas menjaga keamanan dan pertahanan rakyat yang semuanya bersifat administratif dan protektif.
- b. Tugas negara yang bersifat *service*, yaitu berupa tugas pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta pembangunan badan-badan publik.
- c. Tugas yang bersifat *bussines*, yaitu berupa tugas negara dalam bidang pemberian proteksi-proteksi dibidang industri serta menentukan harga mata uang.

B. Rekrutmen (Pengadaan) Pegawai Negeri Sipil

1. Rekrutmen dalam *Personal Manajemen*

Personal manajemen atau manajemen personalia menurut Fliplo dalam Handoko (1997, h. 3) adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Sementara itu menurut French dalam Handoko (1997, h. 3-4) mendefinisikan manajemen personalia sebagai berikut :

Manajemen personalia mencakup fungsi-fungsi perencanaan atau *planning* (penetapan apa yang akan dilakukan), pengorganisasian atau *organizing* (perancangan dan penugasan kelompok kerja), penyusunan personalia atau

staffing (rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi kerja), pengarahannya atau *leading* (motivasi, kepemimpinan, integrasi dan pengelolaan konflik), dan pengawasannya atau *controlling*.

Manajemen personalia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi, dimana keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan dari kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia. Tujuan manajemen personalia adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif, dan dalam usaha untuk mencapai tujuan ini maka studi manajemen personalia menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat.

Salah satu kegiatan dalam manajemen personalia adalah kegiatan penarikan atau rekrutmen sumberdaya manusia. Sebelum rekrutmen terlebih dahulu dilakukan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia organisasi di waktu yang akan datang. Atas dasar informasi analisa pekerjaan dan kebutuhan karyawan, kegiatan rekrutmen berusaha untuk memperoleh para calon pegawai yang "*qualified*" untuk memenuhi kebutuhan yang ada yang kemudian dilakukan proses seleksi guna memilih orang-orang yang memenuhi spesifikasi kebutuhan.

Analisa jabatan selalu terkait dengan pengetahuan tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan, tugas dan tanggungjawab yang menyertai pekerjaan tersebut dan juga persyaratannya. Analisa jabatan adalah suatu proses yang diusahakan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah sehingga dapat dicapai kualitas tentang tenaga kerja yang dibutuhkan. Ada beberapa manfaat dengan diadakannya analisa jabatan yaitu: (Handoko, 2002, h. 42)

- a. Organisasi dapat menerapkan *the right man in the right place*.
- b. Untuk mengetahui jenis pelatihan yang dibutuhkan.
- c. Untuk menilai prestasi kerja karyawan, karena dalam analisa jabatan sudah ada tugas dan tanggungjawab oleh setiap karyawan.
- d. Untuk membuat rencana tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Hasil analisa jabatan adalah adanya deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah catatan yang sistematis dan teratur tentang tugas dan tanggungjawab suatu jabatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan apa, bagaimana, mengapa, kapan dan dimana suatu pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan spesifikasi jabatan adalah catatan yang menjelaskan persyaratan yang diperlukan oleh seorang karyawan untuk memangku dan

mengerjakan suatu pekerjaan dari jabatan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, umur dan sebagainya.

Handoko (2001, h. 240) mendefinisikan penarikan (*recruitment*) adalah berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia.

Schuler dan Jackson (1997, h. 227) mendefinisikan rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga organisasi dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen harus dapat memenuhi kebutuhan para calon, sehingga rekrutmen tidak hanya menarik minat seseorang untuk bekerja pada organisasi, melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan karyawan setelah bekerja.

Menurut Ruky (2003, h. 144) yang disebut dengan rekrutmen atau *recruitment* adalah sebuah proses mencari dan menarik (membujuk mereka untuk melamar) pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu. Sebuah proses rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka diterima. Namun dalam praktik, istilah rekrutmen diartikan sebagai mencakup semua kegiatan rekrutmen, seleksi dan penempatan, yaitu seluruh proses kegiatan mulai dari mencari sampai penempatan.

Simamora (1999, h. 210) mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mencari dan menemukan pegawai yang dibutuhkan. Kegiatan rekrutmen merupakan aktivitas manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai suatu proses selalu diikuti dengan seleksi untuk menemukan kesesuaian kebutuhan dengan kemampuan pribadi sumber daya manusia. Sementara itu, sumber daya manusia pada sebuah organisasi menurut Simamora (1999, h. 212) merupakan sumber daya yang paling penting dan hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Dan untuk dapat merekrut secara efektif, maka harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Adapun maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Jika rekrutmen dan seleksi dilakukan secara efektif, organisasi akan dapat memiliki pekerja sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian efektifitas kegiatan ini dapat diukur sampai sejauh mana terdapat kesesuaian antara jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dengan tersedianya pekerjaan atau jabatan dalam organisasi. Kesesuaian jumlah pekerja tentu saja harus pula disertai dengan pemenuhan persyaratan sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar.

Rekrutmen dan seleksi yang efektif pada gilirannya mempengaruhi perpindahan pekerja, kinerja, motivasi dan kemampuan pekerja. Oleh karena itu, rekrutmen yang inefektif dan seleksi yang keliru akan mengakibatkan tingginya perpindahan pekerja (*labour turnover*), kinerja dan motivasi rendah, dan kemungkinan besar pekerja tidak mampu menangani tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

Zainun (1996, h.31) memberikan definisi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan.

Effendi (2006, h. 40) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses kegiatan dalam bidang kepegawaian berupa perencanaan, pendaftaran, pengujian dan pengangkatan pegawai negeri sipil baru yang dilakukan untuk mengisi formasi yang lowong.

Sementara itu, formasi menurut Effendi (2006, h. 40) adalah sebagai berikut :

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Adanya formasi yang lowong menunjukkan adanya pangkat dan jabatan dalam jumlah tertentu tidak tersedia Sumber Daya Manusianya (SDM), untuk itu perlu dilakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang baru.

Jadi, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya adalah untuk mengisi Formasi Kepegawaian yang lowong serta mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkualitas. Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah, mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

Beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil : (Efendi, 2006, h. 40)

- a. Adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti, hal tersebut karena beberapa sebab diantaranya :
 - 1). Atas permintaan sendiri
 - 2). Meninggal dunia
 - 3). Hukuman disiplin
 - 4). Perampangan organisasi pemerintah
 - 5). Menjadi anggota atau pengurus partai politik
 - 6). Dipidana penjara
 - 7). Dinyatakan hilang
 - 8). Keuzuran jasmani
 - 9). Mencapai batas usia pensiun.
- b. Adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal
- c. Mutasi jabatan
- d. Pengembangan organisasi

3. Tahap-Tahap dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pentahapan dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi : (Effendi, 2006, h. 41-45)

- a. Tahap Perencanaan
Dalam tahap perencanaan, pejabat pembina kepegawaian membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan mengenai:
 - 1). Inventarisasi lowongan yang dibutuhkan dalam formasi
 - 2). Syarat-syarat dalam menduduki jabatan
 - 3). Persyaratan bagi pelamar
 - 4). Materi ujian dan cara penyaringan
 - 5). Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - 6). Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 7). Pengumuman pengadaan
- b. Tahap Pengumuman Pengadaan

Pengumuman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan melalui media massa atau dalam bentuk pengumuman lainnya yang ditempatkan pada kantor-kantor instansi pemerintah terutama pada kantor Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER) setempat. Pengumuman Pengadaan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyaringan. Adapun isi pengumuman pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut meliputi:

- 1) Jumlah dan Jenis jabatan yang lowong
- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
- 3) Alamat dan tempat lamaran diajukan
- 4) Batas waktu pengajuan lamaran

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelamar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- 1). Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2). Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun
- 3). Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
- 4). Tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri
- 5). Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan
- 6). Berkelakuan baik
- 7). Sehat jasmani dan rohani
- 8). Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah
- 9). Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

c. Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh sebuah Panitia Penyaringan yang dibentuk oleh pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia penyaringan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota. Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus dalam bilangan ganjil. Adapun tugas panitia penyaringan adalah:

- 1). Menyiapkan bahan ujian meliputi :
 - a. Materi Tes Kompetensi
 - b. Materi Tes Psikotes
- 2). Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
- 3). Menentukan tempat dan jadwal ujian
- 4). Menyelenggarakan ujian
- 5). Memeriksa dan menentukan hasil ujian

d. Tahap Pengumuman Pelulusan

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dalam sebuah daftar. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan maka yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan oleh Pejabat Pembina

kepegawaian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini ditetapkan golongan ruangnya sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah yang dimiliki dan dipergunakan untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni :

- 1). Golongan ruang I/a bagi yang memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah SD atau yang setingkatnya
- 2). Golongan ruang I/c bagi yang memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah SLTP atau yang setingkatnya
- 3). Golongan ruang II/a bagi yang memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah SLTA atau yang setingkatnya
- 4). Golongan ruang II/b bagi yang memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II
- 5). Golongan ruang II/c bagi yang memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda Akademi atau Diploma III
- 6). Golongan ruang III/a bagi yang memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV
- 7). Golongan ruang III/b bagi yang memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I
- 8). Golongan ruang III/c bagi yang memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II.

Selain golongan ruang, maka bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhak mendapat gaji sebesar 80 % selama masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama tahun. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah menjalankan masa percobaan, serta dalam setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik, dan telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, serta telah lulus pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, maka yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberikan pangkat :

- 1). Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a
- 2). Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan I/c
- 3). Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a
- 4). Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b
- 5). Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c
- 6). Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a
- 7). Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b
- 8). Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c

4. Pihak-pihak Terkait dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

a. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk suatu badan yang bernama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Badan ini berfungsi menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup :

- 1). Perencanaan
 - 2). Pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian
 - 3). Pengawasan dan pengendalian
 - 4). Penyelenggaraan dan pemberian informasi kepegawaian
 - 5). Mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
 - 6). Memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah
- b. Badan kepegawaian Daerah (BKD)

Demi kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34A Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur di dalam Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Keputusan tersebut diamanatkan kepada seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

C. Standar Kompetensi

1. Kompetensi

Yoder dan Heneman (1959, h. 43-44) berpendapat bahwa semua pekerja seharusnya memiliki pekerjaan terbaik yang bisa mereka tangani, dan pekerjaan itu harus sesuai dengan minat dan kompetensi mereka, serta bisa memberikan kepuasan pekerjaan yang paling besar bagi mereka sehingga dapat membuat mereka antusias dalam bekerja serta dapat menghasilkan efek dan return ekonomis yang terbesar. Dalam hal ini, kisaran dan jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam bekerja terkait erat dengan sebuah masalah yang sangat penting dan mendasar dalam konsep ekonomi ketenagakerjaan, yaitu penerapan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif.

Permintaan akan berbagai jenis ketrampilan (*skill*) seharusnya juga membuka peluang-peluang yang diperlukan untuk memanfaatkan dengan sepenuhnya kompetensi yang dimiliki para pekerja. Jika jumlah pekerjaan yang membutuhkan berbagai jenis ketrampilan tidak selaras dengan pola kompetensi yang tersedia di kalangan pekerja yang ada, maka sumber daya manusia yang ada menjadi tidak termanfaatkan sepenuhnya, dimana ada banyak orang bekerja dengan tuntutan yang lebih rendah daripada kapasitas kerjanya. Misalnya : jika seorang tukang kayu yang terampil dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan apapun, misalnya mengepel lantai atau menjadi penjaga gudang, maka itu adalah menyia-yiakan kompetensi kerja yang dimilikinya. Pada saat yang sama, pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif memerlukan pelatihan yang tepat untuk memastikan bahwa pekerja yang memiliki kecenderungan (*aptitude*) dan potensi yang sesuai bisa mengembangkan kompetensinya dengan sepenuhnya.

Boyatzis (1982, h. 31) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang, yang didalamnya meliputi keahlian, pengaruh sosial, kepercayaan diri dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Woodruffe (1993, h. 105) mendefinisikan kompetensi sebagai sekelompok kebiasaan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memegang suatu jabatan, sehingga dia dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Baso (2003, h. 3) mendefinisikan kompetensi adalah suatu uraian keterampilan, pengetahuan dan sikap yang utama diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam pekerjaan.

Oxford Dictionary (1995, h. 87) mendefinisikan kompetensi (*competency*) (*of people*) *having the necessary ability, authority, skill and knowledge*. Yang artinya adalah memiliki segenap kemampuan, wewenang, ketrampilan dan pengetahuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, h. 48) memberikan pengertian kompetensi adalah kemampuan, kecakapan. Kompetensi sumber daya manusia dalam arti sempit, tidak dapat dilepaskan dari persyaratan pekerjaan yang ada. Artinya, organisasi harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan dan

kompetensi apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kompetensi ini bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi dan pengertian kompetensi ini dapatlah dipadukan dengan *soft skill*, *hard skill*, *social skill*, dan *mental skill*.

Spencer (1993, h. 18) mendefinisikan bahwa : “ *Competencies can be defined as the enduring traits and characteristics that determine performance. Examples of competencies are initiative, influence, teamwork, inovation, and strategic thinking* ” Implikasi dari definisi tersebut, yaitu suatu kompetensi mengarah kepada kapasitas yang harus dimiliki karyawan untuk memenuhi persyaratan kerja baik untuk saat ini maupun saat mendatang. Sehingga yang dimaksud dengan kompetensi tidak hanya berhubungan dengan kinerja saat ini melainkan dapat juga digunakan untuk memprediksi kinerja yang akan datang.

Siswanto (2003 : hal 8) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan manusia yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif, dan atau bakatnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kompetensi dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sebuah kinerja. Menurut Genevive (2000, h. 56) kompetensi dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. Kompetensi sebagai keahlian adalah kompetensi sebagai suatu keahlian yang harus dimiliki seseorang ketika ia memegang jabatan, artinya jika seseorang memegang suatu jabatan maka harus ada suatu kesesuaian antara keahliannya dengan jabatan yang diduduki.
- b. Kompetensi sebagai ciri atau sifat pribadi yaitu pada pendekatan ini, kompetensi dianggap sebagai kemampuan pambawaan diri yang berhubungan dengan kemampuan intelektual, kondisi fisik, kewibawaan dan kondisi emosi dari seseorang (*emotional intelligence*)
- c. Kompetensi sebagai pengetahuan didefinisikan sebagai sesuatu yang dinamis dan interaktif. Kompetensi bukanlah suatu yang tetap, yang selalu dibutuhkan sebagai sesuatu hal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, tetapi juga meliputi kemampuan seseorang untuk mentransfer pengetahuannya ke orang lain atau menerapkannya pada bidang lain.

Dharma (2002, h. 20) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari individu dalam menentukan prediksi perilaku dan performance dalam suatu situasi atau pekerjaan. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu :

- a. *Motives*, adalah sesuatu yang selalu dipikirkan atau diinginkan seseorang yang dapat mengarahkan, mendorong atau menyebabkan orang melakukan suatu tindakan. Motivasi ini mengarahkan seseorang untuk menentukan atau menetapkan tindakan-tindakan yang memastikan dirinya mencapai tujuan yang diharapkan
- b. *Traits*, atau watak merujuk pada ciri bawaan yang bersifat fisik (*physical characteristics*) dan tanggapan yang konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi.
- c. *Self concept*, yakni sikap, nilai atau image yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. *Self concept* ini akan memberikan keyakinan pada seseorang siapa dirinya. Apakah ia seorang pemarah ataukah orang yang sabar dan mampu mengendalikan diri. Demikian pula, apakah ia seorang yang cerdas ataukah ia selalu mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu.
- d. *Knowledge*, adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
- e. *Skill*, merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas pokok tertentu baik tugas fisik atau tugas mental. Berbeda dengan keempat karakteristik kompetensi lainnya yang bersifat "*inten*" dalam diri individu, *skill* merupakan karakteristik kompetensi yang berupa "*action*". *Skill* mewujudkan sebagai perilaku yang di dalamnya terdapat *motives*, *traits*, *self concept* dan *knowledge*.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya terdiri dari empat unsur utama yaitu pengetahuan (*cognitive domain*), keahlian dan keterampilan (*psychomotor domain*), perilaku dan sikap (*affectif domain*), dan bakat (*aptitude*). Keempat unsur itu secara langsung mempengaruhi perilaku (*behaviour*) pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Adapun kompetensi dapat ditelusuri melalui :

- a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dapat diartikan kemampuan berpikir sistem, keahlian sistem, model mental, visi bersama, kemampuan berdialog.

- b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan dapat diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, kepandaian, kecekatan, dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, sedangkan untuk mengetahui keterampilan dapat ditelusuri melalui :

- 1). Kemampuan

Merupakan kesanggupan mental dan fisik untuk melakukan suatu tugas pekerjaan. Intelektual Merupakan kecakapan menggunakan kecerdasan dan kepandaian dalam melaksanakan tugas.

- 2). Reaktif

Merupakan kecenderungan sikap tanggap dan proaktif terhadap suatu masalah dalam melaksanakan tugas pekerjaan

- 3). Responsif

Merupakan kepedulian dan kecepatan bereaksi untuk menanggapi dan secara konsisten memberi reaksi terhadap tugas pekerjaan

- 4). Stamina kerja

Kekuatan dan energi fisik serta ketahanan mental yang memungkinkan dapat bertahan dan menyelesaikan tugas pekerjaan.

- c. Sikap (*attitude*)

Sikap dapat diartikan sebagai pandangan, nilai, perbuatan, kelakuan, unjuk kerja dalam melakukan suatu tugas pekerjaan, sedang untuk mengetahui sikap dapat ditelusuri melalui :

- 1). Keluwesan

Merupakan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai rekan atau kelompok kerja yang bekerja yang berbeda.

- 2). Semangat untuk berprestasi

Merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap standar.

- 3). Kemampuan bekerja sama

Merupakan dorongan atau kemampuan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas.

- 4). Kemampuan melayani

Merupakan keinginan untuk membantu atau melayani masyarakat.

- 5). Pengendalian diri

Kemampuan untuk menjadikan diri tahan menghadapi berbagai situasi dan kondisi untuk kepentingan orang.

d. Bakat (*aptitude*)

Bakat dapat diartikan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu atau tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah atau sulit dan sukses atau tidak pernah sukses. Untuk mengetahui bakat pegawai dapat ditelusuri melalui :

1). Kecerdasan dan kecakapan

Merupakan kemampuan berpikir yang kreatif, meskipun menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

2). Kreatif

Merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu ide yang baru, gagasan baru yang dapat diterapkan untuk pemecahan suatu masalah.

3). Pengikatan diri terhadap tugas

Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang mendorong untuk tekun, ulet dan tekad untuk melaksanakan tugas pekerjaan meskipun menghadapi hambatan dan masalah.

2. Manfaat Kompetensi

Penerapan kompetensi individu sangat diperlukan dalam situasi kerja. Menurut Baron dan Greenberg (1990, h. 7-8), terdapat beberapa manfaat ketika suatu lembaga dapat menetapkan kompetensi individu, antara lain :

- a. Kompetensi individual akan memperjelas apa yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan membantu memperjelas apa yang harus diperintahkan oleh seorang atasan.
- b. Kompetensi individual menyediakan struktur dan standar bagi system pengembangan sumber daya manusia, sehingga akan mengurangi ambiguitas dan membantu seseorang merasa nyaman dengan mengetahui apa yang dikerjakan dalam suatu pekerjaan.
- c. Kompetensi individual akan dapat membantu pekerja ketika mengalami konflik personal dan ketidaksetujuan pendapat satu sama lain.
- d. Kompetensi individual juga akan menjadi dasar pelatihan yang dibutuhkan bagi seorang pekerja.

3. Standar Kompetensi

Prayitno dan Suprpto (2002, h. 2) mendefinisikan standar kompetensi adalah :

“Spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik”

Berdasarkan keputusan Kepala BKN No. 43 /kep/2001 tentang standar kompetensi jabatan struktural PNS, standar kompetensi terdiri dari:

- a. Kompetensi umum, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.
- b. Kompetensi khusus, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis.

D. Profesionalisme

Almasdi (2000, h. 99) mendefinisikan pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dimulai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Disamping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Menurut Pamudji (1994, h. 20-21) mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah :

“Orang yang profesional memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, lebih bervariasi yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat”

Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. profesionalisme pada intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar (MenPAN, 2002, h. 25). Sedangkan yang dimaksud profesional adalah kemampuan, keahlian atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama

sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta diterima masyarakat (MenPAN, 2002, h. 14).

Maester (1998, h. 88-89), mendefinisikan profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan baik dari individu pemilik profesi maupun masyarakat lingkungannya. Sedangkan Poerwopoespito & Utomo (2000, h. 266), mengatakan bahwa profesionalisme berarti faham yang menempatkan profesi sebagai titik perhatian utama dalam hidup seseorang.

Adapun ukuran profesional tidaknya Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut Maester (1998, h. 89) dapat dilihat pada pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan secara umum dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani, maka tidak usah ragu untuk menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional. Sebaliknya, apabila masyarakat pada umumnya masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan berarti perlu dilakukan peningkatan profesionalitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme Pegawai Negeri Sipil harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Menguasai pengetahuan dibidangnya

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam pengetahuannya dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk dapat mengetahui penguasaan pengetahuan dibidangnya dapat ditelusuri melalui :

- 1). Meningkatkan pengetahuan
- 2). Menguasai bidang tugas
- 3). Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan

b. Komitmen pada kualitas

Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan kepandaian, kecakapan dan mutu pekerjaan dari seorang PNS agar dapat mendorong kinerja. Untuk dapat mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri melalui :

- 1). Memiliki kecakapan
- 2). Kesanggupan dalam bekerja
- 3). Selalu meningkatkan mutu kerja

c. Dedikasi

Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang Pegawai Negeri Sipil atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka membantu dan melayani masyarakat atau orang lain. Untuk dapat mengetahui dedikasi Pegawai Negeri Sipil dapat ditelusuri :

- 1). Kebanggaan pada pekerjaan
- 2). Tanggungjawab pada pekerjaan
- 3). Mengutamakan pada kepentingan umum

d. Keinginan untuk membantu

Sebagai suatu sikap seseorang yang mencerminkan kejujuran dan keihlasan dalam bekerja untuk membantu masyarakat. Untuk dapat mengetahui keinginan PNS untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri melalui :

- 1). Kejujuran
- 2). Keihlasan



BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau upaya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian menurut Nasir (1988, h. 68) merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian serta cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

Pemilihan jenis metode yang dipergunakan dan berhubungan dengan prosedur, alat serta desain penelitian dan berperan sebagai penentu arah kegiatan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Koentjaraningrat (1985, h. 42) bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah hipotesa, mungkin juga belum hipotesa, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006, h. 3), metode deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Mengenai pendekatan kualitatif, menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2006, h. 4) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya dan pendekatan kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Dari beberapa definisi diatas dapat disintetiskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif . Alasan dipilihnya jenis penelitian deskriptif ini adalah bahwa peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan sejauh mana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan alasan dipilihnya metode kualitatif adalah peneliti ingin memperoleh kebutuhan pada suatu fenomena yang muncul dengan cara mengamati, melukiskan dan memahami apa yang mereka katakan, mendengar dan kemudian melaporkannya dalam sebuah hasil yang sistematis.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penelitian diperlukan pemahaman mengenai jenis penelitian sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengungkapkan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penetapan fokus penelitian tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai berikut : (Moleong, 2006, h. 94)

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi bidang inkuiri.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian yang ditetapkan adalah :

1. Penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu Tahun 2005-2007
 - a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 :

- 1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005
- 2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006
- 3) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007
- b. Standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 :
 - 1) Pengetahuan (*knowledge*)
 - 2) Keterampilan (*skill*)
 - 3) Sikap (*attitude*)
 - 4) Bakat (*apititude*)
2. Hubungan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007, yang meliputi :
 - a. Menguasai pengetahuan dibidangnya
 - b. Komitmen pada kualitas
 - c. Dedikasi pada kepentingan masyarakat
 - d. Keinginan untuk membantu masyarakat
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 :
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia
 - 2) Adanya peraturan hukum
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Terbatasnya anggaran kepegawaian
 - 2) Proses rekrutmen yang kurang mendukung

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian di Kota Batu adalah dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dekat dan mudah terjangkau dari tempat tinggal peneliti.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Secara umum, situs penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya kesesuaian dengan substansi

penelitian dan mampu memberikan masukan, baik berupa orang, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam. Situs penelitian pada penelitian ini berada di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Adapun pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah :

1. Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Sekretariat Daerah Kota Batu merupakan instansi yang berwenang mengurus masalah kepegawaian sedangkan pemilihan kota Batu sebagai lokasi penelitian adalah lebih didasari kepada status baru Kota Batu dari kota administratif menjadi kota otonom yang memisahkan diri dari Kabupaten Malang pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, sehingga Kota Batu sebagai kota yang baru mengembangkan diri untuk menunjukkan eksistensinya secara tidak langsung membutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
2. Ketersediaan data yang ada di Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Sekretariat Daerah Kota Batu yang mendukung penelitian tentang adanya standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
3. Masalah waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena lokasi penelitian relatif lebih dekat dengan domisili penulis sehingga diharapkan penelitian dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dengan alasan-alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2006, h. 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara dan alat lainnya. Data primer sangat diperlukan

dalam penelitian karena merupakan data utama yang penting, didapatkan langsung dari sumbernya, serta langsung berhubungan dengan peneliti dan mampu memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Data primer ini diperoleh melalui interview dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pejabat yang berwenang dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu yaitu Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Kepala Sub-Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dan Pegawai Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu.

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yang mana dapat berupa buku, catatan-catatan resmi, dokumen atau arsip, majalah, serta data pendukung lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, arsip dari instansi maupun situs internet. Adapun batasan dari data sekunder tersebut adalah sepanjang mendukung isi dan pembahasan yang akan diperlukan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan :

1. *Pengamatan (Observasi)*

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Observasi ini diperlukan oleh peneliti sebab dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam melihat keadaan fenomena dan fakta dalam organisasi.

2. *Wawancara (Interview)*

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengamatan atau pengumpulan data secara langsung. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber atau informan. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Chori, S.Sos., M.Si
 - b. Kepala Sub-Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM
 - c. Staf Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom
3. *Wawancara secara Tertulis*

Pengumpulan data secara tertulis disini adalah dengan melakukan tanya jawab secara tertulis via email.

4. *Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi yang berkaitan dengan penelitian sangatlah diperlukan oleh peneliti untuk menambah informasi dan mendukung kegiatan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan (Moleong, 2006, h. 9)
2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*) adalah pedoman melakukan wawancara. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak menyebar kemana-mana sehingga pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan (Moleong, 2006, h. 208)

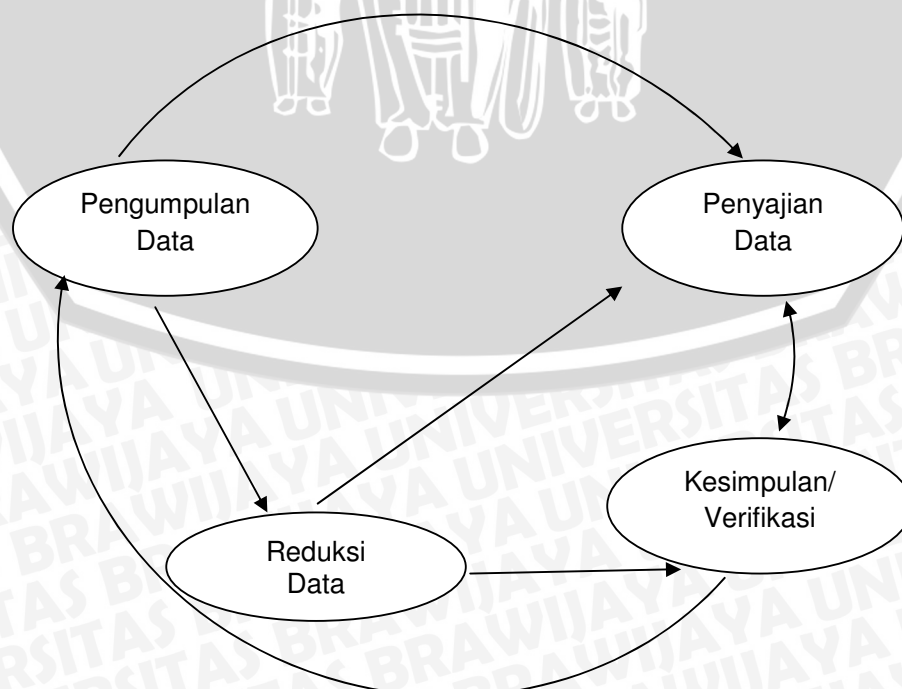
- Catatan Lapangan (*Field Note*) merupakan catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Menurut Bogdan and Biklen dalam Moleong catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2006, h. 209)

G. Analisis Data

Analisis data menunjuk pada kegiatan pengorganisasian data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing penelitian maupun keseluruhan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dalam suatu proses yang berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara insentif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif, dimana dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman, 1992, h. 20). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen tersebut, dapat disajikan dengan bagan 1 :

Bagan 1
Analisis Data Model Interaktif



1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah dilakukan reduksi data dan analisa data kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Pembentukan

Kota Batu yang diandalkan sebagai sentra wisata Jawa Timur merupakan Kota Administratif kedua yang lahir di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Jember. Pembentukan Kota Batu untuk menjadi Kota Administratif melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1) 6 Maret 1993, Kota Administrasi Batu dibentuk dan diresmikan dimana sebelumnya adalah kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Kelahiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatiff Batu yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan).
- 2) 10 April 1995, keluarnya Surat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang Peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Kotamadya Batu.
- 3) 11 April 1995, pengusulan kepada Gubernur tentang peningkatan status Kota Administratif menjadi Kotamadya.
- 4) 6 Juni 1996, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Surat Bupati Malang disertai Surat Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya ke Gubernur Jawa Timur.
- 5) 12 Januari 2001, melalui proses panjang, maka setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) 28 Februari 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- 7) 30 Juni 2001, UU No. 11 Tahun 2001 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan.
- 8) 17 Oktober 2002, secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota.

b. Keadaan Geografis

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis terletak pada posisi antara :

- 1) 7,44deg 55,11”sampai dengan 8,2deg 35,45” Lintang Selatan
- 2) 122,17deg 10,90” sampai dengan 122,57deg 00,00” Bujur Timur

Kota Batu mempunyai luas wilayah 202,800 km² atau sama dengan 20,280 ha dan berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- 2) Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau
- 4) Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

Pembagian wilayah pemerintahan Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa atau kelurahan, ketiga kecamatan itu adalah :

- 1) Kecamatan Batu dengan luas 46,377 km² terdiri dari 9 desa yaitu, Ngaglik, oro-oro ombo, pesanggrahan, sidomulyo, sisir, songgokerto, sumber rejo, temas dan torongrejo.
- 2) Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 km² terdiri dari 8 desa yaitu, bukukerto, bumiaji, giripurno, gunungsari, pandan rejo, punten, sumbergondo dan tulungrejo.
- 3) Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 km² terdiri dari 6 desa yaitu, Beji, dadaprejo, junrejo, mojorejo, pendem dan tiekung.

c. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kota Batu adalah mencapai 172.015 jiwa pada tahun 2007 yang terdiri dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, Kecamatan Bumiaji sekitar 51.054 jiwa dan Kecamatan Junrejo sekitar 40.433 jiwa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian di Kota Batu sebagian besar disokong oleh sektor pertanian, didukung dengan kondisi alam yang baik, tanah yang subur dan

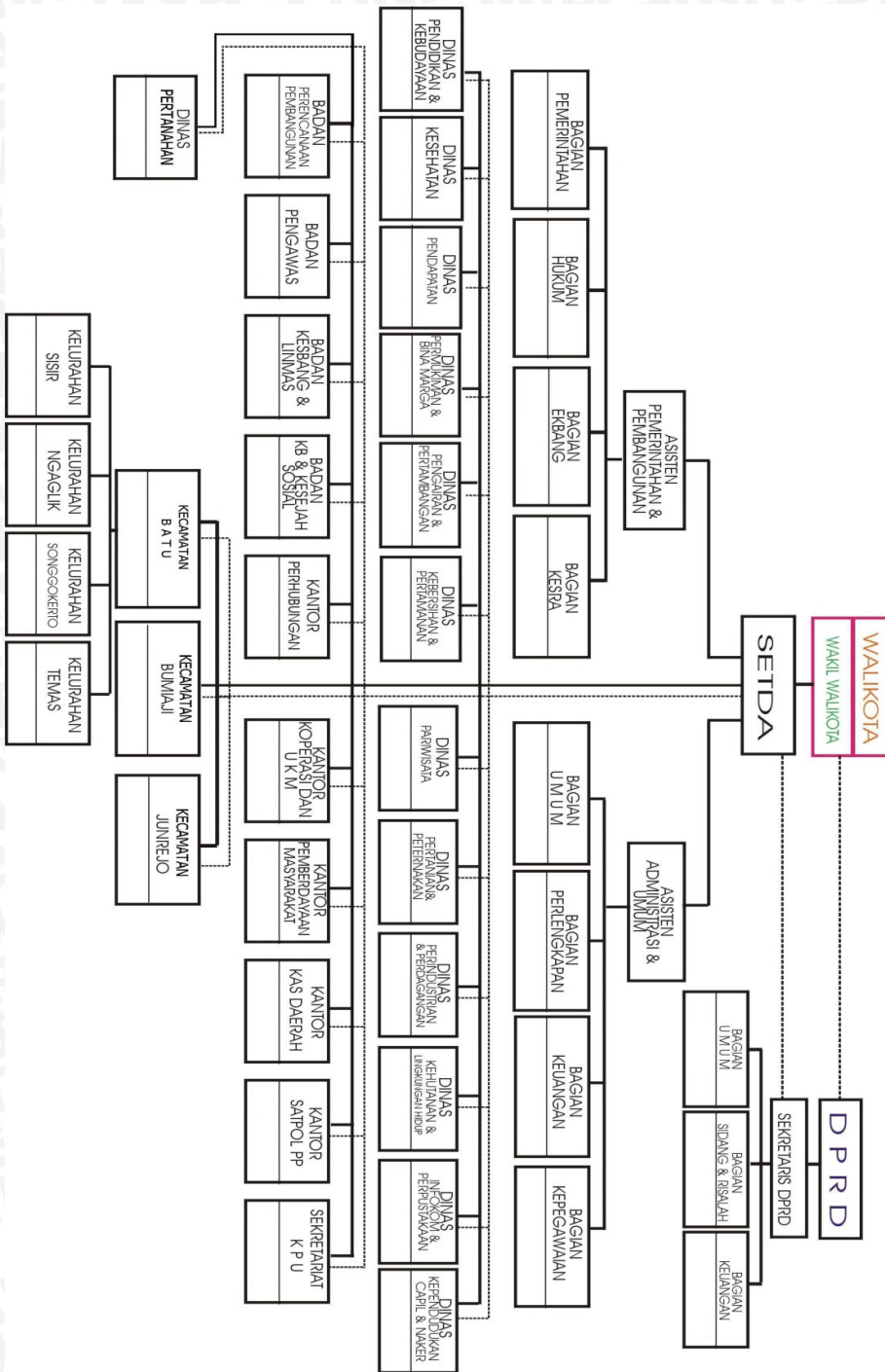
sumber air yang memadai Kota Batu menjadi kota pertanian yang berbasis agro ekonomi, dengan sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan sebagian yang lain memilih pekerjaan sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan sebagian kecil bekerja di perusahaan swasta.

e. Keadaan Pemerintahan

Kota Batu resmi mejadi Kota Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu pada tanggal 30 Juni 2001. Dipimpin oleh seorang Walikota dan dibantu 34 instansi atau unit kerja daerah mulai dari Sekretariat, Badan, Dinas, Bagian, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan serta cabang-cabang Dinas. Susunan Organisasi Pemerintah Kota Batu dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BATU



Keterangan :

----- : Garis Konsultasi

————— : Garis Komando

Sumber : Bagian Kpegawaiatan Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

f. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu

Sampai dengan periode semester kedua tahun 2006, Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Batu mengemban tugas memberikan pelayanan prima kepada kurang lebih 4000 pegawai. Yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 2000 dan sejumlah 1700-an tenaga honorer daerah. Jumlah pegawai tersebut tersebar pada 34 instansi atau unit kerja daerah mulai dari Sekretariat, Badan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan serta Cabang Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Selanjutnya dipaparkan kondisi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batu dalam tabel–tabel di bawah ini :

Tabel 1
Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD sederajat	32	1,62%
2	SLTP sederajat	40	2,02%
3	SMA Sederajat	327	16,5%
4	D3 sederajat	97	4,91%
5	Sarjana (S1)	1.151	58,3%
6	Pasca Sarjana (S2)	124	6,28%
Jumlah		1.973	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan kondisi pegawai menurut tingkat pendidikan yang terbagi dalam 6 kategori yaitu SD, SMP, SLTA, Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Jumlah pegawai dengan pendidikan S1 memiliki proporsi tertinggi yaitu sebesar 58,3 % dari keseluruhan jumlah pegawai, berikut disusul dengan tingkat pendidikan SMA, Pasca Sarjana, D3, SMP dan yang terakhir SD. Dengan memperhatikan data diatas mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kota Batu sudah cukup optimal disesuaikan dengan kualifikasi tanggung jawab serta formasi jabatan. Dari proporsi tersebut diharapkan dapat menunjang efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Tabel 2
Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Golongan Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	I	22	1,11%
2	II	331	16,7%
3	III	1.242	62,9%
4	IV	378	19,1%
Jumlah		1.973	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa jumlah pegawai golongan I sebesar 1,11%, golongan II sebesar 16,7%, golongan III sebesar 62,9% dan golongan IV sebesar 19,1%. Dari proporsi tersebut terlihat bawah komposisi PNS di Kota Batu lebih banyak pada golongan III yakni sebesar 62,9% persen. Jumlah pegawai ideal adalah mengikuti komposisi piramidal yaitu banyak di tingkat bawah semakin ke atas semakin kecil atau mengerucut. Salah satu sebab dari timbulnya proporsi tersebut salah satunya adalah karena penyesuaian antara formasi jabatan dengan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan. Tetapi kondisi kepegawaian yang menggelembung tersebut harus disikapi secara bijaksana kalau tidak ingin menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Tabel 3
Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	1040	52,71%
2	Perempuan	933	47,29%
Jumlah		1.973	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 52.71% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 47.29%. Komposisi tersebut masih dalam

kondisi yang wajar karena selisih diantara kedua jenis kelamin tersebut tidak terlalu tajam.

Tabel 4
Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Eselon

No	Golongan Pangkat	Jumlah Jabatan	Jumlah Terisi
1	Eselon II	21	18
2	Eselon II	93	77
3	Eselon III	250	224
Jumlah		364	319

Sumber : Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan jumlah jabatan yang telah terisi adalah 319 dari 364 jabatan. Dengan masih banyaknya jabatan yang belum terisi mengindikasikan masih kurang tersedianya Sumber Daya Manusia capable yang mampu mengisi jabatan dengan didasarkan latar belakang pendidikan dan tugas serta fungsi jabatannya.

Tabel 5
Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Diklatpim

No	Golongan Pangkat	Pejabat yang sudah	Pejabat yang belum
1	Diklatpim II	10	8
2	Diklatpim III	75	2
3	Diklatpim IV	192	32
Jumlah		277	42

Sumber : Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa pegawai yang telah menduduki eselon yang belum mengikuti diklat struktural sejumlah 42 orang. Untuk itu diklat sejenisnya harus dilakukan secara berkala mengingat masih banyak pejabat yang belum mengikuti diklat struktural.

Tabel 6
Kondisi Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	SD sederajat	64	2,89%
2	SLTP sederajat	219	9,9%
3	SMA Sederajat	1033	46,7%
4	D3 sederajat	50	2,26%
5	Sarjana (S1)	827	37,4%
6	Pasca Sarjana (S2)	3	0,13%
Jumlah		2211	100%

Sumber : *Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008*

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagian besar mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan SMA. Dengan demikian tenaga honorer yang ada sudah mendukung tugas serta tanggung jawab jika ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikan.

2. Gambaran Umum Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu

a. Dasar Pembentukan

Institusi Kepegawaian di Kota Batu belum sama dengan institusi-institusi kepegawaian di daerah-daerah lain yang berbentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal ini dipengaruhi oleh perubahan status Kota Batu dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom sejak tahun 2001 yang secara tidak langsung menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belum utuh dan samanya persepsi dalam menterjemahkan berbagai aturan perundang-undangan serta seringnya terjadi perubahan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang masih belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 4) Terbatasnya anggaran kepegawaian yang tersedia
- 5) Sistem informasi manajemen kepegawaian yang belum memadai
- 6) Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian

Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut, institusi kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota Batu masih berupa bagian kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batu, bagian kepegawaian adalah institusi pemerintah di Kota Batu yang berwenang menangani masalah kepegawaian dimana berdiri sebagai bagian dibawah Sekretariat Daerah.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Bagian Kepegawaian Kota Batu terangkum dalam rencana strategis (renstra) lima tahunan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Secara garis besar rencana strategis tersebut memuat visi dan misi yang harus dicapai, implementasi visi dan misi dalam tujuan dan sasaran yang jelas yang kemudian diuraikan dalam rencana program kerja dan kegiatan dalam kurun waktu tahunan :

1) Visi

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Kota Batu yang Profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

2) Misi

a) Meningkatkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang terarah, mandiri, professional, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. Bermakna, bahwa untuk menciptakan manajemen kepegawaian yang profesional diperlukan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel mempunyai arah yang jelas tidak berpihak, mandiri serta profesional. Sehingga kebijakan maupun pelaksanaan manajemen kepegawaian dituntut transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

b) Melaksanakan penyempurnaan Sistem Administrasi Kepegawaian. Bermakna bahwa perlu penyusunan program dan petunjuk pembinaan yang didukung oleh sistem Informasi Kepegawaian dan Tata usaha kepegawaian dalam rangka melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan serta pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil secara efektif dan efisien.

c) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya. Bermakna, bahwa Pemerintah Kota Batu menjadi Kota Otonomi baru berjalan lima tahun (30 Oktober 2001) tidak terlepas dari keterbatasan jumlah maupun kualitas dari

Aparatur Pemerintah terutama di dalam pelayanan masyarakat (publik) dan mengelola potensi sumber daya alam di Kota Batu. Sehingga untuk mencapai pemerintahan yang baik di Kota Batu selain diperlukan kemampuan sumber daya manusia dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam juga dibutuhkan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- d) Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai. Bermakna, bahwa selain dituntut untuk bekerja secara optimal juga dipikirkan mengenai kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.
- e) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui upaya peningkatan akuntabilitas publik aparatur, pengawasan yang efektif serta pemantapan netralitas Pegawai Negeri Sipil.

c. Tujuan

Tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan untuk merealisasikan misi. Sebab, tujuan itu harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Adapun tujuan yang ingin dicapai Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu untuk dapat merealisasikan misinya adalah :

- 1) Terwujudnya sistem kepegawaian daerah yang terarah, mandiri, profesional, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berdayaguna dan berhasil guna.
- 3) Tercapainya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan atau keahlian, sikap dan nilai-nilai terhadap pekerjaan.
- 4) Tingginya tingkat kesejahteraan pegawai serta terciptanya lingkungan kerja yang harmonis pada akhirnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, akuntabel serta netral.

d. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan tersebut, maka Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu menetapkan sasaran kerja.

Adapun sasaran kerja Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sistem kepegawaian yang terarah, mandiri, professional, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel ditetapkan sasaran utama antara lain :
 - a) Peningkatan status dari Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kota batu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 43 A, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
 - b) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang handal didukung oleh tersedianya data kepegawaian yang lengkap, terkini, akurat dan informatif.
 - c) Adanya upaya dan usaha peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - d) Tersedianya sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai serta mendukung kegiatan kepegawaian.
- 2) Mewujudkan pendayagunaan aparatur pemerintahan yang berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a) Mengembangkan analisa jabatan, sebagai acuan dalam pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai.
 - b) Adanya analisa formasi pegawai untuk mengetahui kebutuhan serta rencana penempatan pegawai.
- 3) Tercapainya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas, memiliki pengetahuan, ketrampilan atau keahlian, sikap dan nilai-nilai terhadap pekerjaan, sasaran pokoknya adalah :
 - a) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur, baik diklat kader, diklat kepemimpinan, diklat teknis maupun diklat fungsional.
 - b) Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang representative sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan sebagai tempat diklat.
 - c) Tersedianya peserta diklat yang berkualitas.
 - d) Tersedianya tenaga pengajar atau widyaiswara yang memenuhi syarat.

- e) Adanya evaluasi terhadap alumni diklat.
- 4) Tercapainya tingkat kesejahteraan pegawai serta terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a) Tersedianya bantuan kesejahteraan pegawai untuk memberikan santunan bagi pegawai yang mengalami musibah, meninggal dunia maupun pegawai yang memasuki pensiun.
 - b) Terdapatnya dan terciptanya lingkungan dan suasana kerja yang nyaman dan harmonis.
- 5) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, akuntabel, serta netral maka sasaran yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - a) Terlaksananya AKIP dan disusunnya LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b) Adanya penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan hukuman bagi pegawai yang melanggar ketentuan atau peraturan kepegawaian yang berlaku.
 - c) Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai.

Dalam rangka mewujudkan terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, upaya-upaya yang telah dilakukan dan dicapai oleh Bagian Kepegawaian Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penataan dan peningkatan serta pemantapan manajemen pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ada.
- b. Menyiapkan Peraturan Daerah yang akan digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD).

e. Struktur Organisasi

Organisasi adalah keseluruhan daripada sumber-sumber yang telah tersedia baik sumber yang bersifat manusia maupun yang non manusia serta mengelompokan daripada tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain organisasi adalah ajang, jaringan tata kerja sama kelompok orang-orang secara

teratur dan kontinu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan, dimana di dalamnya selalu terdapat tata cara bekerja samanya dan hubungan antara atasan dan bawahan (*Openbare Dienstbetrekking*).

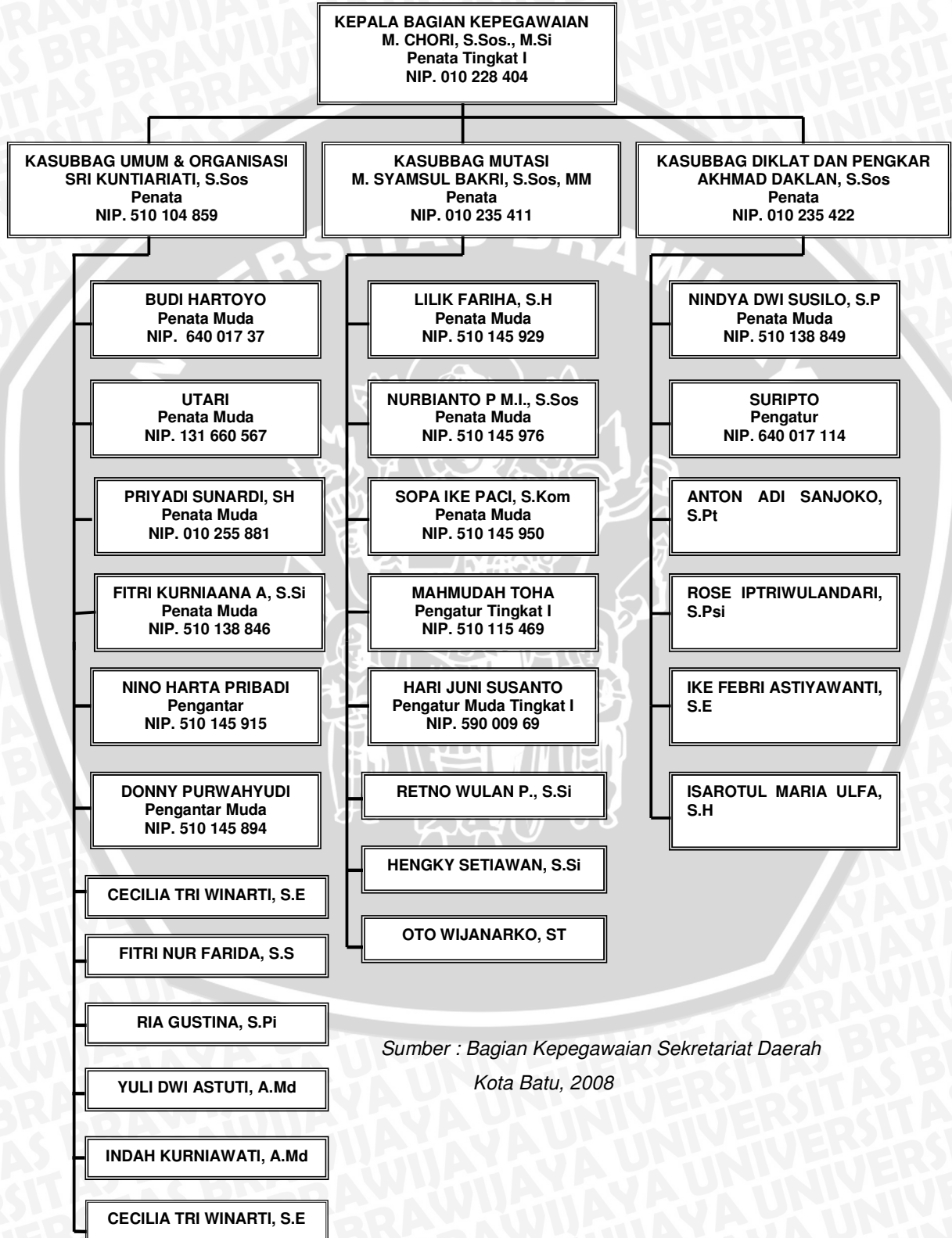
Struktur organisasi Bagian Kepegawaian Kota Batu tertuang pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kepala Bagian
- b. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub-bagian Umum dan Organisasi
 - 2) Sub-bagian Mutasi
 - 3) Sub-bagian Pendidikan dan Pengembangan Karier

Struktur organisasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu dapat dilihat dalam bagan 3 berikut ini.



Bagan 3
Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu



*Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
Kota Batu, 2008*

Sedangkan dalam Peraturan walikota Batu Nomor 38 Tahun 2006 diatur tentang Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing sub-bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Organisasi

Menurut pasal 57 Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2006 tentang Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kota Batu, Sub-bagian Umum dan Organisasi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai
- 2) Menghimpun produk hukum di bidang kepegawaian
- 3) Merencanakan dan mengurus kesejahteraan pegawai
- 4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa
- 5) Pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian teknis penataan dan pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan
- 7) Pendayagunaan aparatur Negara
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan analisis jabatan
- 9) Menyelenggarakan standar pelayanan minimal.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas tersebut, Sub-bagian Umum dan Organisasi mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program dan penyiapan bahan pembinaan pegawai
- 2) Pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai
- 3) Penghimpunan perkembangan produk hukum di bidang kepegawaian
- 4) Perumusan rencana dan pengurusan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, Kartu Istri/Kartu Suami, Taspen, Askes, dan Kartu Kepegawaian serta pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai (Simpeg)
- 5) Pemeliharaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pekerjaan (*conduite staat*)
- 6) Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian teknis penataan dan pembinaan kelembagaan

- 7) Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian teknis ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan analisis jabatan dan formasi jabatan
- 9) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kepegawaian dan organisasi
- 10) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian

b. Sub-bagian Mutasi

Menurut pasal 58 Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2006 tentang Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kota Batu, Sub-bagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi pengangkatan dan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sub-bagian Mutasi mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala mutasi Pegawai Negeri Sipil
- 2) Pelaksanaan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai cuti, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan, pemberhentian sementara, pensiun dan lain-lain mengenai Pegawai Negeri Sipil
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian

c. Sub-bagian Pendidikan Latihan dan Pengembangan Karier

Menurut pasal 59 Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2006 tentang Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kota Batu, Sub-bagian Pendidikan Latihan dan Pengembangan Karier mempunyai tugas-tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pegawai
- 2) Menyusun formasi
- 3) Menyiapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur atau kepegawaian termasuk tugas belajar dan penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas dan latihan pra jabatan

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sub-bagian Pendidikan Latihan dan Pengembangan Karier mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data pegawai untuk perencanaan kepegawaian, penyusunan formasi pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan
- 2) Pengelolaan administrasi pendidikan dan pelantikan pegawai yang diselenggarakan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah termasuk tugas belajar
- 3) Pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil
- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program latihan pra jabatan dan ujian dinas serta membantu pelaksanaannya
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian

1) Aspek Sumber Daya Manusia

Saat ini Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu didukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Struktural dan 15 (lima belas) orang Staf Pegawai Negeri Sipil serta 16 (enam belas) orang pegawai kontrak (honorar). Berdasarkan jenis jabatan, kondisi pegawai Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu dapat dilihat dari tabel 7. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 7

Kondisi PNS Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Berdasarkan Jenis Jabatan

Nama Jabatan	Jumlah	Satuan
Pejabat Eselon III	1	Orang
Pejabat Eselon II	3	Orang
Non Eselon	14	Orang

Sumber data: Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Tabel 8
Kondisi PNS Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Satuan
Pasca sarjana	3	Orang
Sarjana	6	Orang
Diploma/SMA	9	Orang

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Kondisi kepegawaian berdasarkan tabel 7 dan tabel 8, jika dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu serta uraian tugasnya maka jumlah 35 (tiga puluh lima) orang pegawai tersebut sudah cukup untuk memenuhi pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan perhitungan volume kerja serta uraian tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya.

2) Aspek Dana

Dana sebagai salah satu pendukung dalam kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian memang sangat diperlukan, sehingga dengan dana yang memadai dapat tercapai efektifitas pelaksanaan tugas. Saat ini anggaran untuk Bagian Kepegawaian bersumber dari anggaran langsung (rutin) yang dikelola oleh bagian kepegawaian sendiri, serta anggaran belanja tidak langsung dibawah unit Sekretariat Daerah. Besarnya anggaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja Pegawai dan pengembangannya seta kesejahteraannya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9
Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2005/2006 dan 2006/2007

No	Tahun Anggaran	Anggaran Pembangunan (Rp.)	Anggaran Rutin (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2005/2006	811,650.092,-	753.916.000,-	1.565.556.092
2	2006/2007	1,160,000.000,-	794.392.000,-	1.954.932.000

Sumber: Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu , 2008

3) Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Bagian Kepegawaian Kota Batu menempati gedung Sekretariat Daerah Kota Batu bersama dengan bagian lain yang berada di lingkungan sekretariat daerah sejak tahun 2001, terdiri dari 1 lantai dengan 4 ruang kerja. Pada saat ini kondisi ruang kerja kurang memadai dikarenakan jumlah personilnya semakin banyak serta tugas yang dikerjakan semakin padat, adapun guna mendukung tugas operasional tersebut sarana dan prasarana yang ada antara lain:

1. Telah tersediannya mebelair serta kelengkapan alat perkantoran untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Telah tersediannya perangkat komputerisasi sejumlah 8 unit, dan telekomunikasi (berupa mesin telepon 3 buah dan faximile 1 buah) serta aplikasi perangkat lunak SIMPEG, SIMSOR dalam rangka untuk pengolahan data kepegawaian.
3. Telah tersediannya kendaraan dinas berupa 1 Unit mobil Xenia, serta 3 buah sepeda motor.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu Tahun 2005-2007

Dalam kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil hal pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah formasi kebutuhan pegawai dari masing-masing unit kerja. Setelah jumlah formasi terbentuk, kemudian diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan formasi pegawai Kota Batu tahun 2005-2007 dan penetapan keputusan formasi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian. Untuk selanjutnya setelah formasi terbentuk, dilakukan pengumuman tentang adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara umum, obyektif dan transparan baik melalui media massa maupun media elektronik.

Kota Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kota Malang dan berdiri sendiri sebagai suatu Kota Otonom sejak tahun 2001 memerlukan pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di daerahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pada setiap tahunnya diadakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil guna merekrut pegawai yang

berkompeten dan profesional. Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu diterapkan standar kompetensi untuk masing-masing jenis jabatan yang tersedia, hal ini dikarenakan masing-masing jabatan mempunyai spesifikasi kemampuan atau keahlian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Standar kompetensi yang merupakan spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, dimana memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik sangat diperlukan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan tujuan pengadaan pegawai yaitu untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak M. Chori, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bagian Kepegawaian Kota Batu, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

” Pemerintah Kota Batu dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada prinsipnya sudah berupaya menerapkan standar kompetensi untuk jabatan yang tersedia. Ini guna menjangkau Pegawai Negeri sipil yang jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam pekerjaannya. Seperti contoh untuk jabatan guru, maka kita mempunyai kualifikasi bahwa pelamar harus mempunyai ijazah pendidikan yang terkait dengan kemampuannya”. (wawancara pada tanggal 12 Mei 2008)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa, standar kompetensi sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan profesionalisme dimana standar kompetensi menjadi dasar atau prioritas utama dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil.

a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam satuan organisasi negara disebabkan oleh adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Tujuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Batu adalah dalam rangka untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas atau jabatan yang akan diduduki. Pengadaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu dilaksanakan secara transparan dan

bertanggung jawab, dengan didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004, ditentukan bahwa untuk tahun anggaran 2004 dilakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang hanya berasal dari pelamar umum. Formasi pengadaan tersebut diprioritaskan untuk mengisi jabatan :

1. Dosen dan Guru;
2. Tenaga Kesehatan; dan
3. Tenaga Strategis lainnya.

Sedangkan mulai tahun anggaran 2005-2009, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disamping dari pelamar umum juga berasal dari tenaga honorer. Kebijakan ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi dan menghapus jumlah tenaga honorer yang ada. Prioritas tenaga yang dibutuhkan adalah :

1. Tenaga Guru;
2. Tenaga Kesehatan;
3. Tenaga Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain; dan
4. Tenaga Teknis lain yang dibutuhkan pemerintah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, bahwa :

“ Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2005 sampai 2009, akan berbeda dengan pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2005-2009 rekrutmen pegawai akan dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur umum yang diikuti oleh pelamar umum dan jalur khusus yaitu tenaga honorer (wawancara dengan Bapak M. Chori, S.Sos., M.Si pada tanggal 12 Mei 2008) ”

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdikan pada suatu instansi pemerintah dengan cara melakukan pengangkatan bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui jalur umum dan jalur khusus ini diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu dari pelamar umum Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan dari tenaga honorer Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum sesuai dengan kebijakan pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan), tenaga penyuluh, tenaga teknis serta jabatan tertentu lainnya. Adapun syarat-syarat untuk mengikuti pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dari pelamar umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak boleh membatasi pelamar dari luar wilayah atau daerahnya dengan membuat persyaratan bahwa pelamar harus bertempat tinggal dan atau memiliki KTP di wilayah atau daerahnya.
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, atau 40 (empat puluh) tahun bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002.
3. Syarat usia pelamar :
 - a) Paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan PNS
 - b) Paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun atau 40 (empat puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan PNS
4. Berijazah atau pendidikan Sarjana (S1), Akademi (D4), Sarjana Muda (D3) dan SMA atau SMK Sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
5. Waktu melamar telah memiliki ijazah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi. Apabila dalam ijazah tersebut tidak disebutkan akreditasi, maka perlu dilampirkan surat keterangan dari universitas yang bersangkutan yang menyebutkan akreditasinya.

Bagi pelamar umum, diadakan ujian tertulis maupun psikotes yang dapat menggambarkan kemampuan individu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian mutasi Badan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., bahwa :

“ Pelamar umum yang memenuhi syarat kemudian harus mengikuti ujian penyaringan yang meliputi tes kompetensi dasar maupun tes kompetensi bidang. Yang mana tes kompetensi ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan individu untuk menduduki suatu jabatan apakah sudah sesuai atau belum dengan persyaratan yang dibutuhkan guna menempati posisi tersebut “. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2008)

Dalam upaya untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, maka dilakukan ujian bagi pelamar umum yang meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) bagi semua pelamar baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Selain Tes Kompetensi Dasar (TKD), instansi pusat maupun instansi daerah dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan oleh instansi masing-masing. Adapun materi ujian dari pelamar umum yang meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) adalah :

1. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK), dibuat oleh masing-masing Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Tingkat Instansi Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat oleh Kepala Bagian Kepegawaian Negara (BKN). Tes Kompetensi Dasar (TKD) ini dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau perilaku peserta ujian yang meliputi : wawasan nasional, regional dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif. Tes Kompetensi Dasar (TKD) diikuti oleh semua peserta ujian, yang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan yang berbeda.

2. Tes Kompetensi Bidang (TKB)

Materi Tes Kompetensi Bidang (TKB) dibuat oleh masing-masing Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Tingkat Instansi Pusat/Propinsi/Kabupaten atau Kota. Tes Kompetensi Bidang (TKB) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan atau ketrampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan yang dilamar. Dalam menyusun materi soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) harus disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, materi

soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk jabatan satu berbeda dengan jabatan yang lain.

Tes Kompetensi Bidang (TKB) diberikan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan masing-masing instansi. Misalnya :

- a) Bagi pelamar profesi dokter, materi ujian pengetahuan substansi yang berkaitan dengan kedokteran, disiapkan oleh Dinas yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kesehatan yang dapat mengacu kepada kisi-kisi yang dibuat oleh Departemen Kesehatan.

Dalam hal instansi membutuhkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memerlukan keahlian atau ketrampilan tertentu dapat diberikan tambahan ujian ketrampilan yang bersifat praktik, misalnya untuk jabatan dibidang SAR harus memiliki ketrampilan berenang dan mendaki gunung.

Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer pada prinsipnya adalah pengangkatan tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dasar pengangkatan tenaga honorer ini adalah karena tenaga honorer ada yang telah lama bekerja kepada instansi pemerintah yang keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah. Mengingat akan pentingnya keberadaan tenaga honorer dan dalam kenyataan ada sebagian tenaga honorer yang sudah berusia lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah memberikan perlakuan secara khusus dalam pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada suatu instansi pemerintah, yang mana pada pengadaan tahun 2005 sampai tahun 2009 ini diprioritaskan untuk mengisi tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan pemerintah.

Pengangkatan tenaga honorer ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2005 sampai tahun 2009. Dalam hal tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruhnya telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum tahun 2009, maka tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal tenaga honorer yang dimaksud adalah termasuk guru bantu, guru wiyata bhakti, guru honorer, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap dan lain-lain sejenisnya. Sedangkan tenaga kesehatan termasuk didalamnya adalah dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Disamping itu juga para dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang telah selesai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan usia maksimal 46 (empat puluh enam) tahun dan bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Dalam pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM bahwa :

“ Tenaga honorer yang diangkat adalah tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang kemudian seleksinya melalui kelengkapan syarat administrasi, kesehatan dan kompetensi yang dimiliki tiap individu dan pelaksanaan ujian terpisah dari pelamar umum. Pengangkatan tenaga honorer ini lebih memperhatikan usia dan masa kerjanya “. (wawancara pada tanggal 19 Mei 2008)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas usia dan masa kerja tenaga honorer serta nama tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Syarat bagi kelompok pelamar honorer adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bekerja pada instansi di Lingkungan Kota Batu dan penghasilannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Terdaftar dalam database tenaga honorer Pemerintah Kota Batu.
4. Ketentuan usia dan masa kerja :
 - a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus.
 - b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus.

- c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.
- d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Bagi tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan telah bekerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Selanjutnya bagi tenaga honorer yang telah bekerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun, pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selain melalui seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi, mereka juga diwajibkan mengisi dan menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemimpinan yang baik.

1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005

Pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, formasi yang ditetapkan adalah sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari pelamar umum sebanyak 102 (seratus dua) orang dan tenaga honorer sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang. Hal ini terkait dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa pada pengadaan tahun 2005 alokasi yang tersedia adalah diperuntukkan 70% bagi tenaga honorer dan sebanyak 30% bagi pelamar umum.

Namun berdasarkan data yang ada, dari formasi yang disediakan untuk pelamar umum sebanyak 102 (seratus dua) orang yang diterima hanya 92 (sembilan puluh dua) orang saja sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) orang. Menurut pegawai Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Sopa Ike Paci, S.Kom bahwa :

“ Memang terdapat *gap* sebanyak 10 orang dalam pengadaan CPNS tahun 2005 dari pelamar umum, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama dari target 102 untuk pelamar umum yang akan mengisi formasi yang disediakan, tidak semuanya dapat terpenuhi karena ada beberapa formasi dengan kualifikasi pendidikan tertentu tidak ada pelamarnya. Kedua, ada sebagian pelamar yang lolos seleksi administrasi tidak memenuhi standar penilaian untuk kelulusan yang ditetapkan “. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2008)

Dari jumlah 92 (sembilan puluh dua) orang yang diterima tersebut, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur Umum Tahun 2005

		Golongan Ruang					Jumlah
		III b	III a	II c	II b	II a	
1	Tenaga Pendidikan	-	15		12	-	27
2	Tenaga Kesehatan	1	-	2	-	-	3
3	Tenaga Teknis	-	27	9	-	26	62
Total		1	42	11	12	26	92

Sumber : *Bagian Kepegawaian Kota Batu, 2008*

Dan untuk selengkapnya, data Pegawai Negeri Sipil yang diterima dalam pengadaan tahun 2005 dari jalur umum dapat disajikan dalam lampiran 1 (terlampir).

Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 yang berasal dari tenaga honorer, formasi yang ditetapkan adalah sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang, namun dalam pelaksanaannya yang diterima hanya 214 (dua ratus empat belas) orang. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran 2 (terlampir).

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan dengan yang diterima untuk pengadaan tahun 2005 tidak sesuai. Terdapat selisih 29 (dua puluh sembilan) orang. Hal ini disebabkan dari jumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang yang memenuhi ketentuan syarat pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 adalah hanya 214 (dua ratus empat belas) orang saja, sedangkan 29 (dua puluh Sembilan) orang lainnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh staf Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom bahwa :

“ Dari formasi 243 untuk tenaga honorer tahun 2005, yang diterima hanya 214. Kekurangan sebanyak 29 orang ini disebabkan beberapa tenaga honorer tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005, khususnya pada pasal 4 menyangkut masa kerja dan usia yang sudah tidak memenuhi kualifikasi “. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2008)

Sedangkan mengenai penempatan jumlah pegawai yang diterima berdasarkan kebutuhan yang ada, baik itu bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11
Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur
Honorer Tahun 2005

		Golongan Ruang						Jumlah
		III b	IIIa	IIc	IIb	Ia	Ic	
1	Tenaga Pendidikan		30		17	6		53
2	Tenaga Kesehatan	1		2		4		7
3	Tenaga Teknis		53	9		75	10	154
Total		1	83	11	17	85	10	214

Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Berdasarkan data yang ada, mengenai penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dalam pengadaan tahun 2005 baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer jika dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki individu dengan penempatan jabatan sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 formasi kebutuhan jumlah pegawai untuk pelamar umum dan tenaga honorer adalah 0%:100%. Hal ini berdasarkan adanya surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor B/2110/M.PAN/8/2006 yang menyebutkan bahwa alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil untuk provinsi dan kota pada tahun 2006 sepenuhnya untuk pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, sehingga tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pendaftar umum.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 07 Mei 2007 Nomor : K.26 /30/V.72-9/99 Tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer yang diusulkan mengisi formasi Tahun 2006, Pemerintah Kota Batu menerima daftar nama-nama nominatif tenaga honorer yang diusulkan untuk mengisi lowongan formasi tahun anggaran 2006. Dalam surat tersebut juga disertakan keharusan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu untuk melakukan verifikasi atau penelitian terhadap daftar dimaksud terutama apabila ada nama nominatif

honorar yang sudah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun anggaran sebelumnya, meninggal dunia, dan atau mengundurkan diri untuk segera dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Setelah diadakan penelitian dan verifikasi terhadap listing dimaksud ditemukan 11 (sebelas) nama tenaga honorar yang perlu mendapatkan perbaikan karena berbagai sebab yaitu : 1 (satu) orang tercetak ganda, 7 (tujuh) orang telah diterima sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun anggaran 2005, dan 3 (tiga) orang telah mengundurkan diri sebagai tenaga honorar Kota Batu. Dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Batu Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Mei 2007 Nomor : 871/1140/422.024/2007 Perihal Verifikasi daftar nominatif tenaga honorar yang diusulkan mengisi formasi tahun 2006.

Sebagai jawaban atas surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan revisi daftar nominatif honorar formasi tahun 2006 melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 25 Juni 2007 Nomor : E.26-30/V.96-2/99 Perihal Revisi daftar nama tenaga honorar formasi TA 2006. Dari daftar nominatif tersebut jumlah keseluruhan nominatif honorar untuk Kota Batu dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2006 adalah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) orang terbagi ke dalam :

- a. 155 (seratus lima puluh lima) tenaga fungsional pendidikan, yang meliputi :
 - 1) 39 (tiga puluh sembilan) Guru TK;
 - 2) 60 (enam puluh) Guru SD;
 - 3) 25 (dua puluh lima) Guru SMP/MTs;
 - 4) 14 (empat belas) Guru SMU/MA; dan
 - 5) 15 (lima belas) Guru SMK;
 - 6) 2 Guru SLB).
- b. 7 (tujuh) tenaga fungsional kesehatan, yang meliputi :
 - 1) 2 (dua) Dokter;
 - 2) 3 (tiga) Perawat; dan
 - 3) 2 (dua) Bidan
- c. 2 (dua) tenaga fungsional penyuluh;
- d. 232 (dua ratus tiga puluh dua) tenaga teknis strategis; dan
- e. 195 (seratus sembilan puluh lima) tenaga administrasi.

Selanjutnya daftar nominatif honorer dimaksud ditidakanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor : 871/1761/422.024/2007 tanggal 28 Juni 2007 Tentang Jadwal pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) bagi nominatif tenaga honorer Kota Batu formasi tahun 2006. Dalam proses pemberkasan tersebut dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas usulan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) meliputi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan syarat administratif dokumen nominatif honorer sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Integritas, disiplin, dan kinerja tenaga honorer yang bersangkutan dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Kepala SKPD masing-masing honorer dan disahkan oleh pejabat eselon II;
- c. Kehadiran tenaga honorer dibuktikan dengan daftar hadir dan daftar gaji tenaga honorer yang bersangkutan; dan
- d. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dari jumlah formasi 591 (lima ratus sembilan puluh satu), nominatif honorer yang melakukan proses pemberkasan sejumlah 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang dan yang tidak melakukan pemberkasan sejumlah 8 (delapan) orang nominatif honorer dengan berbagai sebab yaitu : 1 (satu) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, 3 (tiga) orang tidak memenuhi syarat ketentuan masa kerja, 3 (tiga) orang tidak dapat menunjukkan ijasah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan 1 (satu) orang telah diterima sebagai CPNS Tahun Anggaran 2005. Terhadap nominatif honorer yang tidak memenuhi syarat administratif pemberkasan ini sudah disiapkan surat usulan pengajuan nominatif pengganti kepada Badan Kepegawaian Negara, yaitu surat Surat Walikota Batu Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Juli 2007 Nomor : 871/1588.1/422.024/2007 Perihal Perubahan Nominatif Tenaga Honorer yang diusulkan mengisi formasi 2006. Yang kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan nominatif honorer pengganti sejumlah 8 (delapan) orang, melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 September

2007 Nomor : E.26-30/V.133-4/99 Perihal Revisi daftar nama tenaga honorer formasi T.A 2006.

Dari 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang nominatif honorer dengan berkas lengkap dan absah telah ditindaklanjuti dengan pengusulan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP)-nya kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo dan telah ditetapkan NIP-nya oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tanggal 11 Desember 2007 Nomor : 24/KR.II/K/XII/2007 Perihal Penyampaian Penetapan NIP CPNS Tahun 2006 atas nama Sdr. Siti Maimunah dan kawan-kawan; dan sampai sekarang masih dalam proses penandatanganan terhadap Surat Keputusan (SK) Walikota Batu tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan proses penandatanganan SK dimaksud sesuai dengan perintah lisan Walikota Batu pada tanggal 04 Pebruari 2008 bahwa untuk menjamin integritas dan disiplin tenaga honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Batu Tahun Anggaran 2006 dapat dipertanggungjawabkan, maka bagi nominatif honorer tersebut diwajibkan diterbitkan lagi surat pernyataan integritas dari Kepala SKPD masing-masing honorer. Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat pernyataan tentang integritas tenaga honorer oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diperoleh hasil jumlah tenaga honorer yang dilengkapi surat pernyataan dari SKPD sejumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang, sementara 4 (empat) orang tidak dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan SKPD karena tindakan indisipliner, dan 1 (satu) orang meninggal dunia setelah penetapan NIP. Sehingga pada tahun 2006, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dari tenaga honorer hanya 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang yang berhasil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu. Hasil pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2006 dari tenaga honorer dapat dilihat dalam lampiran 3 (terlampir).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staf Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

" Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2006, pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer saja. Alokasi yang tersedia adalah 591 orang dan yang diterima adalah 578 orang. Adanya posisi lowong ini disebabkan karena dari 591 tenaga honorer yang lolos seleksi dan terdaftar dalam database BKN yang memenuhi ketentuan dari PP No. 48 Tahun 2005

pada pasal 3 dan 4 hanya 578 orang saja ". (wawancara pada tanggal 4 Juni 2008)

Sedangkan mengenai penempatan jumlah pegawai yang diterima berdasarkan kebutuhan yang ada, baik itu bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 12
Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Yang Lolos Seleksi Melalui Jalur
Honorer Tahun 2006

		Golongan Ruang							
		IIIb	IIIa	IIc	IIb	Ia	Ic	Ia	
1	Tenaga Pendidikan	0	65	5	18	65			153
2	Tenaga Kesehatan	2		3		2			7
3	Tenaga Teknis	1	144	15		185	36	50	431
Total		3	209	23	18	252	36	50	591

Sumber : Bagian Kepegawaian sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 dari tenaga honorer ini terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penempatan calon pegawai, yaitu ketidaksesuaian antara pendidikan yang dimiliki dengan jabatan dan penempatan calon pegawai. Dengan artian bahwa kompetensi yang dimiliki oleh calon pegawai tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 13
Data Tenaga Honorer Kota Batu Tahun 2006 yang tidak memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan

No	Nama	Usia		Masa kerja		Tugas	Unit Tugas	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		Thn	Bln	Thn	Bln				
FORMASI : GURU TK/RA/BA									
1.	Mieske Monny K	44	10	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	SLTP Umum	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
2.	Yayuk Iriani	44	8	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
3.	Dinawati Rahayu	44	4	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	KPG	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
4.	Suprapti	40	0	2	6	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	Sekolah Menengah Atas	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
5.	Ngatiyah	43	9	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	SLTP Kejuruan	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
6.	Ismiati	43	2	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	Madrasah Aliyah	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK

7.	Sulistin	42	5	1	0	Guru TK/RA/BA	Sekolah Taman Kanak Kanak	SLTP Umum	Pendidikan Seharusnya D - II PGTK
8.	Artiningsih	42	5	2	6	Guru TK/RA/BA	Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan Guru	Formasi Seharusnya GURU SD
9.	Siti Fatimah	36	8	2	6	Guru TK/RA/BA	Sekolah Dasar	SPG SD	Formasi Seharusnya GURU SD
10.	Retno Wulan K.	36	4	2	6	Guru TK/RA/BA	Sekolah Dasar	SPD SD	Formasi Seharusnya GURU SD
FORMASI : GURU SD/MI									
11.	Noor Khasanah	42	8	1	2	Guru SD/MI	Sekolah Dasar	Madrasah Aliyah	Pendidikan Seharusnya D III TARBIYAH AGAMA ISLAM
12.	Iskandar	43	3	1	0	Guru SD/MI	Sekolah Dasar	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya S1 PEND. AGAMA ISLAM
13.	Awan Hermawan	40	10	1	0	Guru SD/MI	Sekolah Dasar	SLTP Umum	Formasi Seharusnya Tng. TEKNIS STRATEGIS
14.	Rujito	39	6	1	0	Guru SD/MI	Sekolah Dasar	SMA	Pendidikan Seharusnya D - II PGSD
15.	Nurul Djaziroh	43	7	1	0	Guru SD/MI	Sekolah Taman Kanak Kanak	KPG	Formasi Seharusnya GURU TK
FORMASI : GURU SMP/MTs									
16.	Umi Nasikah	43	8	1	0	Guru SMP/MTs	SLTP Umum	DIPLOMA I	Pendidikan Seharusnya D I / AKTA I PPKn
17.	Muslina	41	11	1	0	Guru SMP/MTs	SLTP Umum	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya S1 P. MATEMATIKA
FORMASI : GURU SMA									
18.	Isnaini	44	02	01	00	Guru SMA	Sekolah Menengah Kejuruan	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya S-1 /A IV IPS
19.	Umi Salamah	39	1	2	8	Guru SMA	Sekolah Menengah Kejuruan	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya S-1 /A IV PPKN
20.	Nurhadi	43	10	1	0	Guru SMA	Sekolah Menengah Kejuruan	SLTA Umum	Pendidikan Seharusnya S-1 /A IV BHS. INDONESIA

Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Dalam menindaklanjuti permasalahan tentang ketidaksesuaian antara kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang tersedia, maka dikeluarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 810/422.024/2008 yang menyatakan bahwa salah satu syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan guru dari Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah apabila memiliki ijazah serendah-rendahnya:

- a) Diploma II Keguruan dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi Guru TK, SD, SDLB;

- b) Diploma III Keguruan atau Diploma III yang setingkat dan memiliki Akta III dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, baik untuk Guru Mata Pelajaran maupun Guru Pembimbing pada Tingkat SLTP; dan
- c) Sarjana Pendidikan atau Sarjana yang mempunyai Akta IV dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, baik untuk Guru Mata Pelajaran, Guru Praktik, maupun Guru Pembimbing pada SLTA sederajat.

Sehubungan dengan persyaratan diatas, maka bagi tenaga honorer yang pada saat diangkat dalam jabatan tertentu dalam hal ini fungsional guru tetapi belum memiliki prasarat ijazah sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, tetap bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru dengan catatan yang bersangkutan semenjak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menempuh pendidikan akta mengajar pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) atau yang sederajat untuk jangka minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. (surat terlampir)

Ketidaksesuaian antara kompetensi dengan tugas jabatan yang disandang oleh Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer ini disebabkan karena masih kurang optimalnya kinerja dari tim pengadaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staf dari Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

” Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer untuk tahun 2006, memang masih ada beberapa nama tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2005 sampai 2009. Sementara di lingkungan pemerintah Kota Batu sendiri tidak semua tenaga honorer yang ada memiliki kompetensi dan kriteria seperti yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, ada tenaga honorer yang hanya berpendidikan tamat SMA, dan jabatan yang disandanginya adalah guru SMA. Seharusnya yang terjadi adalah tenaga honorer tersebut tidak dapat menempati posisi guru SMA karena dia hanya lulusan SMA. Seharusnya yang dapat menempati posisi tersebut adalah yang mempunyai akta mengajar setingkat guru SMA (Akta IV). Sedangkan yang terjadi adalah tenaga honorer tersebut tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena ada beberapa hal, yaitu tenaga honorer tersebut mempunyai hubungan kedekatan dengan instansi asal (telah lama bekerja), dan adanya hubungan kedekatan dengan atasan baik dari hubungan saudara maupun pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari tim pengadaan khususnya dalam pengangkatan masih kurang optimal “ (wawancara pada tanggal 4 Juni 2008)

3) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007

Untuk tahun anggaran 2007 berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/266.F/M.PAN/9/2007 tanggal 06 September 2007 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2007, Pemerintah Kota Batu pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 memperoleh tambahan formasi sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) dengan perincian 30 (tiga puluh) dari pelamar umum dan 520 (lima ratus dua puluh) dari tenaga honorer.

Khusus untuk formasi pelamar umum pada tahun anggaran 2007 pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum belum dapat diselenggarakan pada tahun anggaran 2007, dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran. Berkaitan dengan hal itu formasi pelamar umum pada tahun anggaran 2007, melalui surat Walikota Batu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 Desember 2007 Nomor : 871/ 2356/422.024/2007 Perihal Formasi Pelamar Umum CPNSD Kota Batu Tahun Anggaran 2007 diusulkan untuk diakumulasikan (ditambahkan) pada jatah formasi pelamar umum untuk tahun anggaran 2008 atau dialihkan dan ditambahkan pada jatah formasi nominatif honorer tahun 2007.

Selanjutnya daftar nominatif tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diusulkan mengisi formasi tahun 2007 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : E.26-30/V.162-6/51 tanggal 12 Nopember 2007 perihal Daftar Nominatif Tenaga Honorer yang diusulkan mengisi formasi tahun 2007 dan telah diumumkan melalui Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor : 810 /2286 /422.024/ 2007 tanggal 17 Desember 2007. Terhadap nominatif honorer formasi tahun 2007 dimaksud telah dilaksanakan proses pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) mulai tanggal 28 Januari – 01 Pebruari 2008. Sekarang ini memasuki tahap penelitian dan verifikasi tahap II terhadap kelengkapan berkas administrasi di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Sedangkan hasil dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga honorer pada tahun 2007 dapat disajikan dalam lampiran 4 (terlampir).

Perkembangan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi CPNS sampai dengan Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Data Tenaga Honorer Sesuai Registrasi BKN dan Tenaga Honorer Yang
telah Diusulkan Pengangkatannya Menjadi CPNS sampai dengan Tahun
Anggaran 2005 dan 2006

	Jenis Tenaga	Jml	USUL PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS					
			Tahun Anggaran 2005			Tahun Anggaran 2006		
			Diusulkan	NIP BKN	Sisa	Diusulkan	NIP BKN	Sisa
1	Tenaga Guru	450	69	58	11	152	0	3
2	Tenaga Kesehatan	20	7	7	0	7	0	0
3	Tenaga Penyuluh	7	3	3	0	2	0	
4	Tenaga Teknis	676	151	145	6	228	0	4
5	Tenaga Administrasi	567			0	195	0	
	JUMLAH	1720	230	213	17	584	0	7

Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008

Keterangan :

1. 17 (tujuh belas) orang sisa pada tahun anggaran 2005 adalah nominatif honorer usia kritis yang sekarang sedang diproses usulan penetapan NIP-nya.
2. 7 (tujuh) orang sisa pada tahun anggaran 2006 adalah nominatif honorer yang mengundurkan diri, meninggal dunia, sudah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2005 dan sedang dalam proses usulan penggantinya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Jumlah nominatif honorer untuk formasi tahun 2007 sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) orang.

Dari 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) orang honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah selesai diproses penyelesaian pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun anggaran 2007 sejumlah 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) orang dengan rincian :

1. Tahun anggaran 2005 : 230 orang;
2. Tahun Anggaran 2006 : 591 orang;
3. Tahun Anggaran 2007 : 520 orang;

Sehingga sampai dengan tahun anggaran 2007 jumlah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang belum

diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang.

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2007 dari tenaga honorer ini juga terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan terakhir yang dimiliki tenaga honorer dengan penempatan atau unit tugas yang diberikan. Terdapat beberapa tenaga honorer, khususnya yang menduduki jabatan guru, baik guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN, SMK maupun guru SLB yang pendidikannya tidak memenuhi standar pendidikan yang seharusnya untuk dapat menduduki posisi tersebut. Beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain :

Tabel 15
Data Tenaga Honorer Kota Batu Tahun 2007 yang Tidak Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

No	Nama	Usia		Pendidikan	Jabatan	Keterangan		Unit Tugas
		Thn	Bln					
GURU TK								
1	SITI SAADAH	41	09	Paket C	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	LI'ANAH	41	07	Paket C	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	LUKMAN HAKIM	41	03	SMT Grafika	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	HARIATI	38	03	Paket C	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	MIATI	39	00	SLTA	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	IRMAWATI	40	03	MAN	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	ENI KUSRINI	36	04	SLTA	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	NUR HIDAYATI	28	09	Paket C	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	SITI FARIDA ULFA	27	03	Paket B	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	DEASY RETNO ANGGARINI	24	10	SMU	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	CHRISDIAWATI	24	07	SMK	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	RANTI DYAH CAHYANING	22	11	SMU	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	FAHRIDA NURIA	21	09	MAN	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	ELOK YUNIATI	21	07	MAN	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	RINA IVA YANTI	19	06	SLTP	Guru TK	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SD/MI								
16	KAPRAWI	37	10	SMA	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	NGATEMI	37	03	SMA	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	KHOIRUL BASORI	31	11	SMA	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	RISZA KRISTIYANA	26	04	SMU	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	ISTICHORO	23	02	MA	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	SULI WAHYUDI	22	03	SMK	Guru SD	Pendidikan	seharusnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

22	NENCI WIDAWANTI	22	00	Paket C	Guru SD	D-II PGSD Pendidikan seharusnya D-II PGSD	Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMP/MTs							
23	LATIFAH	39	11	D-II PGSD	Guru SMP	Pendidikan seharusnya D-III/ A-III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	MUJI TEGUH Mulyono	27	00	SMU	Guru SMP	Pendidikan seharusnya D-III/ A-III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMA/MAN							
25	ANWAR KHOSIIN	30	02	PGAN	Guru SMU	Pendidikan seharusnya S1/A-IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	AKHMAD FAUZI RAHMAN	25	06	SMU	Guru SMU	Pendidikan seharusnya S1/A-IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMK							
27	YUSAK SANTOSO	29	06	SMA	Guru SMK	Pendidikan seharusnya S1/A-IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	HERVY ARIA PUTRA	21	02	SMK	Guru SMK	Pendidikan seharusnya S1/A-IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SLB							
29	ICHWANTO	32	07	SMU	Guru SLB	Pendidikan Seharusnya minimal D-II PGSD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : *Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008*

Solusi yang diambil pemerintah Kota Batu dalam menyikapi permasalahan ini pada dasarnya adalah sama seperti pada permasalahan tahun 2006, yaitu mengacu pada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 810/422.024/2008 yang menyatakan bahwa bagi tenaga honorer yang pada saat diangkat dalam jabatan tertentu dalam hal ini fungsional guru tetapi belum memiliki prasarat ijazah sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, tetap bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru dengan catatan yang bersangkutan semenjak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menempuh pendidikan keguruan sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk jabatan guru tersebut maksimal untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b. Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh belum terwujudnya profesionalisme pegawai. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kompetensi dengan tugas jabatan yang akan diemban dimana selama ini rekrutmen belum berfokus pada pengisian jabatan yang mendasarkan pada kompetensi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan standar kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Dalam tes kompetensi dasar ini dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau

perilaku peserta. Tes ini meliputi tiga jenis, yaitu tes pengetahuan umum, tes bakat skolastik dan skala kematangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staf Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

” Penilaian kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya dapat ditelusuri melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan bakat. Keempat aspek ini dapat menggambarkan kompetensi yang dimiliki individu apakah nantinya sesuai atau tidak dalam menduduki suatu jabatan tertentu ”. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2008)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa standar kompetensi yang diterapkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu adalah meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing Calon Pegawai Negeri Sipil.

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

Aspek pengetahuan merupakan unsur terpenting yang harus ada dan diperlukan dalam penyusunan kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyusunan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menganalisis kebutuhan pada masing-masing unit kerja, setelah diketahui posisi yang lowong atau jabatan yang tersedia kemudian ditetapkan persyaratan jenjang pendidikan atau pengetahuan untuk masing-masing jabatan tersebut.

Persyaratan mengenai pengetahuan atau jenjang pendidikan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil ini sangat penting dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, penyusunan formasi yang dibutuhkan sudah mencantumkan persyaratan pendidikan untuk masing-masing jabatan yang baik yang berlaku bagi pelamar umum maupun tenaga honorer. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM bahwa :

” Formasi yang disusun dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu akan dicantumkan persyaratan minimal mengenai pendidikan yang dimiliki calon pegawai, hal ini dilakukan dalam kaitannya dengan memperoleh calon pegawai yang profesional maka setidaknya calon pegawai harus memiliki pengetahuan dasar untuk jabatan yang diinginkannya ” (wawancara tanggal 17 Juni 2008)

Untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 pada dasarnya sudah mencantumkan persyaratan minimal pendidikan bagi seseorang yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam proses penerimaan dan penempatannya juga sudah memperhatikan unsur pengetahuan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1 untuk Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2005 yang berasal dari pelamar umum, lampiran 2 untuk Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2005 yang berasal dari tenaga honorer. Namun pada pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil tahun 2006 yang hanya berasal dari tenaga honorer saja meskipun proses penerimaan hingga penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, namun dalam kenyataannya masih ada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi dan diterima tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ketidaksesuaian ini terjadi pada pengadaan tahun 2006 dan tahun 2007 dari tenaga honorer, dapat dilihat pada tabel 13 diatas tentang data tenaga honorer Kota Batu tahun 2006 yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dan tabel 15 tentang data tenaga honorer Kota Batu tahun 2007 yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan.

2) Ketrampilan (*Skill*)

Aspek ketrampilan merupakan salah satu unsur yang juga menunjang dalam penyusunan standar kompetensi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam kaitannya untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, maka unsur ketrampilan perlu diperhatikan sebagai nilai tambah seseorang. Seperti kita ketahui bahwa ketrampilan (*skill*) yang dimiliki oleh seseorang berbeda dengan yang dimiliki orang yang lain juga. Menurut Kepala Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM bahwa :

“ Keterampilan pada dasarnya dapat diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, kepandaian dan kecekatan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Ketrampilan yang dimiliki seseorang ini secara tidak langsung akan berpengaruh ketika nantinya dia dihadapkan pada suatu pekerjaan. Bagaimana dia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat dengan keahlian yang dimilikinya ”. (wawancara pada tanggal 17 Juni 2008)

Ketrampilan pada dasarnya dapat dipelajari yaitu dengan cara pelatihan dan harus dilakukan secara terus menerus. Dalam pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil Kota Batu baik tahun 2005, 2006 maupun tahun 2007, penilaian mengenai ketrampilan dilakukan melalui tes kompetensi dasar. Penilaian ketrampilan Calon Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dapat ditelusuri melalui :

- a) Kemampuan
Merupakan kesanggupan mental dan fisik untuk melakukan suatu tugas pekerjaan. Intelektual merupakan kecakapan menggunakan kecerdasan dan kepandaian dalam melaksanakan tugas.
- b) Reaktif
Merupakan kecenderungan sikap tanggap dan proaktif terhadap suatu masalah dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
- c) Responsif
Merupakan kepedulian dan kecepatan bereaksi untuk menanggapi dan secara konsisten memberi reaksi terhadap tugas pekerjaan.
- d) Stamina kerja
Kekuatan dan energi fisik serta ketahanan mental yang memungkinkan dapat bertahan dan menyelesaikan tugas pekerjaan.

3) Sikap (*Attitude*)

Dalam penyusunan standar kompetensi bagi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satu aspek lain yang juga dinilai adalah sikap. Dimana sikap ini dapat menggambarkan suatu peringai atau perilaku yang dimiliki individu, yang melekat sebagai bawaan dasar. Sikap dapat diartikan sebagai pandangan, nilai, perbuatan, kelakuan, unjuk kerja dalam melakukan suatu tugas pekerjaan. Sedangkan untuk penilaian sikap Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 dapat diketahui melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat menjalani tes-tes kompetensi. Untuk mengetahui sikap dapat ditelusuri melalui beberapa cara, yaitu :

- a) Keluwesan
Merupakan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai rekan atau kelompok kerja yang bekerja yang berbeda.
- b) Semangat untuk berprestasi
Merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap standar.

- c) Kemampuan bekerja sama
Merupakan dorongan atau kemampuan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas.
- d) Kemampuan melayani
Merupakan keinginan untuk membantu atau melayani masyarakat.
- e) Pengendalian diri
Kemampuan untuk menjadikan diri tahan menghadapi berbagai situasi dan kondisi untuk kepentingan orang.

4) Bakat (*Aptitude*)

Bakat merupakan unsur pendukung dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, karena bakat merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang sudah dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan. Bakat adalah pola pikir, perasaan atau perilaku alami yang dimiliki masing-masing individu. Seperti unsur pengetahuan, ketrampilan dan sikap, unsur bakat dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai peranan yang penting. Dengan adanya bakat yang dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan mempunyai nilai lebih dibanding yang lain. Akan tetapi bakat bukanlah segalanya, tanpa didukung dengan kreativitas, bakat tidak akan berarti. Sedangkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, bakat dilakukan dalam tes bakat skolastik. Materi tes bakat skolastik yang diujikan mencakup tiga kemampuan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif dan kemampuan penalaran. Kemampuan verbal terdiri dari 12 (dua belas) soal yang meliputi soal padanan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim, analogi dan pemahaman wacana. Kemampuan kuantitatif terdiri dari 10 (sepuluh) soal yang meliputi deretan angka, aritmatika dan geometrika. Sedangkan kemampuan penalaran terdiri dari 8 (delapan) soal yang meliputi penalaran logis dan penalaran yang berupa analisis.

Adapun Bakat dalam pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat ditelusuri melalui :

- a) Kecerdasan dan kecakapan
Merupakan kemampuan berpikir yang kreatif, meskipun menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

- b) Kreatif
Merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu ide yang baru, gagasan baru yang dapat diterapkan untuk pemecahan suatu masalah.
- c) Pengikatan diri terhadap tugas
Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang mendorong untuk tekun, ulet dan tekad untuk melaksanakan tugas pekerjaan meskipun menghadapi hambatan dan masalah.

2. **Hubungan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007**

Standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan usaha untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Pegawai yang profesional adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing, selain itu profesionalisme juga mengandung artian bahwa seseorang dapat dikatakan profesional jika memiliki kemampuan serta sikap mental yang terpuji. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku pegawai Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“ Selama ini penilaian terhadap konsep profesionalisme Pegawai Negeri Sipil masih sangat sulit diukur, karena sifatnya yang intangible. Belum ada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai metode atau parameter yang digunakan untuk mengukur profesional atau tidaknya seorang Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi terdapat beberapa indikator-indikator yang bersifat makro untuk mengukurnya ” (wawancara pada tanggal 24 Juni 2008)

Dari pernyataan yang telah diungkapkan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengukur profesionalisme seorang Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah. Pada dasarnya langkah awal untuk dapat mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional adalah dengan melakukan rekrutmen atau seleksi yang ketat, dimana hanya orang-orang yang memenuhi kompetensi jabatan yang dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penilaian pegawai yang profesional ini dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang bersifat makro, yaitu :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menganggur atau tidak produktif pada saat jam kerja;

2. Banyaknya sedikitnya pengaduan atau komplain atas layanan yang diberikan;
3. Sikap dan tindakan partisipasi masyarakat atas layanan yang diberikan; dan
4. Macet tidaknya layanan birokrasi yang terjadi pada pemerintahan.

Sedangkan menurut Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos, M.M sebagai Kepala Sub-bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, bahwa ukuran profesional Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Mempunyai keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal;
2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi;
3. Mempunyai keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya;
4. Mengejar kualitas sebagai suatu cita-cita dalam menjalankan profesinya; dan
5. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Beberapa indikator diatas secara tidak langsung dapat menggambarkan kinerja pegawai negeri sipil yang nantinya juga akan menunjukkan profesionalismenya.

Meskipun tidak terdapat ukuran mengenai profesionalisme khususnya Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan hasil penelitian di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu dan setelah melakukan wawancara baik dengan Kepala Sub Bagian Mutasi maupun dengan staf bagian mutasi, penulis dapat merumuskan beberapa kriteria yang paling essensial dari konsep penilaian terhadap peningkatan profesionalisme khususnya dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, yaitu dapat dilihat dari 4 (empat) hal :

a. Menguasai pengetahuan di bidangnya

Sikap profesionalisme sering diartikan sebagai ketika seorang Pegawai Negeri Sipil menguasai bidang tugas atau spesialisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan penguasaan terhadap bidangnya masing-masing maka potensi pengetahuan yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat terwujud sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Penguasaan pengetahuan diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan yang telah ditempuh, baik itu berupa pendidikan formal maupun

pendidikan non formal. Dengan menguasai pengetahuan terhadap bidang tugas yang akan disandang secara otomatis akan mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. Untuk dapat memperdalam penguasaan terhadap pengetahuan, Pegawai Negeri Sipil Kota Batu melakukan kegiatan-kegiatan seperti diklat teknis maupun mengikuti seminar nasional. Sedangkan untuk mengetahui seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Batu apakah sudah menguasai pengetahuan dibidangnya, maka dapat ditelusuri melalui :

1. Meningkatkan pengetahuan

Merupakan keinginan dari seorang Pegawai Negeri Sipil untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam lingkungan kerjanya.

2. Menguasai bidang tugas

Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang mendorongnya untuk selalu memiliki tekad dan ketekunan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

3. Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan

Merupakan keinginan dari seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu untuk tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 jika dilihat secara prosedural dalam proses penerimaannya maka sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima atau lolos seleksi hanya mereka yang memenuhi persyaratan-persyaratan dan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan lowong yang tersedia. Namun pada kenyataannya dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu untuk tahun 2006, yang murni berasal dari tenaga honorer saja, masih terdapat penyimpangan yang terjadi, yang mana tidak menekankan pada kompetensi yang dimiliki individu dalam proses penempatan kerjanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staf Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, yang mengatakan bahwa :

“ Pengadaan CPNS tahun 2006 itu sebenarnya merupakan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Nah, yang perlu diperhatikan disini adalah dalam pengangkatan tenaga honorer tidak dilakukan seleksi tentang kompetensi untuk menduduki posisi yang lowong. Pengangkatannya hanya memperhatikan masa kerja dan nama tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Karena itulah, maka

ada sebagian pegawai honorer yang tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan. Namun, dengan adanya fenomena seperti itu maka dikeluarkan peraturan yang mengatur mengenai persyaratan lain untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil “ (wawancara pada tanggal 24 Juni 2008)

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ternyata dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu khususnya pada tahun 2006 terdapat beberapa tenaga honorer yang bermasalah terkait dengan pengetahuan yang dimilikinya yang mana tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan yang tersedia. Secara tidak langsung hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerjanya nanti, sehingga juga akan mempengaruhi profesionalitas dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penguasaan terhadap bidang tugas masih kurang diperhatikan secara lebih jauh.

(lihat tabel 12 tentang data tenaga honorer tahun 2006 yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan).

b. Komitmen pada kualitas

Pegawai Negeri Sipil harus memegang teguh prinsip bahwa harus selalu meningkatkan kualitasnya dan pengetahuannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Rasa komitmen akan kualitas yang dimilikinya akan mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melakukan yang terbaik dan selalu berusaha untuk meningkatkan dirinya. Untuk menilai konsep komitmen pada kualitas seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Batu, dapat ditelusuri melalui beberapa hal :

1. Memiliki kecakapan

Pegawai Negeri Sipil Kota Batu selain mempunyai pengetahuan di bidangnya juga harus mempunyai rasa tanggap dan peduli terhadap lingkungan sekitar terutama dalam lingkungan kerjanya.

2. Kesanggupan dalam bekerja

Sebagai rasa keterikatan Pegawai Negeri Sipil terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

3. Selalu meningkatkan mutu kerja

Pegawai Negeri Sipil Kota Batu juga dituntut untuk dapat meningkatkan mutu kerja, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti diklat maupun seminar

tentang peningkatan kemampuan diri. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga dapat mengikuti jenjang pendidikan tambahan baik itu secara formal maupun non formal.

Wujud nyata dari komitmen terhadap kualitas diri Pegawai Negeri Sipil ini bisa dilihat dengan menggunakan indikator penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yaitu semacam rapor pekerjaan selama satu tahun Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja yang dipunyai oleh tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) ini dilaksanakan penilaiannya dan diberikan setiap tahun. Namun demikian terdapat kelemahan mendasar dari model penilaian DP-3 ini yaitu subyektifitas penilaian, karena struktur dalam penilaian DP-3 ini adalah staf yang dinilai sedangkan pejabat yang menilai adalah atasan langsung staf yang bersangkutan dan atasan dari pejabat penilai. Mengenai DP-3 ini diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/1980 Tentang Penilai Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom yang mengatakan bahwa :

“ Pada umumnya menilai kehadiran dan eksistensi DP3 sebagai fungsi ukuran kinerja pegawai tidak memiliki dampak atau efek (impact) terhadap aktivitas kinerja dan pengembangan karier pegawai maupun pada kinerja unit kerjanya. Artinya, DP3 tidak secara riil difungsikan dan diimplementasikan secara tepat, benar dan obyektif kepada PNS. Masih dilaksanakan sebagai suatu bentuk rutinitas kelengkapan prasyarat administrasi saja “ (wawancara pada tanggal 24 Juni 2008)

Berdasarkan hasil penelitian di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memberikan penilaian terhadap akuntabilitas tingkah laku Pegawai Negeri Sipil Kota Batu (secara spiritual) dapat dilihat dari unsur-unsur yang dinilai di Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) seseorang. Unsur-unsur yang dinilai ini dapat dijadikan indikator pengukuran kinerja seseorang selain kriteria tupoksi, yang antara lain dilihat pada tabel penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai sebagai berikut:

Tabel 16

Penilaian pelaksanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Unsur yang dinilai (indikator kinerja)	Nilai / angka	Sebutan / Kriteria
Kesetiaan, Prestasi Kerja, Ketaatan,	85-100	Sangat baik, sangat berhasil
Tanggung Jawab, Kejujuran,	70-85	Baik
Kerjasama, Prakarsa,	55-70	Sedang
Kepemimpinan	0-55	kurang

Sumber : *Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, 2008*

Setelah dilakukan penilaian pada masing-masing individu per tahun kemudian dibuat suatu kesimpulan hasil evaluasi penilaian yaitu dengan memberikan gambaran kepada penerima informasi (kepegawaian atau bersangkutan) mengenai nilai kinerja personal yang dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai implementasi aktivitas atau kegiatan tingkah laku seseorang secara obyektif, independen, dan akuntabel. Perlu diketahui bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan bermasalah dengan integritas atau profesionalitasnya ketika dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang dimilikinya terdapat nilai 76.

c. Dedikasi pada kepentingan masyarakat

Diartikan sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang Pegawai Negeri Sipil atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka membantu dan melayani masyarakat. Profesionalisme seorang Pegawai Negeri Sipil dapat juga dilihat dari sejauh mana mereka mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat atau orang lain. Sedangkan untuk dapat melihat sejauh mana seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Batu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, dapat ditelusuri melalui beberapa hal, yaitu :

1. Kebanggaan pada pekerjaan

Merupakan perasaan senang yang ada pada diri seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat menciptakan kepuasan apabila dapat melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang dijalannya. Dalam kaitan ini diharapkan agar para Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesi yang disandangnya.

2. Tanggung jawab pada pekerjaan

Merupakan kecenderungan sikap dari seorang Pegawai Negeri Sipil untuk berani bertanggungjawab atas pekerjaan dan tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

3. Mengutamakan pada kepentingan umum

Salah satu dimensi untuk menilai sikap profesional Pegawai Negeri Sipil adalah dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan pemberian pelayanan yang baik, tanggap dan cepat serta tepat waktu maka Pegawai Negeri Sipil lebih mengutamakan kepentingan umum.

Sedangkan wujud dari dedikasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu pada kepentingan masyarakat dapat dilihat dari banyak sedikitnya pengaduan atas layanan yang diberikan. Ketika banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan dapat menggambarkan kinerja pegawai sebagai *public service* kurang maksimal. Selama ini berdasarkan hasil penelitian, pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Batu secara garis besar sudah mencerminkan pelayanan yang baik. Dimana masyarakat yang berkepentingan dilayani dengan ramah, cepat serta tanggap mengenai permasalahan yang dihadapinya.

d. Keinginan untuk membantu masyarakat

Salah satu sikap yang mendukung seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan profesional adalah ketika memiliki keinginan yang kuat untuk dapat saling membantu sesama. Keinginan untuk membantu ini merupakan suatu sikap seseorang yang mencerminkan kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja untuk membantu masyarakat. Untuk dapat mengetahui keinginan Pegawai Negeri Sipil Kota Batu untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri melalui :

1. Kejujuran

Merupakan sikap yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dibebankan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya harus disertai dengan kejujuran dalam segala hal, kejujuran sangat penting dilakukan dalam semua pekerjaan karena tanpa adanya sikap jujur dalam bekerja tentu orang lain tidak akan percaya lagi.

2. Keikhlasan

Merupakan suatu kecenderungan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara tulus. Dibutuhkan rasa keikhlasan dalam bekerja agar suatu pekerjaan terasa lebih mudah untuk dijalani.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007

Pengadaan atau rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk memenuhi suatu jabatan tertentu sangat penting artinya agar dapat menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Meskipun sistem rekrutmen telah diatur dalam peraturan pemerintah sebagai upaya untuk menjaring sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang kompeten, namun dalam implementasinya belum memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan oleh perencanaan kepegawaian yang masih belum didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedangkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu sendiri juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya, baik faktor secara internal maupun secara eksternal.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku pegawai Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu bahwa :

“ Sebenarnya dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung ataupun penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat ini perlu diperhatikan dan disikapi dengan bijak agar dalam pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar “. (wawancara pada tanggal 2 Juli 2008)

Berdasarkan hasil wawancara dan setelah melakukan penelitian di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu :

a. Faktor Pendukung

Dalam analisis kasus yang terjadi di Kota Batu, faktor pendukung dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1) Tersedianya Sumber Daya Manusia

Sebagai kota yang relatif masih baru berdiri pada tahun 2001, Kota Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Malang secara otomatis

masih membutuhkan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, Kota Batu masih membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang cukup untuk nantinya akan ditempatkan untuk membantu kelancaran dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Sedangkan dari segi kualitas, Kota Batu juga membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, dimana mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya, mampu bersaing secara sehat dan dapat bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM yaitu bahwa :

“ Bahwa mengenai jumlah kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kota Batu memang masih sangat membutuhkan. Hal ini tidak terlepas dari Kota Batu yang masih baru terbentuk. Kebutuhan akan jumlah pegawai ini masih cukup besar khususnya adalah pada jenis tugas layanan dasar yang mana mencakup tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. “ (wawancara pada tanggal 2 Juli 2008)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas untuk Kota Batu sangat diperlukan sekali untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan. Dan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mulai pengadaan tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Kota Batu dapat melakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, dapat dilakukan dengan merekrut pegawai dari tenaga honorer yang sudah ada di lingkungan pemerintah Kota Batu. Sedangkan secara eksternal dapat merekrut pegawai dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pelamar umum.

2) Adanya Peraturan Hukum

Faktor lain yang mendukung dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu adalah adanya peraturan hukum yang berfungsi sebagai dasar legal formal dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kedua Peraturan Pemerintah ini mengatur baik mengenai prosedur pelaksanaan, persyaratan, hingga pengangkatan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, Bapak M. Syamsul Bakri, S.Sos., MM yaitu bahwa :

“ Dengan adanya PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara otomatis kegiatan perekrutan CPNS sudah bersifat legal. “(wawancara pada tanggal 2 Juli 2008)

Peraturan pada dasarnya diciptakan untuk mengatur mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan suatu urusan tertentu. Dengan dikeluarkannya suatu peraturan hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan terkait dalam peraturan sudah bersifat legal. Dengan adanya Peraturan Pemerintah diatas, maka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu usaha untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil Kota Batu yang baru memang harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan implementasi akan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Dengan berdasarkan pada kenyataan yang ada dan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 sampai 2007 sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Kota Batu juga mengalami beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Hambatan itu antara lain :

1) Terbatasnya Anggaran Kepegawaian

Penyelenggaraan suatu kegiatan tidak dapat terlepas dari faktor anggaran. Tanpa adanya anggaran yang memadai, suatu kegiatan dapat mejadi terhambat pelaksanaannya. Dalam melakukan perencanaan terhadap suatu kegiatan, diperlukan survey yang mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung maupun faktor penghambatnya untuk dapat menghindari kegagalan dari tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kota Batu juga tidak terlepas dari faktor anggaran. Faktor anggaran ini juga penting artinya guna membiayai pelaksanaan kegiatan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi perencanaan, pengumuman pengadaan, ujian baik secara tertulis maupun lisan, pengumuman penerimaan hingga pengangkatannya. Hal

ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staff Sub Bagian mutasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu bahwa :

“ Adanya keterbatasan anggaran kepegawaian yang tersedia mengakibatkan pengadaan CPNS tidak dapat berjalan secara maksimal. Selama ini kita sudah berusaha untuk menjalankan pengadaan CPNS dengan baik, namun karena terbatasnya dana tentu saja ada hal-hal lain yang tidak dapat segera dilaksanakan “ (wawancara pada tanggal 2 Juli 2008)

Dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa selama ini keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kota Batu. Hal ini terlihat pada waktu Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun anggaran 2007, yang seharusnya formasi yang ada sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang dengan rincian 520 (lima ratus dua puluh) dari tenaga honorer dan 30 (tiga puluh) orang dari pelamar umum. Namun dalam pelaksanaannya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran yang ada, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum belum dapat diselenggarakan pada tahun anggaran 2007, dan formasi ini akan dialihkan atau ditambahkan untuk tahun anggaran 2008. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sopa Ike Paci, S.Kom selaku staf sub Bagian Mutasi Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu yang mengatakan bahwa :

“ Memang pada tahun anggaran 2007, pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum belum dapat dilaksanakan karena ada beberapa kondisi yang kurang memungkinkan untuk dilaksanakannya rekrutmen dari pelamar umum, yang mana salah satu sebabnya adalah pada waktu itu bersamaan dengan pelaksanaan pilkada walikota Kota Batu. “ (wawancara pada tanggal 2 Juli 2008).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pembiayaan yang timbul dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan di tingkat daerah.

Pada tahun 2007 turunnya formasi sekitar bulan nopember 2007, adalah

sesuatu yang riskan bila tetap diadakan saat itu juga mengingat ada beberapa kondisi yang terjadi di Kota Batu, yaitu :

1. Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari jalur umum biasanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan (mulai dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman kelulusan).
2. Dalam mekanisme pemerintahan semua penggunaan anggaran berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD wajib dibuat laporan pertanggungjawabannya tiap tahun yaitu pada akhir tahun (biasanya bulan desember disusun), dikawatirkan kesulitan dalam menyusun SPJ mendekati tahun tutup buku, dan apabila ada kekurangan anggaran riskan untuk diadakan PAK;
3. Pada saat tersebut Pemerintah Kota Batu sedang dalam proses Pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga konsentrasi dan fokus kegiatan (baik anggaran maupun pemikiran) diarahkan pada kegiatan tersebut.

Dengan berdasar pada beberapa kondisi diatas, maka pemerintah Kota Batu kemudian memutuskan alternatif terbaik adalah pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2007 ditunda pelaksanaannya pada tahun 2008. Melihat fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mewujudkan suatu penyelenggaraan kegiatan (pengadaan) diperlukan anggaran yang cukup agar kegiatan tersebut tepat sesuai yang diharapkan.

2) Proses Rekrutmen yang Kurang Mendukung

Kelancaran pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik yang berasal dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer tidak dapat terlepas dari adanya proses rekrutmen yang baik dan mendukung. Akan tetapi proses rekrutmen yang kurang mendukung kelancaran dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat menjadi penghambat dalam usaha mewujudkan memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dan profesional. Proses rekrutmen dari pelamar umum ini dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil serta evaluasi pengaadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan proses rekrutmen dari tenaga honorer dimulai dari beberapa tahap, yaitu perencanaan dan persiapan, seleksi administrasi, pengangkatan tenaga honorer menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi.

Beberapa tahapan kegiatan diatas baik bagi pelamar umum maupun tenaga honorer dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan 2007 proses perekrutan atau penarikan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dilaksanakan berdasar pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam pelaksanaan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dilakukan oleh tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, baik itu tim pelaksana pengadaan tingkat pusat maupun tim pelaksana pengadaan tingkat instansi. Tim-tim ini memantau, melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik dari pelamar umum maupun pengangkatan tenaga honorer. Kemudian tim ini juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu asih kurang mendukung. Pertama, karena tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu belum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini terbukti pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 dan tahun 2007 yang berasal dari tenaga honorer yang mana masih terdapat beberapa tenaga honorer yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas jabatan yang disandangnya. Tugas tim pengadaan bagi tenaga honorer pertama kali adalah menentukan prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu berdasar ketentuan usia dan masa kerja. Kemudian tim ini melakukan seleksi administrasi bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar, dalam artian bahwa seharusnya tim pengadaan ini melakukan verifikasi atas nama-nama tenaga honorer apakah sudah memenuhi kriteria standar kompetensi untuk jabatan yang akan didudukinya atau belum. Dengan pengecekan dan pengawasan yang teliti, maka kesalahan akan pengangkatan tenaga honorer yang tidak sesuai standar kompetensi akan dapat diminimalisir.

Kedua, selain tim pengadaan adalah juga masalah waktu pendaftaran

yang terlalu singkat. Hal ini terjadi pada pengadaan tahun 2007, yang mana dari pelamar umum tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu yaitu pengumuman adanya pengadaan dari pelamar umum tahun 2007 diumumkan pada tanggal 17 Desember 2007 dan pada tanggal 28 Januari 2008-01 Februari 2008 telah dilaksanakan proses pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) terhadap nominatif honorer formasi 2007. Dengan pengumuman yang begitu singkat maka pengadaan dari pelamar umum pada tahun 2007 tidak dapat dilaksanakan.

C. Penyajian Data Analisis Fokus Penelitian

1. Penerapan Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu Tahun 2005-2007

Kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau biasa dikenal dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi pemekerjaan (*employee function*). Tujuan dari diadakannya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Batu adalah dalam rangka untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas atau jabatan yang akan diduduki. Pengadaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu dilaksanakan secara obyektif, dengan didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Permasalahan yang ada dewasa ini adalah belum terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas jabatan yang diembannya. Yang mana selama ini rekrutmen belum berfokus pada pengisian jabatan yang mendasarkan pada kompetensi dan keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan belum dihitung dengan menggunakan analisis beban kerja, sehingga ada sebagian pegawai yang tidak mempunyai beban kerja. Berdasar pada permasalahan tersebut, maka diperlukan perbaikan dalam manajemen kepegawaian khususnya dimulai dari aspek perencanaan atau penyusunan formasi pegawai yang perlu untuk segera dibenahi.

Kompetensi sendiri merupakan seperangkat pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dimana antara orang yang satu dengan orang yang lain belum tentu memiliki ukuran kompetensi yang sama. Sedangkan Kota Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kota Malang dan berdiri sendiri sebagai suatu Kota Otonom sejak tahun 2001 memerlukan pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di daerahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pada setiap tahunnya diadakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan melalui penerapan standar kompetensi guna merekrut pegawai yang berkompeten dan profesional.

Kompetensi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil karena kompetensi seseorang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menduduki suatu bidang pekerjaan. Dan bidang pekerjaan yang dituju oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil hendaknya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jika seseorang bekerja disuatu bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut maka dapat dipastikan orang tersebut dapat bekerja secara maksimal, sehingga kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Demikian juga sebaliknya jika seseorang yang bekerja di suatu bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaan tersebut sehingga orang tersebut kemungkinan tidak dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal.

a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada dasarnya diprioritaskan untuk mengisi jabatan yang lowong dan mendukung program utama pemerintah serta untuk mengisi jabatan yang lowong pada daerah pemekaran. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi masing-masing satuan organisasi negara ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma,

standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan analisis kebutuhan disusun berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia. Formasi pegawai harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang profil (keberadaan, kualifikasi, dan kuantitas) pegawai pada masing-masing instansi.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu dilakukan mulai tahun 2003 dengan jumlah formasi yang tersedia 150 (seratus lima puluh) orang. Sedangkan pada pengadaan tahun 2004, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004, ditentukan bahwa untuk tahun anggaran 2004 dilakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang hanya berasal dari pelamar umum. Formasi pengadaan tersebut diprioritaskan untuk mengisi jabatan :

1. Dosen dan Guru;
2. Tenaga Kesehatan; dan
3. Tenaga Strategis lainnya.

Untuk Kota Batu formasi pada pengadaan tahun 2004 adalah sejumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang.

Sedangkan mulai tahun anggaran 2005 sampai 2009, berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil disamping dari pelamar umum juga berasal dari tenaga honorer. Kebijakan ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi dan bahkan untuk menghapus tenaga honorer yang ada. Begitu juga dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu untuk tahun anggaran 2005 sampai tahun anggaran 2009 dilaksanakan dari pelamar umum dan tenaga honorer. Prioritas tenaga yang dibutuhkan adalah :

1. Tenaga Guru;
2. Tenaga Kesehatan;
3. Tenaga Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain; dan
4. Tenaga Teknis lain yang dibutuhkan pemerintah.

Adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005 sampai 2009 merupakan agenda prioritas pemerintah guna memperbaiki manajemen kepegawaian yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar dapat bertindak efisien dan efektif dalam kepegawaian. Berdasarkan kondisi di lapangan yang ada, kebijakan pemerintah dengan melaksanakan pengadaan

dari dua jalur yaitu jalur umum dan pengangkatan tenaga honorer dapat dinilai sangat strategis dan efektif untuk menghadapi masalah kepegawaian yang ada. Di satu sisi, dengan dibatasinya pengadaan dari jalur umum maka secara otomatis memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga honorer untuk dapat diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil juga akan mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada sehingga untuk kedepannya pegawai yang membantu dalam tugas-tugas pemerintahan adalah benar-benar pegawai negeri sipil yang sudah diangkat secara resmi oleh pemerintah.

1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya berdasarkan kebutuhan dan bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil, maka diperlukan suatu kegiatan pengadaan guna merekrut calon pegawai yang baru. Sedangkan formasi Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan), tenaga penyuluh, tenaga teknis serta jabatan tertentu lainnya.

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dari pelamar umum ini dilakukan dengan melalui serangkaian tes. Adapun tes yang diberikan yaitu berupa ujian tertulis (tes kompetensi dasar) dan tes substansi (tes kompetensi bidang). Dan untuk dapat mengetahui kemampuan dan kompetensi yang dimiliki calon pegawai dari pelamar umum, dilakukan proses seleksi sebagai berikut :

a. Ujian tertulis

Ujian tertulis ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kemampuan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil secara obyektif. Selain itu, ujian tertulis juga bertujuan untuk membuktikan sejauh mana pengetahuan dasar yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil dalam berinteraksi. Di dalam ujian tertulis berisi tes kompetensi dasar dan tes kepribadian (Psikotest).

b. Tes substansi

Tes substansi yang dimaksud adalah tes sesuai dengan bidang keahlian yang harus dipunyai untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu.

Dari beberapa informasi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada umumnya terdapat beberapa kriteria atau kualifikasi yang mendasari dalam proses seleksi ujian tertulis dan tes substansi adalah :

a. Pendidikan formal

Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti proses seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil sudah pasti terlebih dahulu diseleksi tentang pendidikan formal yang sudah diperolehnya. Pendidikan tersebut sangat penting untuk dicantumkan, karena apabila nantinya lolos seleksi maka akan tahu di bagian mana sebaiknya Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di tempatkan. Dengan demikian prinsip “ *The Right Man in The Right Place* “ dapat diterapkan.

b. Keahlian

Keahlian yang dimiliki oleh seseorang juga sangat mempengaruhi penilaian dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Keahlian sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) *Technical Skill*, merupakan jenis keahlian yang harus dipunyai oleh seseorang yang nantinya menjadi petugas pelaksana.
- 2) *Human Skill*, merupakan keahlian yang harus dipunyai oleh seseorang yang nantinya akan memimpin bawahan.
- 3) *Conceptual Skill*, keahlian yang harus dipunyai oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan puncak.

c. Pengalaman

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengalaman yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Pengalaman dibutuhkan untuk melihat sejauh mana seseorang memahami dan berpengalaman akan bidang tugasnya.

d. Jenis kelamin

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, perbedaan jenis kelamin tidak lagi menjadi permasalahan karena kedudukan antara laki-laki dan perempuan saat ini sudah dianggap sederajat. Perempuan juga dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan asalkan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan jabatan itu. Meskipun semua pekerjaan tidak lagi memprioritaskan jenis kelamin, namun ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.

e. Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Orang yang berusia lebih muda

memiliki vitalitas fisik yang cukup baik dan semangat kerja masih tinggi serta daya pikirnya lebih kreatif. Namun terdapat kelemahan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berusia lebih muda, karena tentunya masih belum berpengalaman. Sedangkan bagi orang yang berusia cukup atau lanjut memang sudah mempunyai pengalaman tetapi daya tahan tubuhnya sudah berkurang sehingga tidak dapat bekerja secara aktif.

Serangkaian tes yang dilakukan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari jalur pelamar umum ini tidak lain bertujuan untuk sedapat mungkin menyaring Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan yang berasal dari pelamar umum tentunya akan terdiri dari berbagai jenis latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin dan pengalaman yang berbeda-beda pula. Dan untuk dapat memperoleh Calon Pegawai negeri Sipil yang berkompentensi, maka diperlukan serangkaian tes yang terdiri dari beberapa tahap yang akan menyaring peserta ujian dimana hanya yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diterima. Tes kompetensi dasar (TKD) adalah tes awal yang dilakukan bagi pelamar umum yang telah memenuhi syarat administrasi, dan dilakukan melalui ujian tertulis. Tes ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku dari peserta ujian.

Selain tes kompetensi dasar, bagi pelamar umum yang lolos seleksi tes kompetensi dasar akan menjalani tes kompetensi bidang. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan ketrampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan yang dilamar yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan masing-masing instansi. Kedua tes ini sangat penting dan harus dilakukan dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kota Batu.

Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu khususnya untuk tahun 2005, ditetapkan alokasi perbandingan bagi tenaga honorer dan pelamar umum adalah 70%:30%. Proporsi bagi tenaga honorer memang lebih besar, hal ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama pada instansi pemerintah.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005, formasi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah 345 (tiga ratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari pelamar umum

sebanyak 102 (seratus dua) orang dan tenaga honorer sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang. Namun pada pelaksanaannya, dari pelamar umum yang diterima hanya 92 (Sembilan puluh dua) orang. Terdapatnya kekurangan 10 (sepuluh) orang ini tentu akan menyebabkan jabatan yang tersedia tetap lowong, oleh karena itu untuk mengisi posisi yang tetap lowong tersebut pemerintah Kota Batu dapat melakukan rangkap jabatan yang berlaku sementara sampai didapatkannya seorang Pegawai Negeri Sipil yang sesuai untuk posisi tersebut. Mengenai penerapan kompetensi, untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2005 Kota Batu jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan jabatan yang diduduki serta unit kerjanya, maka dapat dikatakan sudah tepat dan sesuai.

Sedangkan pengadaan dari jalur tenaga honorer, formasi yang disediakan adalah sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang. Namun dalam pelaksanaannya hanya 214 (dua ratus empat belas) orang yang diterima, dikarenakan beberapa tenaga honorer tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer terutama pada pasal 4 yang menyangkut masa kerja dan usia yang tidak memenuhi kualifikasi. Berdasarkan keterangan ini, pengadaan pegawai pada tahun 2005 dapat dikatakan belum optimal dan belum mencapai target yang diharapkan. Namun, pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2005 ini jika dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki individu, instansi asal dan instansi penempatan jabatan sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya maka sumber daya manusia sudah digunakan secara optimal.

2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2006

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006, sesuai dengan adanya surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor B/2110/M.PAN/8/2006 yang menyebutkan bahwa alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil untuk provinsi dan kota pada tahun 2006 sepenuhnya hanya untuk pengangkatan honorer yang memenuhi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, sehingga tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum. Hal ini dapat diartikan bahwa formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 dari pelamar umum dibanding dengan tenaga honorer

adalah 0%:100%. Sehingga dapat dikatakan formasi pelamar umum tahun 2006 di Kota Batu adalah 0 (nol). Karena tidak dilaksanakan pengadaan dari pelamar umum untuk tahun 2006 di Kota Batu maka tidak terdapat permasalahan mengenai kompetensi dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dari tenaga honorer, pengumuman mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bersifat sebagai uji publik atas nama tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). formasi yang disediakan untuk Kota Batu adalah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) orang, namun dalam pelaksanaan yang diterima hanya 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang. Kekurangan sejumlah 13 (tiga belas) orang ini disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya 8 (delapan) orang tidak melakukan pemberkasan, 4 (empat) orang tidak dilengkapi surat pernyataan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena tindakan indisipliner dan 1 (satu) orang meninggal dunia setelah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Dari 8 (delapan) orang yang tidak melakukan pemberkasan tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang tidak memenuhi syarat ketentuan masa kerja dalam peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer. Yaitu mengenai ketentuan yang ditetapkan pada pasal 4 yang menyangkut masa kerja dan usia yang tidak memenuhi kualifikasi. Oleh karena itu, pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 ini juga belum dapat optimal karena tidak dapat mencapai target jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan. Selain itu, karena pengadaan tahun 2006 hanya khusus berlaku bagi tenaga honorer saja maka kesempatan untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang lebih mempunyai kompetensi relatif kecil, karena seperti diketahui bahwa penempatan tenaga honorer pada mulanya tidak begitu memperhatikan kompetensi individu. Permasalahan ini terjadi juga pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2006, yang mana pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya dengan penempatan tugasnya. Dalam permasalahan ini terdapat 20 (dua puluh) orang, yang ijazah pendidikannya atau pengetahuannya tidak sesuai dengan penempatannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian daerah bahwa dalam peraturan tersebut dijelaskan pendidikan yang seharusnya dimiliki tenaga honorer untuk dapat menempati posisi-posisi yang tersedia. Dan memberikan kesempatan bagi beberapa tenaga

honorar yang penempatannya tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya, untuk melanjutkan pendidikan akta mengajar pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) atau yang sederajat agar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Beberapa penempatan tenaga honorar yang dianggap bermasalah tersebut berdasarkan hasil penelitian disebabkan oleh beberapa hal, pertama yaitu karena lamanya masa kerja tenaga honorar pada instansi asal yang akhirnya menimbulkan hubungan kedekatan antara honorar dengan pihak-pihak di instansi asal sehingga penempatan tenaga honorar lebih mengedepankan hubungan kedekatan daripada lebih memperhatikan kompetensi yang dimiliki tenaga honorar dengan instansi penempatan. Kedua, beberapa tenaga honorar mempunyai hubungan kedekatan dengan atasan baik dari hubungan saudara maupun pertemanan sehingga dalam pengangkatan tenaga honorar dapat lebih mudah memilih instansi penempatannya. Berdasar hal diatas, Meskipun telah diatur beberapa ketentuan mengenai permasalahan ketidaksesuaian penempatan dengan pendidikan yang sudah ditempuh, namun Pemerintah Kota Batu dalam pengangkatan tenaga honorar seharusnya benar-benar menerapkan prinsip kompetensi untuk masing-masing jabatan yang tersedia, karena hal ini nantinya akan sangat berpengaruh pada kualitas Pegawai Negeri Sipil yang dihasilkan untuk dapat bertindak secara profesional dalam melakukan pekerjaannya atau tidak. Selain itu juga diperlukan moral yang baik dari para aparatur negara sehingga praktik *spoil system* dapat dihapuskan secara perlahan.

3) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007

Dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun anggaran 2007, seperti yang diketahui bahwa formasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 550 (lima ratus lima puluh) orang dengan rincian untuk pelamar umum sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan untuk tenaga honorar sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang. Namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pengadaan atau pengangkatan dari tenaga honorar saja dan dari pelamar umum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan terbatasnya anggaran yang ada untuk dapat melaksanakan pengadaan dari jalur pelamar umum.

Seharusnya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 ini harus dilaksanakan dari dua jalur, umum dan honorer. Sedangkan Kota Batu hanya melaksanakan dari tenaga honorer saja sehingga pada pengadaan tahun 2007 tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kurangnya pegawai untuk instansi-instansi tertentu dari pelamar umum. Meskipun kekurangan pegawai ini akan dialihkan atau ditambahkan pada formasi tahun 2008, namun alangkah baiknya jika pengadaan pada tahun 2007 dapat dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Untuk menyikapi hal ini seharusnya pemerintah Kota Batu mempersiapkan secara lebih cermat dan matang dalam perencanaan sehingga nantinya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum dan tenaga honorer dapat dilaksanakan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Begitu juga mengenai keterbatasan anggaran yang ada, seharusnya Kota Batu yang dikenal sebagai kota pariwisata dapat mengoptimalkan sumber pariwisata yang ada sehingga dapat menarik wisatawan dan akhirnya dapat menambah pemasukan bagi daerah. Dengan tercukupinya anggaran kepegawaian maka pengadaan dari pelamar umum dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengenai penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2007, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa nama tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi atau yang dipersyaratkan untuk dapat menempati posisinya, hal ini banyak terjadi pada posisi guru, baik berasal dari guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN, SMK maupun guru SLB. Menyikapi hal ini, maka pemerintah Kota Batu mengacu pada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian daerah bahwa bagi tenaga honorer guru yang dengan saat ditetapkannya Nomor Induk Pegawai (NIP) belum mempunyai akta atau ijasah, maka tetap dapat diusulkan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas guru, dengan syarat wajib menempuh pendidikan akta mengajar sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun. Dengan kebijakan tersebut diharapkan semua tenaga honorer dapat memenuhi standar kompetensi untuk menduduki suatu jabatan sehingga dapat terwujud sikap profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu.

b. Standar Kompetensi dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dari tahun ke tahun selalu memperhatikan standar kompetensi, hal ini mutlak dan mendesak untuk direalisasikan, khususnya persyaratan kompetensi bagi setiap orang yang akan duduk dalam suatu jabatan dan juga sebagai bentuk untuk mewujudkan *the right man on the right place*. Dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya maka dapat tercipta efisiensi dan efektivitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada era globalisasi ini, birokrasi pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Batu perlu ditunjang oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dan mengenai standar kompetensi ini tidak bersifat statis tetapi dinamis dan harus selalu di mutakhirkan.

Sedangkan mengenai penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu ini, dapat ditelusuri dalam proses penerimaannya yaitu tes tulis dan tes interview. Dan mengenai komponen standar kompetensi yang dinilai adalah meliputi 4 (empat) aspek yang dinilai sangat penting, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan bakat.

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang atas ilmu-ilmu yang diperolehnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dalam penyusunan standar kompetensi bagi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, unsur pengetahuan memegang peranan yang penting karena hal pertama yang dilihat dalam proses rekrutmen adalah pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki pelamar ujian.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, unsur pengetahuan juga dimasukkan dalam standar kompetensi untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Unsur pengetahuan ini memiliki hubungan yang sangat tinggi terhadap kompetensi. Setiap peserta ujian yang akan mengikuti tes tulis maupun tes wawancara, terlebih dahulu akan diteliti mengenai kelengkapan persyaratan administratifnya tentang jenjang pendidikan atau pengetahuan yang dimilikinya. Setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, baru kemudian dapat mengikuti tes-tes selanjutnya. Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2005, baik dari pelamar umum maupun tenaga

honorar penerapan standar kompetensi mengenai unsur pengetahuan sejauh ini berdasarkan data yang ada sudah diterapkan. Hal ini terlihat dari pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006, yang hanya berasal dari tenaga honorar, mengenai penerapan standar kompetensi dalam pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilihat dari unsur pengetahuan yang dimiliki individu sejauh ini berdasarkan hasil penelitian adalah masih ada beberapa tenaga honorar yang pengangkatannya tidak mendasarkan pada kompetensi yang dimiliki individu, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Batu juga harus memperhatikan penerapan unsur pengetahuan selain faktor usia dan masa kerja dalam melakukan pengangkatan tenaga honorar, karena pengetahuan inilah yang menjadi dasar bagi individu untuk dapat sebaik mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan menerapkan unsur pengetahuan dalam pengangkatan dan penempatan tenaga honorar maka diharapkan tidak ada lagi tenaga honorar yang penempatannya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, dengan penempatan yang lebih mendasarkan pada jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh tenaga honorar secara otomatis akan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut sehingga sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan secara optimal yang pada akhirnya nanti dapat mewujudkan sikap profesionalisme pegawai.

Dan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2007, yang mana pengadaan dari tenaga honorar juga terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki tenaga honorar dengan penempatan tugas jabatannya. Berdasarkan data yang ada ketidaksesuaian ini terjadi pada jenis jabatan guru baik dari guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN, SMK maupun guru SLB dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Batu harus lebih cermat dalam melakukan pengangkatan tenaga honorar, terlebih lagi bagi tim pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil seharusnya benar-benar melakukan pengecekan dan verifikasi agar didapat Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorar yang benar-benar memiliki kompetensi, jadi tidak hanya melihat tenaga honorar berdasarkan yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), usia dan masa kerja namun juga

harus memperhatikan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan diimplementasikannya penerapan kompetensi dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menempati suatu jabatan, maka kesempatan untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional akan mendekati kenyataan.

2) Ketrampilan (*Skill*)

Ketrampilan dapat diartikan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang diperoleh oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dari pendidikan maupun pelatihan yang berupa kemampuan, kecakapan, kepandaian dan kecekatan dalam mengatasi permasalahan ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Di dalam menyusun standar kompetensi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, unsur ketrampilan juga harus diikutsertakan, karena hal ini nantinya dapat menilai sejauh mana seorang Pegawai Negeri Sipil mampu bersikap trampil dalam menjalankan tugasnya. Unsur ketrampilan ini mempunyai hubungan yang tinggi dengan kompetensi, karena ketrampilan memang sangat dibutuhkan dalam menyusun kompetensi jabatan agar seseorang yang akan menduduki jabatan tersebut selain memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang juga mempunyai ketrampilan dalam bekerja.

Sedangkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, unsur ketrampilan berdasarkan hasil wawancara dalam pengadaan juga sudah dilaksanakan, yang mana setiap peserta akan diberikan tes tulis dan tes wawancara yang secara tidak langsung dapat menilai ketrampilan seseorang dalam artian ketrampilan untuk menghadapi suatu masalah kerja. Walaupun unsur ketampilan kadang dianggap sepele, namun sebenarnya seseorang dalam bekerja tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja tetapi juga harus mempunyai ketrampilan (*skill*) yang baik agar dia mempunyai nilai tambah sehingga mampu berkreaitivitas serta menciptakan ide-ide baru yang inovatif untuk mendorong semangat dalam bekerja.

Jadi dengan diterapkannya unsur ketrampilan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, akan diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang mampu bersikap trampil dalam mencari solusi problem kerja, sehingga dengan sendirinya akan tercipta sikap profesional Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kota Batu melakukan penilaian terhadap aspek ketrampilan dalam setiap pengadaan dengan melihat beberapa

hal, yang meliputi pertama kemampuan, yaitu kondisi fisik dan mental seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja serta bagaimana Calon Pegawai Negeri Sipil dapat bersikap cakap dengan menggunakan kecerdasan dan kepandaian yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas. Kedua, reaktif, yaitu sikap tanggap seorang Calon pegawai Negeri Sipil dalam mengindikasikan munculnya masalah kerja. Ketiga, responsif, yaitu rasa kepedulian dan menanggapi dengan baik masalah yang muncul dalam pekerjaan. Beberapa kondisi diatas baik meliputi kemampuan, reaktif maupun sikap responsif sangat diperlukan guna melihat sejauh mana Calon Pegawai Negeri Sipil memiliki segi ketrampilan khususnya ketrampilan dalam bekerja.

3) Sikap (*Attitude*)

Penyusunan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya harus benar-benar mendasarkan pada persyaratan kebutuhan minimal dalam menempati posisi kerja yang tersedia, baik dilihat dari segi jenjang pendidikan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil maupun faktor-faktor penunjang lainnya dan salah satu faktor lain tersebut adalah unsur sikap. Tentunya dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan selalu diharapkan pegawai yang mempunyai sikap yang baik dan berperilaku baik. Pegawai Negeri Sipil yang juga berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dituntut untuk dapat bersikap baik, sopan, dan ramah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Unsur sikap ini mempunyai tingkat hubungan sedang terhadap kompetensi.

Dalam setiap pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil, khususnya yang terjadi di Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 penilaian unsur sikap dapat dilihat dari yang pertama adalah sikap yang ditunjukkan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti proses seleksi. Yang kedua adalah melalui tes skala kematangan, dimana dalam tes ini terdapat lima unsur untuk menilai sikap Calon Pegawai Negeri Sipil dan unsur-unsur tersebut adalah pertama, kemampuan beradaptasi dapat dinilai dari bagaimana upaya seseorang untuk berupaya memahami perubahan dan memahami pendapat orang lain. Kedua, pengendalian diri yang meliputi pengendalian emosi dan bersikap tenang dalam menghadapi setiap masalah kerja yang muncul, ketiga adalah semangat berprestasi yang meliputi fokus pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Keempat, integritas

yang meliputi kejujuran dalam bekerja dan konsistensi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dan unsur yang terakhir adalah inisiatif, dinilai dari melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa menunggu perintah dari atasan serta mengantisipasi terhadap masalah yang mungkin akan terjadi.

Dengan diikutsertakannya unsur sikap dalam penyusunan standar kompetensi, akan semakin menyaring para pelamar kerja sehingga nantinya didapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan di bidangnya, memiliki ketrampilan serta dapat berlaku baik sebagai pelayan publik. Seharusnya pemerintah Kota Batu dalam merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil juga ada tes tambahan seperti tes intelegensi yang meliputi IQ, EQ dan SQ. dengan tes tersebut, khususnya pada EQ akan dapat diketahui bagaimana sikap yang melekat yang dimiliki individu selain itu dengan tes-tes tersebut diharapkan akan dihasilkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas yang benar-benar mempunyai kompetensi dan akhlak serta sifat yang baik sehingga dengan pegawai yang berakhlak maka tidak akan ada lagi praktik spoil system dan korupsi.

4) Bakat (*Aptitude*)

Unsur lain yang diperlukan dalam menyusun suatu standar kompetensi dalam pengadaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 adalah unsur bakat. Unsur bakat ini mempunyai tingkat hubungan sedang terhadap kompetensi. Bakat adalah sesuatu yang dimiliki seseorang semenjak dia lahir yang juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu bakat yang dimiliki oleh setiap orang antara yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Sedangkan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu khususnya pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, guna menelusuri unsur bakat seseorang dilakukan melalui tes yang dinamakan tes bakat skolastik. Tes ini sebenarnya dipergunakan untuk menggali indikasi keseluruhan kapasitas mental, yang meliputi intelegensi dan bakat. Intelegensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan-kemampuan yang spesifik ini memberikan individu pada suatu kondisi yang

memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan atau ketrampilan tertentu setelah melalui suatu latihan, hal inilah yang disebut dengan bakat atau *aptitude*.

Metode yang digunakan untuk menyingkap kemampuan khusus ini disebut dengan tes bakat atau *aptitude test*. Dan dalam Pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, yang digunakan untuk menelusuri bakat adalah *Scholastic Aptitude Test* yang terdiri dari 30 (tiga puluh) soal dan dikerjakan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit. Materi tes bakat skolastik yang diujikan mencakup tiga kemampuan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif dan kemampuan penalaran. Seharusnya dengan adanya penelusuran terhadap bakat yang dimiliki seseorang Calon pegawai Negeri Sipil ini, kemudian bakat tersebut dapat dilatih dan dikembangkan untuk menciptakan kreativitas serta ide-ide baru guna mendukung dalam pelaksanaan pekerjaannya sebagai abdi masyarakat.

2. **Hubungan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007**

Penyusunan standar kompetensi dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Tanpa adanya standar kompetensi untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan yang lowong maka pengadaan sebagai cara untuk merekrut pegawai baru akan dilakukan dengan asal-asalan dan kurang memperhatikan kriteria kebutuhan untuk dapat menempati posisi tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang menempati posisi tersebut nantinya tidak dapat bertindak secara profesional.

Pada dasarnya alasan utama mengenai penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu adalah selama ini belum terwujud profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu untuk mewujudkan sikap profesionalisme maka dimulai dari tahap pengadaan yang mencantumkan syarat-syarat atas posisi yang disediakan serta diberlakukan standar kompetensi dalam proses penyaringan peserta ujian. Diharapkan dengan diterapkannya standar kompetensi akan diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing serta mempunyai pribadi yang baik sehingga dapat terwujud Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Kota Batu, berdasarkan hasil penelitian bahwa sebenarnya sulit untuk menentukan ukuran mengenai profesional atau tidaknya seseorang pegawai Negeri Sipil. Walaupun sudah terdapat beberapa indikator yang menggambarkan sikap profesional pegawai, namun sikap profesional tidak hanya dapat dinilai dari itu saja, seorang Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kota Batu dapat juga dikatakan profesional ketika pekerjaan yang ditanganinya hanya bidang tertentu saja (spesialisasi). Pegawai Negeri Sipil hanya memegang satu jabatan saja dan tidak rangkap yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan ditekuninya. Namun apabila dia merangkap jabatan, seharusnya jenis jabatan itu membutuhkan keahlian yang tidak terlalu beda jauh. Misalnya, seorang ahli dalam bidang akuntansi keuangan maka dia ditempatkan pada bidang pembukuan keuangan dan dia tidak merangkap jabatan menjadi operator komputer karena memang bukan bidang pekerjaannya dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Jika dipaksakan untuk merangkap dua pekerjaan tersebut maka tidak akan diperoleh hasil yang maksimal.

Penilaian profesional juga dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang diembannya bersifat tetap dan terus-menerus. Artinya, tetap berarti ketika seseorang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka seterusnya orang tersebut tetap pada profesi itu. Terus-menerus artinya berlangsung sampai jangka waktu yang lama bahkan sampai pensiun. Hal ini berarti bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil selama menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan meninggalkan tugas yang sudah menjadi kewajibannya secara tidak sah selama 2 (dua) bulan terus menerus tanpa pemberitahuan dari pekerjaannya dalam jangka waktu yang lama, dimana alasannya tidak dalam sebab-sebab diperbolehkannya cuti atau cuti diluar tanggungan negara, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dikatakan tidak profesional jika hal tersebut masih berlangsung pada bulan ke 3 (tiga) dia meninggalkan tugas maka dihentikan pembayaran gajinya. Dan jika hal tersebut berlangsung hingga jangka waktu 6 (enam) bulan maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, penilaian profesional juga dapat dilihat dari seseorang Pegawai Negeri Sipil terkelompok dalam suatu organisasi. Hal ini mengandung artian bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus tergabung di dalam keanggotaan kelompok profesinya yaitu KORPRI, hal tersebut bertujuan untuk selain

mengetahui kemampuan berorganisasi juga mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan individu untuk bekerjasama dan bersosialisasi dengan orang lain yang seprofesi.

Meskipun ukuran mengenai profesionalisme Pegawai Negeri Sipil tidak ditentukan, namun berdasarkan hasil penelitian di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu, maka dapat dirumuskan beberapa kriteria yang paling essensial dari konsep penilaian terhadap profesionalisme khususnya dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu tahun 2005, 2006 dan 2007, yaitu dapat dilihat dari 4 (empat) hal :

a.

Menguas

ai pengetahuan di bidangnya

Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, salah satu elemen yang terkait dan merupakan ciri profesionalisme adalah penguasaan pengetahuan di bidangnya. Pegawai Negeri Sipil harus selalu berusaha dan memperdalam pengetahuan yang dimilikinya agar dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Menguasai bidang tugas yang akan dijalani ini sangatlah penting dan hal ini menjadi kriteria utama dalam penyusunan standar kompetensi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pengumuman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 dalam formasi yang dibutuhkan sudah dicantumkan kriteria pendidikan yang harus dimiliki oleh Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengisi posisi yang lowong tersebut. Seorang Pegawai Negeri Sipil seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan lingkungan harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya, khususnya mengenai pengetahuan di bidang tugas yang dia jalani, dan peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat guna pengembangan dirinya. Dengan memiliki penguasaan di bidangnya maka seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa menunggu diperintah dari atasan. Semisal, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pendidikan dan keahlian di bidang teknik sipil seharusnya penempatannya adalah pada perekayasa. Apabila dia ditempatkan di bagian hukum yang jelas-jelas bukan bidangnya maka dapat dipastikan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 yang berasal dari pelamar umum dan tenaga honorer, Pegawai Negeri Sipil yang diterima sudah sesuai antara pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki dengan persyaratan jabatan yang tersedia serta penempatannya juga sudah sesuai. Dengan penempatan yang sesuai maka Pegawai Negeri Sipil dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan ke dalam praktek kerja. Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 yang hanya berasal dari tenaga honorer saja, berdasarkan hasil penelitian dengan melihat data-data yang ada masih terdapat beberapa pengangkatan tenaga honorer yang tidak mendasarkan pada kompetensi pendidikan untuk menempati jabatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan pada waktu itu hanya berdasarkan pada masa kerja, usia dan nama-nama tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun pada akhirnya sudah dikeluarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang ketentuan pendidikan untuk menempati posisi-posisi yang disediakan yang mana bagi tenaga honorer yang pendidikannya tidak sesuai tersebut masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya agar dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan dengan jangka waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, namun kesalahan penempatan tenaga honorer yang tidak sesuai tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila Pemerintah Kota Batu benar-benar memperhatikan akan pentingnya penguasaan pengetahuan di bidang tugas kerja.

b. Komitmen pada kualitas

Penilaian sikap profesional juga dapat dilihat dari sejauh mana seorang Pegawai Negeri Sipil mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas baik pengetahuan maupun sikap yang dimilikinya. Memiliki rasa komitmen juga diperlukan bagi semua orang sebagai bentuk motivasi untuk dapat selalu meningkatkan kapasitas dirinya sehingga mampu bersaing dengan orang lain secara sehat. Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 juga selalu berusaha untuk dapat mempertahankan komitmennya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Komitmen pada kualitas untuk dapat selalu bekerja dengan baik dapat dilihat dari kecakapan

seorang Pegawai Negeri Sipil, sejauh mana dia memiliki kesanggupan dalam bekerja serta selalu meningkatkan mutu kerjanya.

Seperti diketahui bahwa sulit untuk mencari ukuran yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia memiliki karakter profesionalisme dalam kinerja, karena profesionalisme ini memiliki ukuran yang bias secara kuantitatif, sehingga sangat subyektif dan tidak dapat ditentukan secara obyektif. Maka dari itu diperlukan sebuah standar baku yang benar-benar bisa digunakan secara obyektif dan akuntabel untuk mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikatakan profesional. Sedangkan wujud rasa komitmen terhadap kualitas Pegawai Negeri Sipil Kota Batu ini dapat dilihat dari penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yaitu semacam rapor pekerjaan selama satu tahun Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja yang dipunyai oleh tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil. Namun, Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sampai saat ini masih belum efektif dan masih dinilai sebagai suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat dikompromikan antara atasan dan bawahan. Jadi bukan tercipta mitra kerja namun yang ada adalah rival ataupun lawan kerja.

Berdasar pada kondisi tersebut, seharusnya Pemerintah Kota Batu benar-benar menerapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan penilaiannya harus dilakukan secara obyektif dengan benar-benar melihat kemampuan dan bagaimana Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan pekerjaannya yang meliputi tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kecepatan maupun kesetiaan. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) seharusnya difungsikan dan diimplementasikan secara nyata dan obyektif agar dapat memberikan impact khususnya dalam pengembangan karier pegawai. Dengan penilaian yang obyektif maka Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya dengan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga pegawai akan lebih termotivasi untuk dapat bekerja dengan lebih baik karena ada sistem penilaian yang berupa imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dalam kaitannya untuk pengembangan karier. Jadi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) seharusnya tidak hanya sebagai formalitas atau kelengkapan syarat administrasi saja.

c. Dedikasi pada kepentingan masyarakat

Peran Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur pendukung berjalannya suatu instansi pemerintah yang harus dikelola dengan strategi yang tepat dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam instansi yang bersangkutan. Kondisi ini merupakan suatu keharusan. Pengelolaan pegawai yang tepat atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga menjadi keharusan bagi instansi pemerintah khususnya instansi penyedia pelayanan publik. Pemberian pelayanan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dibidang jasa pelayanan yang disediakan. Bahkan citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya dikarenakan masih kurang profesionalnya petugas pada organisasi pelayanan serta semakin buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan ini menyadarkan bahwa diperlukan pemberian perhatian yang khusus pada para pegawai, khususnya yang bertugas langsung dalam penyediaan pelayanan publik.

Seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat dikatakan profesional dalam melaksanakan tugasnya ketika dia mampu untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dedikasi pada kepentingan masyarakat ini terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dedikasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu pada kepentingan masyarakat dapat dilihat dari rasa bangga dan rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil pada pekerjaannya serta lebih mengutamakan kepentingan umum.

Sebenarnya ada beberapa kritikan terkait dengan lemahnya pelayanan publik yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat, antara lain *pertama* adalah kurang responsif, artinya respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. *Kedua* Kurang informatif, artinya berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat secara lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. *Ketiga* Kurang accessible, artinya berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. *Keempat*

Kurang koordinasi, artinya berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Dan *kelima* inefisien, artinya Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Berkaca dari kondisi tentang pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut, seharusnya Pemerintah Kota Batu melakukan penataan institusi baik dari segi struktur maupun segi kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan merestrukturisasi atau menata Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Batu harus mengabdikan dirinya dengan segenap hati untuk melayani kepentingan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang akan diberikan oleh instansi pemerintah.

d. Keinginan untuk membantu masyarakat

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu bentuk penilaian sikap profesional Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat juga dilihat dari sejauh mana mempunyai keinginan untuk membantu masyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia saling membutuhkan dan saling membantu antara satu dengan lainnya, begitu juga Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan profesional ketika dia mempunyai rasa keinginan untuk membantu masyarakat dengan mengutamakan kejujuran dan keikhlasan.

Keinginan untuk membantu masyarakat ini pada dasarnya masih berupa rencana atau target dan masih belum direalisasikan. Namun dengan memiliki rasa untuk menolong sesama sudah dapat menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan, Pegawai Negeri Sipil Kota Batu memiliki keinginan untuk selalu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2005-2007

a. Faktor Pendukung

1) Tersedianya Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan birokrasi pemerintah daerah perlu ditunjang oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini sebagai wujud implementasi dari adanya penyelenggaraan otonomi daerah dimana memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Kota Batu sebagai bagian integral dari sistem Negara Indonesia, juga memerlukan aparatur pemerintah yang secara formal ikut memutar roda pemerintahan. Sejak perubahan status Kota Batu dari kota administratif menjadi Kota Otonom pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, maka secara tidak langsung tugas dan tanggung jawab aparatur yang ada juga meningkat, sehingga membutuhkan Pegawai Negeri Sipil baru yang berkualitas guna melaksanakan urusan dan kewenangan yang meningkat.

Kota Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Malang juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik sehingga akan mampu berdaya saing. Untuk itu maka diperlukan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil baru yang berkualitas, bertanggung jawab dan profesional. Sebagai kota yang baru berdiri pada tahun 2001, menjadikan Kota Batu sebagai kota yang membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menempati posisi-posisi krusial dalam membangun Kota Batu. Dalam hal ini pemerintah Kota Batu dapat merekrut Pegawai Negeri Sipil dari dua jalur, secara internal dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer yang sudah bekerja di lingkungan pemerintah Kota Batu menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara eksternal dengan melakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum yang diikuti dengan serangkaian tes agar didapat Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan profesional.

2) Adanya Peraturan Hukum

Peraturan sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Suatu peraturan juga dapat dijadikan pedoman agar dalam bermasyarakat tidak terjadi kekacauan dan dapat tercipta masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Sedangkan dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil sendiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait yang mengatur tentang pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kedua peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang sifatnya adalah legal formal.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini yang berlaku sebagai payung hukum dalam semua pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, termasuk dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu secara otomatis akan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan suatu pengadaan dalam rangka untuk mencari Pegawai yang berkualitas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur baik mengenai tata cara maupun prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan proses pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Faktor Penghambat

1) Terbatasnya Anggaran Kepegawaian

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu juga tidak terlepas dari persoalan anggaran, sebagaimana berdasarkan data yang ada pada tahun anggaran 2007 pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat berjalan maksimal. Seharusnya formasi yang disediakan untuk Kota Batu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :B/226.F/M.PAN/9/2007 pada tanggal 06 September 2007 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2007 adalah 550 (lima ratus lima puluh) orang yang terdiri dari 520 (lima ratus dua puluh) orang berasal dari tenaga honorer dan 30 (tiga puluh) orang berasal dari pelamar umum. Namun karena keterbatasan waktu dan terbatasnya anggaran yang ada, pengadaan hanya berasal dari tenaga honorer saja dengan asumsi bahwa jatah 30 (tiga puluh) untuk pelamar umum akan diakumulasikan dan

ditambahkan pada tahun anggaran 2008.

Adanya persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah dan dihindari, yaitu dengan melakukan suatu perencanaan yang matang mengenai tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pemerintah daerah Kota Batu seharusnya dapat mengantisipasi hal ini, Kota Batu sebagaimana dikenal sebagai kota pariwisata di Jawa Timur tentunya mempunyai potensi keindahan alam yang besar. Sejalan dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas pada daerah dengan disertai tanggung jawab, maka Pemerintah Kota Batu dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk memajukan daerahnya, yaitu dengan melakukan pengelolaan yang benar dan tepat akan potensi sumber daya alam pariwisata yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan devisa dan pemasukan baik berupa pajak maupun retribusi yang nantinya dari berbagai pendapatan daerah tersebut dapat dimanfaatkan guna membiayai kegiatan-kegiatan penting yang terjadi di Kota Batu, termasuk juga untuk membiayai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu.

2) Proses Rekrutmen yang Kurang Mendukung

Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan dapat mendukung kelancaran dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Inti dari semua kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya adalah pada proses perencanaan. Yang mana dalam perencanaan harus dibuat langkah-langkah yang jelas dan terstruktur agar kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu sendiri, baik yang berasal dari pelamar umum maupun tenaga honorer dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi hasil kegiatan. Dan untuk dapat melaksanakan langkah-langkah atau tahap-tahap tersebut maka dibuat suatu tim pelaksana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi. Tim-tim ini akan mengawasi jalannya pengadaan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum dan kemudian melakukan koreksi apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu, berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kota

Batu kurang mendukung terutama dari segi tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer dan keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan. Seharusnya pemerintah Kota Batu lebih memaksimalkan fungsi tim pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil baik tim bagi pelamar umum maupun tim bagi tenaga honorer dan dilakukan evaluasi kinerja tim pengadaan guna peningkatan kinerja yang leboh mendukung penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan pengadaan yang singkat, maka seharusnya lebih dibuat suatu perencanaan yang matang dan teliti supaya kegiatan pengadaan dapat berjalan dengan lancar.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai “Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Standar Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)”, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu masih belum diterapkan secara maksimal karena masih terdapat praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau dalam bahasa kepegawaian dikenal dengan praktek *spoil system*. Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer memang sudah memperhatikan dan menerapkan standar kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu. Namun, dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 dan tahun 2007 yang berasal dari tenaga honorer, penerapan standar kompetensi jabatan khususnya untuk jabatan guru belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terbukti dari masih adanya beberapa tenaga honorer yang menempati jabatan guru ternyata tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk menempati posisi guru. Dimana pada tahun 2006, terdapat sebanyak 20 (dua puluh) orang tenaga honorer yang tidak mempunyai ijasah atau akta untuk dapat menjadi tenaga pengajar atau guru. Sedangkan pada tahun 2007, terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang tenaga honorer yang juga tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk dapat diangkat menjadi guru.
2. Hubungan standar kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut memiliki hubungan yang positif yang artinya apabila kompetensi mengalami kenaikan, maka profesionalisme juga mengalami kenaikan dan demikian sebaliknya apabila kompetensi mengalami penurunan, maka profesionalisme juga mengalami penurunan. Pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 yang mana dari pelamar umum dan tenaga honorer sudah memenuhi persyaratan kompetensi untuk

menempati suatu jabatan tertentu sehingga akan berdampak pada peningkatan profesionalisme kerja. Dan pengadaan pada tahun 2005 ini dapat dikatakan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan profesionalisme kerja. Sedangkan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 dan tahun 2007 dari tenaga honorer masih ada beberapa yang belum memenuhi kompetensi untuk menempati jabatannya, sehingga profesionalisme tidak dapat terwujud secara maksimal. Jadi untuk pengadaan tahun 2006 dan tahun 2007, khususnya bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kompetensi maka dapat dikatakan mempunyai hubungan yang negatif terhadap peningkatan profesionalisme. Mengenai hubungan standar kompetensi dengan profesionalisme ini dapat dilihat dari empat hal, yaitu menguasai pengetahuan di bidangnya, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan masyarakat dan keinginan untuk membantu masyarakat.

3. Proses pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu ini didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan adanya peraturan hukum yang berlaku yang digunakan sebagai dasar hukum legal formal dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu dari pelamar umum diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan dari tenaga honorer diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu adalah karena terbatasnya anggaran kepegawaian yang tersedia dan proses rekrutmen yang kurang mendukung.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat diketahui gambaran penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diberikan saran sebagai upaya untuk mengeliminir hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan standar kompetensi dalam pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005-2007 guna peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Adapun saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Perlu diterapkan standar kompetensi dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu guna menjaring Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan profesional. Sehingga dalam pengadaan tidak lagi mengenal istilah *like and dislike*, akan tetapi benar-benar mengacu pada kemampuan individu sesuai kompetensi yang dimiliki untuk menduduki suatu jabatan tertentu dan penerapan standar kompetensi ini tidak bersifat statis tetapi harus selalu dinamis dan selalu dimutakhirkan seiring dengan perkembangan lingkungan.
2. Lebih dimaksimalkannya fungsi tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pemantau independen yang berasal dari kalangan civitas akademis sehingga kontrol yang dilakukan akan lebih maksimal dan kesalahan atau penyimpangan praktek-praktek seperti *spoil system* akan dapat dieliminir.
3. Diperlukan perencanaan yang matang dalam proses penyelenggaraan kegiatan pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil baik terkait dengan anggaran maupun waktu pelaksanaan pengadaan, sehingga kegiatan pengadaan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target yang sudah direncanakan.
4. Untuk meningkatkan kualitas aparatur Kota Batu agar menjadi profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil maka diperlukan suatu kebijakan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang dimulai dari proses pengadaan atau rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi dan mutasi, pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu. Diperlukan juga penyusunan deskripsi tugas (*job description*) yang jelas, yang berisi tujuan pekerjaan yang jelas dan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam pekerjaan. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kota Batu dapat diberlakukan mekanisme *reward and punishment* yang artinya memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan penegakan pemberian sanksi disiplin bagi yang melanggar kedisiplinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi. 2000. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Baron, Robert A and Greenberg, Jerald. 1990. *Behavior in Organization : understanding and Managing the Human Side of Work*, third edition
- Baso, H.Moerat. *Pembinaan SDM Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Majalah Usahawan, Nomor 6 Tahun 2003
- Boyatzis, Richard E. 1982. *The Competent Manager : A Model for Effective Performance*. Jon Wiley and Sons
- Dharma, Surya 2002. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Majalah Usahawan, Nomor 01 Tahun XXXI, Januari
- Djarmika, Sastra. 1987. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Effendi, Lutfi. 2006. *Bahan Bacaan Kuliah Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan*. Malang
- Genevieve, Bassellier, et. Al. 1999. *Information Technology Implementation Issues : An Analysis*. Virginia Polytechnic Institute and State University
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Handoko, T. Hani. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maester, David. 1998, *True Professionalism*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- MenPAN. 2002. *Pedoman Pengembangan Budaya Kerja*, Jakarta.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khoirul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Banyumedia
- Nasir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Jakarta : Widya Praja Nomor 19 Tahun III

- Poerwopoespito, FX. Oerip dan Tatag Utomo. 2000. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*. Jakarta : PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia
- Prayitno, Widodo dan Suprpto, 2002. *Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menuju Era Globalisasi Global*. Jakarta : Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05, Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN
- Randall S. Schuler dan Susan E Jackson. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia menghadapi abad ke 21*, Edisi ke-enam, Jilid I. Jakarta : Erlangga
- Ruki, H. Achmad S. 2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas Pendekatan Mikro Praktis Untuk Memperoleh dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dalam Organisasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Simamora, Henry. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : YKPN
- Siswanto, Joko. 2003. *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Makalah disampaikan dalam Lokakarya, Pengukuran Kompetensi Individu*. Jakarta : Departemen Kehutanan
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Malang : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Madani
- Spencer, M. Lyle and Spencer. M. Signe. 1993. *Competence at Work, Models for Superior Performance*. New York, USA : John Wiley & Son, Inc
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka
- Woodruffe, C. 1993. *What is Meant by a Competency ? Leadership and Organization Development Journal*, vol 1.14, No. 1
- Yoder, Dale dan Heneman, Herbert b. 1959. *Economics and Industrial Relations, First edition*. Ohio : South-Western Publishing Company
- Zainun, B. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung

Website :

<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=762>, diakses pada tanggal 21 Februari 2008

<http://www.pu.go.id/itjen/buletin/3031otoda.htm>, diakses pada tanggal 21 Februari 2008

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/12/19/o1.htm>, diakses pada tanggal
23 Februari 2008

Peraturan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
tahun 2005

Keputusan Kepala BKN No. 43 /kep/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Struktural PNS

Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Kepegawaian Daerah



PEMERINTAH KOTA BATU
SEKRETARIAT DAERAH

KONSEP

Jalan Panglima Sudirman No. 98, Telp. (0341) 591026/Fax (0341) 594444
BATU 65313

Batu, Mei 2008

Nomor	: 810/ /422.024/2008	Kepada
Sifat	: Segera/Penting	Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kebudayaan Kota Batu
Perihal	: Surat Pernyataan Honorer CPNS D Tahun Anggaran 2007	di
		B A T U

Menindaklanjuti proses pemberkasan usul penetapan NIP bagi nominatif honorer formasi tahun 2007 yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari – 01 Februari 2008 bertempat di Gedung Graha Wangsa Kelurahan Sisir, Jl. Semeru Nomor 1 Batu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 025/D/1995 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa salah satu syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat untuk pertama kali dalam jabatan guru dari Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah *apabila memiliki* ijazah serendah-rendahnya : a) Diploma II Keguruan dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi Guru TK, SD, SDLB; b) Diploma III Keguruan atau Diploma III yang setingkat dan memiliki Akta III dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, baik untuk Guru Mata Pelajaran maupun Guru Pembimbing pada Tingkat SLTP; dan c) Sarjana Pendidikan atau Sarjana yang mempunyai Akta IV dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, baik untuk Guru Mata Pelajaran, Guru Praktik, maupun Guru Pembimbing pada SLTA sederajat.
2. Sehubungan dengan penjelasan angka 1 di atas, sesuai dengan hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara bahwa bagi tenaga honorer yang masuk nominatif CPNS tahun 2007 bidang tugas guru yang sampai dengan saat akan diangkatnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai ijazah akta sesuai dengan yang dipersyaratkan maka tenaga honorer yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS dengan tugas Guru dengan syarat dilengkapi dengan *Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan akan diwajibkan menempuh pendidikan akta mengajar pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) atau yang sederajat untuk jangka minimal 1 tahun dan paling lama 2 tahun;*
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan usulan penetapan NIP pada saat pemberkasan, maka tenaga honorer di lingkungan kerja Saudara perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pejabat Eselon II terkait dengan point 1 di atas (*daftar nama dan format surat pernyataan terlampir*).

Mengingat mendesaknya waktu agar syarat kelengkapan dimaksud dapat segera diserahkan kepada Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu, untuk seterusnya akan disampaikan kepada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara guna melengkapi usulan penetapan NIP bagi CPNSD Kota Batu Tahun 2007.

Demikian untuk menjadikan perkara.

a.n. WALIKOTA BATU
Pit. Sekretaris Daerah

SUNDJOJO
Pembina Utama Muda
NIP. 070020932

Tembusan :
Yth. Walikota Batu (sebagai laporan)

Lampiran 1 :

Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 yang diterima dari jalur umum yaitu pelamar umum adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan	Gol./Ruang	Jabatan	Unit Kerja
1.	Diah Risyati	S - 1 Biologi	III / a	Penyuluh KB	Badan KB & Kessos
2.	Andri Wijaya	S - 1 Sospol	III / a	Pranata humas	Badan Kesbang dan Linmas
3.	Sukma Kris Indarti Pramatha Ria	D - III Akuntansi	II / c	Auditor	Badan Pengawasan
4.	Galuh Djajeng Wulandari	S - 1 Sospol	III / a	Penelaah data bahan evaluasi dan laporan pemeriksa	Badan Pengawasan
5.	Nuning Hindriani	S - 1 Hukum	III / a	Auditor	Badan Pengawasan
6.	Budi Purnomo	S - 1 Teknik	III / a	Perekayasa	Badan Perencanaan Daerah
7.	Erlina Primastuti	S - 1 Statistik	III / a	Pengumpul data statistik	Badan Perencanaan Daerah
8.	Retno Dwi Astuti	S - 1 Akuntansi	III / a	Penyusun anggaran/ verifikasi	Bagian Ekonomi & Pembangunan
9.	Rina Rahayu	S - 1 Hukum	III / a	Perancang perundang-undangan	Bagian Hukum
10.	Saiful Ludoni	S - 1 Ekon. Manajemen	III / a	Pengumpul data organisasi	Bagian Hukum
11.	Wahyuning Dewi Utami, S.E	S - 1 Manajemen	III / a	Penyiap bahan evaluasi dan ketatalaksanaan	Bagian Kepegawaian
12.	Ainun Rosidah	SMA	II / a	Pengumpul dan pengelola data laporan	Bagian Pemerintahan
13.	Dewi Irma Kumala Sari Tukan	SMA	II / a	Pengelola data kebutuhan perlengkapan	Bagian Perlengkapan
14.	Sri Ariani	SMA	II / a	Pengadministrasi perlengkapan	Bagian Perlengkapan
15.	Anton Dwi Cahyo	SMA	II / a	Penginventaris barang dan ATK	Bagian Perlengkapan
16.	Lutfina Nila Pratiwi	SMA	II / a	Pengadministrasi naskah dinas	Bagian Umum
17.	Devi Anggia	SMA	II / a	Pengadministrasi perjalanan dinas	Bagian Umum
18.	Indrawati	SMA	II / a	Pramu acara	Bagian Umum
19.	Welly Chandra Kusuma, A.Md	D - III Sekretaris	II / c	Sekretaris pimpinan	Bagian Umum
20.	Rojikin	SMK	II / a	Teknisi elektronika	Dinas Infokom & Perpustakaan
21.	Zulfa Nurhayati	SMA	II / a	Pustakawan	Dinas Infokom & Perpustakaan
22.	Yudha Ari Nurhamid	SMA	II / a	Kameraman dan fotografer	Dinas Infokom & Perpustakaan
23.	Novita Dewy Asmawati	SMA	II / a	Arsiparis	Dinas Infokom & Perpustakaan
24.	Andhik Tri Andowo	S - 1 Seni	III / a	Pranata humas	Dinas Infokom & Perpustakaan
25.	Farid Subianto	SMK	II / a	Teknisi elektronika	Dinas Kebersihan & Pertamanan
26.	Dedy Tri Wahyono	SMA	II / a	Teknisi mesin	Dinas Kebersihan & Pertamanan
27.	Agus Tri Wahyudi, A.Md	D - III Taman	II / c	Penata taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
28.	Dewi Elis Mariani	S - 1 T. Elektro	III / a	Teknisi elektronika	Dinas Kebersihan & Pertamanan

29.	Yunita Nurmayanti	S - 1 Teknik Arsitektur	III / a	Pengelola taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
30.	Teti Indah Yuliasuti	S - 1 T. Lingkungan	III / a	Pengendali dampak lingkungan	Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup
31.	Niken Pratiwi	S - 1 Kehutanan	III / a	Pengendali ekosistem hutan	Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup
32.	Yohana Herawati, A.Md	D - III Komputer	II / c	Pranata komputer	Dinas Kependudukan Capil Naker
33.	Yustina Eko Rasanti	D - III Kebidanan	II / c	Bidan	Dinas Kesehatan
34.	Laura Wulandari	D - III Keperawatan	II / c	Perawat	Dinas Kesehatan
35.	Dr. Muhayati Kusuma W.	S - 1 Kedokteran Umum	III / b	Dokter umum	Dinas Kesehatan
36.	Taufik Fiantoko	D - III Bahasa Inggris	II / c	Pemandu wisata	Dinas Pariwisata
37.	Winarto, S.Sn	S - 1 Seni	III / a	Petugas pembina pelayanan kesenian	Dinas Pariwisata
38.	Noerad Adikarsa Poernomo	S - 1 Arkeologi	III / a	Pengadministrasi museum dan purbakala	Dinas Pariwisata
39.	Nurul Fidyawati	SMA	II / a	Petugas pemungut pajak dan retribusi	Dinas Pendapatan
40.	Wahyu Sandriana W	D - III Akuntansi	II / c	Penata laporan keuangan	Dinas Pendapatan
41.	Dinar Putri Rahayu	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Siti Asiyah Al Siti Aisah	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43.	Nur Habibi Kholis	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44.	Fenty Merdekawati, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45.	Yasinta Dyah Siswiyanti	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46.	Andhika Affandy	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47.	Qoriatul Azizah	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48.	Imelda Dian Wuriyaningtyas, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49.	Susianto, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50.	Mardhiyah, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51.	Ely Endahwati, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru kelas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52.	Fitriyah Wulan Cahyani, A.Ma.Pd	D - II PGSD	II / b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53.	Umi Sholikhah	S - 1 Pendidikan BK	III / a	Guru BP/ BK SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54.	Achmad Saifudin	S - 1 Pend. Matematika	III / a	Guru matematika SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55.	Rafika Ismawati	S - 1 Pend. Ekonomi	III / a	Guru akuntansi SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56.	Yulia Fithri Hartanti	S - 1 Pend. Kimia	III / a	Guru kimia sma	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57.	Dewi Insya Siska	S - 1 Pend. Biologi	III / a	Guru biologi sma	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58.	Hermawanto	S - 1 Pend. Fisika	III / a	Guru fisika sma	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59.	Ririn Hayatiningsih	S - 1 Pend. Ekonomi	III / a	Guru ekonomi akuntansi sma	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60.	Abidin	S - 1	III / a	Guru elektronika SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61.	Susi Dian Fitriana	S - 1 Pend. Ekonomi	III / a	Guru matematika SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

62.	Chonie Dewiyanti	S - 1 Pend. PPKN	III / a	Guru PPKN SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
63.	Rakhmad Supriadi	S - 1 Pendidikan	III / a	Guru seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64.	Nur Wahyuni	S - 1 Pend. Agama Islam	III / a	Guru agama islam SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65.	Andi Purwo Adianto	S - 1 Pend. PPKN	III / a	Guru ppkn SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66.	Budi Santoso S.Pd.	S - 1 Pend. Sejarah	III / a	Guru Sejarah nasional dan umum sma	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67.	Nurul Ismayanti	S - 1 Pertanian	III / a	Guru Pertanian SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68.	Khusnul Kotimah Marianingsih	SMA	II / a	Pengelola perijinan dan rekomendasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan
69.	Rochana Lutfiah	S - 1 T. Industri	III / a	Perekayasa	Dinas Perindustrian & Perdagangan
70.	Herwindra Danardana	S - 1 Adm. Niaga	III / a	Petugas pembina industri	Dinas Perindustrian & Perdagangan
71.	Prio Hariadi	SMA	II / a	Teknisi jalan dan jembatan	Dinas Permukiman & Bina Marga
72.	Andi Setyawan, A.Md	D - III Sipil	II / c	Teknisi bangunan dan perumahan	Dinas Permukiman & Bina Marga
73.	Cholilu Rohman, A.Md	D - III Mesin	II / c	Teknisi mesin	Dinas Permukiman & Bina Marga
74.	Helmi Riza	S - 1 T. Sipil	III / a	Perekayasa	Dinas Permukiman & Bina Marga
75.	Helmy Fauzan K	S - 1 Mesin	III / a	Analisis teknik mesin	Dinas Permukiman & Bina Marga
76.	Mukhlas Sugiharto	S - 1 Teknik Sipil	III / a	Perencana bangunan	Dinas Permukiman & Bina Marga
77.	Wahyu Retno Nugraeni	S - 1 Pertanian	III / a	Pengawas benih tanaman	Dinas Pertanian
78.	Marta Anita Sari, S.P	S - 1 Pertanian	III / a	Penyuluh pertanian	Dinas Pertanian
79.	Ami Rahayu, S.P	S - 1 Perikanan	III / a	Pengawas benih ikan	Dinas Pertanian
80.	Muhlis Fuadi	SMA	II / a	Teknisi pengairan	Dinas Sumber Daya Air & Energi
81.	Eko Andik Hermawan	SMA	II / a	Surveyor pemetaan	Dinas Sumber Daya Air & Energi
82.	Yuanita Dwi Lestari, A.Md	D - III Pengairan	II / c	Teknisi pengairan	Dinas Sumber Daya Air & Energi
83.	Hari Waluyo	S - 1 Pengairan	III / a	Konselor pengairan	Dinas Sumber Daya Air & Energi
84.	Bambang Hariyono	S - 1 Akuntansi	III / a	Pembimbing usaha koperasi	Kantor Koperasi & UKM
85.	Moch Arif Cahyono	SMA	II / a	Penata laporan keuangan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
86.	Yanto	SMA	II / a	Petugas pemungut pajak dan retibusi	Kantor Perhubungan
87.	Sugiono	SMA	II / a	Petugas pencari dan penolong	Kantor Satpol PP
88.	Fitria Damayanti	SMA	II / a	Penyusun bahan Ev. dan rencana program	Kecamatan Batu
89.	Diyan Rahmawati	SMA	II / a	Pengagenda	Kecamatan Bumiaji
90.	Buyung Kurniawan	SMA	II / a	Penyusun bahan Ev. dan rencana program	Kecamatan Junrejo
91.	Slamet Supriadi	SMA	II / a	Operator telekomunikasi	Sekretariat DPRD
92.	Septian Eko Wahyu	SMA	II / a	Operator telekomunikasi	Sekretariat DPRD

Lampiran 2 :

Data Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2005 dari tenaga honorer adalah sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan	Gol.	Jabatan	Asal	Penempatan
1.	Djajadi	SD Tahun 1981	I/a	Pramu Pengairan	Honorer PU Malang	Dinas Sumber Daya Air & Energi
2.	Gatot Purianto	SD Tahun 1985	I/a	Penjaga Gudang	Honorer Infokom	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
3.	Kusnadi	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Honorer PU Malang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4.	M. Sugiono	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Honorer Kec.Batu	Kecamatan Batu
5.	Mahfut	SD Tahun 1986	I/a	Petugas Kebersihan	Honorer Kab Malang	Dinas Kebersihan & Pertamanan
6.	Sukarto	SD	I/a	Penjaga Kantor Dan Sekolah	Honorer Dinas Pasar	Kantor Perhubungan
7.	Supono	SD Tahun 1994	I/a	Penjaga Kantor	Honorer Kantor Perhubungan	Kantor Perhubungan
8.	Hendri Suyanto	Paket B Tahun 2004	I/c	Pengemudi	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9.	Liswanto	SMP Tahun 1988	I/c	Penjaga Kantor	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	M. Chotib S	SMP Tahun 2004	I/c	Pengemudi	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
11.	Mochamad Yasin	Paket B	I/c	Petugas Kebersihan	Honorer Kab Malang	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
12.	Nafian	SMP Tahun 1991	I/c	Pramu Kantor	Honorer Badan Pengawasan	Badan Pengawasan
13.	Nuriadi	Paket B Tahun 2004	I/c	Pengemudi	Honorer Kab Malang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	Ropi I	SMP	I/c	Pramu Kantor	Honorer Dllaj Kab Mlg	Kantor Perhubungan
15.	Subagyo	Paket B Tahun 1998	I/c	Pramu Pengairan	Honorer Dinas Pu	Dinas Sumber Daya Air dan Energi
16.	Suprayitno	Paket B Tahun 2005	I/c	Penjaga Kantor dan Sekolah	Ptt Sd Ngaglik 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Sutrisno	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Honorer Pu Malang	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
18.	Abd. Aziz Maulani	SMA IPA Tahun 1999	II/a	Petugas Pencari Dan Penolong	Honorer Dinas Kependudukan, Capil & Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
19.	Adhi Novi Listyono	SMA IPS Tahun 1997	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Honorer Sek. Dprd	Sekretariat DPRD
20.	Adwanmaji	SMA	II/a	Operator Telekomunikasi	Honorer Dinas Infokom	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
21.	Agus Oktaufik	SMA	II/a	Pranata Komputer	Honorer Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan
22.	Agus Saksono	SMU IPS Tahun 1998	II/a	Penelaah Data dan Pencegah Pemadam	Honorer Dinas Keb & Pert	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
23.	Agus Sutikno	SPK Tahun 1999	II/a	Pembantu Perawat	Honorer Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
24.	Ahmad Fathoni	M.A Tahun 1996	II/a	Penyusun Bahan Rencana dan Evaluasi	Honorer Dinas Kependudukan, Capil & Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
25.	Ahmad Junaidi	SMA IPS Tahun 1998	II/a	Petugas Pencari Dan Penolong	Honorer Satpol Pp	Kantor Satpol PP
26.	Ajirin	MAN IPS Tahun 1991	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Honorer Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
27.	Anang Hariadi	SMA	II/a	Sekretaris Pimpinan	Honorer Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kota Batu
28.	Andik Setiawan	SMA	II/a	Penelaah Data Dan Pencegah Pemadam	Honorer Satpol Pp	Kantor SATPOL PP

29.	Anis Kurnia Ulfah	SPG SD Tahun 1990	II/a	Guru Kelas SD	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.	Asrobi	SMA Tahun 1997	II/a	Pustakawan	Honoror Kab Malang	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
31.	Bambang Wachyudi	SMA	II/a	Petugas Pencari Dan Penolong	Honoror Satpol Pp	Kantor SATPOL PP
32.	Baweh	SMEA	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Honoror Dinas Kim & Bm	Dinas Permukiman Dan Bina Marga
33.	Brian Susartanto	SMK Tahun 1998	II/a	Teknisi Jalan Dan Jembatan	Honoror Kimpraswil	Dinas Permukiman dan Bina Marga
34.	Darmawan	STM	II/a	Teknisi Elektronika	Honoror Dkp	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
35.	Deny Ratnawati	SMU Tahun 1998	II/a	Pengagenda	Honoror Dinas Infokom	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
36.	Dewi Rochmulyati	SPAG	II/a	Pembantu Gizi	Honoror Dinkes	Dinas Kesehatan
37.	Dina Hartanti	SMU IPS Tahun 1999	II/a	Pramu Acara Pimpinan	Honoror Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
38.	Diyanto	SMA IPA Tahun 1991	II/a	Penelaah Data dan Pencegah Pemadam	Honoror Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
39.	Dony Sanjaya	SMU IPS Tahun 1978	II/a	Penyusun Bahan Rencana dan Program Kerja	Honoror Kantor Koperasi Dan Ukm	Kantor Koperasi dan UKM
40.	Edy Moedji Pranoto	SMA	II/a	Operator Telekomunikasi	Honoror Satpol Pp	Kantor SATPOL PP
41.	Eka Meri Herawati	SLTA Tahun 1996	II/a	Pengadmintrasi Naskah Dinas	Honoror Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
42.	Hadi Fackih Saroni	SMA IPA Tahun 1997	II/a	Pranata Komputer	Honoror Dispenda	Dinas Pendapatan
43.	Hanafi	SMU IPS Tahun 1997	II/a	Penginventaris Barang	Honoror Dinas Kependudukan, Capil & Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
44.	Herman Siswantoro	STM	II/a	Satpol PP	Honoror Satpol Pp	Kantor SATPOL PP
45.	I Gusti Ayu Dewi Utami	SMA	II/a	Arsiparis	Honoror Kantor Kasda	Kantor Kas Daerah
46.	Isna Alfu Laila	SMA IPS Tahun 1994	II/a	Pengagenda	Honoror Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Batu
47.	Jaenal Wahyudi	SMEA Manajemen Tahun 1995	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Honoror Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
48.	Joko Suwarno	SMA Tahun 2005	II/a	Pengumpul dan Pengolah Data	Honoror Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
49.	Jumadi	SMA IPS Tahun 1998	II/a	Pemeliharaan Perlengkapan Dinas	Honoror Set. Dprd	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
50.	Khotijah Yuliaty	SMA	II/a	Penyusun Bahan Rencana Dan Program Kerja	Honoror Sekretaris Dewan	Sekretariat DPRD
51.	Kusnan	Paket C	II/a	Penelaah Data Dan Pencegah Pemadam	Honoror Kab Malang	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
52.	Lisa Bakar	SMA	II/a	Pranata Komputer	Honoror Kantor Pmp	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
53.	Lisdianto Rachman	STM Tahun 1995	II/a	Teknisi Mesin	Honoror Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
54.	Lukik Mulyorini	SMA	II/a	Pengumpul dan Pengolah Data Lap.	Honoror Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
55.	M. Mufti Zarkasi	SMA IPS Tahun 1996	II/a	Penata Laporan Keuangan	Honoror Set DPRD	Sekretariat DPRD
56.	M. Yusuf	Paket C	II/a	Satpol PP	Honoror Kotif Batu	Kantor SATPOL PP
57.	Miftachul Huda Prastoto	SMA	II/a	Juru Kamera	Honoror Dinas Infokom	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
58.	Moch. Amin Rachmansyah	SMA	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Honoror Dinkes Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
59.	Mochamad Rifai	SMA	II/a	Petugas Pemungut Pajak dan Restribusi	Honoror Kab Malang	Kantor Perhubungan
60.	Mohamad Zainuri	SPG	II/a	Guru Kelas SD	Guru Madrasah (Swasta)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

61.	Mokhammad Romdhoni	SMA	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perleng	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
62.	Mokhammad Sunaryo	SMA IPA Tahun 1998	II/a	Pranata Komputer	Honorer Dkp	Dinas Permukiman dan Bina Marga
63.	Mokhammad Iswanto	MAN Tahun 1995	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64.	Mulyadi	SMA Fisika Tahun 1994	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Honorer Dinas Permukiman & Bm	Dinas Permukiman dan Bina Marga
65.	Muntholiah	SMA	II/a	Penyusun Bahan Dan Rencana Evaluasi	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
66.	Murni	P2B Bidan	II/a	Bidan	Honorer Dinkes	Dinas Kesehatan
67.	N. Rudianto	SMEA	II/a	Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan & Pertamanan
68.	Nanang Dwi Wahyudi	SMA	II/a	Pramu Acara Pimpinan	Honorer Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kota Batu
69.	Ninik Sriwahyuni	SMEA	II/a	Kameraman Dan Fotografer	Honorer Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
70.	Niswatul Rokhma	SMA	II/a	Penyusun Bahan Rencana Dan Program Kerja	Honorer Dinas Capil Dan Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja
71.	Nur Isnaini	SMA	II/a	Surveyor Pemetaan	Honorer Kantor Perhubungan	Kantor Perhubungan
72.	Nurhayati	SMA Tahun 1989	II/a	Arsiparis	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73.	Nurhayati	SMA IPA Tahun 1998	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Honorer Dinas Kependudukan Capil Dan Tenaga Kerja	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
74.	Nurma Yuniawati	SMEA Tahun 1996	II/a	Pengadministrasian Perjalanan Dinas	Honorer	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
75.	Nurul Laila Suida	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data	Honorer Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
76.	Peni Budi Rahaju	SMA	II/a	Penginventaris Barang	Honorer Disperindag	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
77.	Poniran	Paket C Tahun 2004	II/a	Pramu Pengairan	Honorer Dinas Pengairan Kab. Malang	Dinas Sumber Daya Air dan Energi
78.	Pontjo Indro Prastowo	SMA Biologi Tahun 1990	II/a	Pengelola Perijinan dan Rekomendasi	Honorer Sda E	Dinas Pendapatan
79.	Purnomo	SMA Tahun 1988	II/a	Petugas Pencari Dan Penolong	Honorer Dinas Sdae	Kantor Satpol PP
80.	Rina Dwtasari	SMA	II/a	Penyusun Bahan Rencana Dan Evaluasi	Honorer Dinas Capil Dan Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja
81.	Ririn Supriyastining Tyas	SMK Tahun 1998	II/a	Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi	Honorer Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
82.	Rusman	SMA	II/a	Pengelola Perijinan Dan Rekomendasi	Harian Musiman Dinas Pu Malang	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi
83.	Saiful Mujab	SMA Biologi Tahun 1989	II/a	Petugas Pemungut Pajak Dan Retribusi	Honorer Dispenda	Dinas Pendapatan
84.	Sakrianto	Paket C Tahun 2003	II/a	Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi	Honorer Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
85.	Siswanto	SMK Tahun 2001	II/a	Teknisi Mesin	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
86.	Siti Aminah	SPG	II/a	Guru Kelas SD	Guru Sd Ma'arif	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
87.	Siti Rohmah	SMK Tahun 1998	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Honorer Indag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
88.	Sri Harini	SMA	II/a	Penata Laporan Keuangan	Honorer Dinas Kim & Bm	Dinas Permukiman Dan Bina Marga
89.	Sri Wahyuni	SMA Tahun 1999	II/a	Sekretaris Pimpinan	Honorer Dinas Infokom	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
90.	Sugiono	SMU Tahun 1993	II/a	Penelaah Data dan Pencegah Pemadam	Honorer Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
91.	Sunarti	P2B Bidan	II/a	Bidan	Honorer Dinkes	Dinas Kesehatan
92.	Suprpto	SGO Tahun 1990	II/a	Guru Penjaskes SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

93.	Suyati	SPG TK	II/a	Guru TK	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
94.	Titik Mulyani	D II Tahun 2005	II/a	Guru Kelas SD	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95.	Trisnoaji	SMA	II/a	Satpol PP	Honorer Satpol PP	Kantor SATPOL PP
96.	Vivin Yudi Inprestianto	SMA Tahun 1994	II/a	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP
97.	Wawan Moeliawan	STM	II/a	Teknisi Bangunan Dan Instalasi	Honorer Bagian Umum	Dinas Permukiman Dan Bina Marga
98.	Wira Amurwa Mustofa Amada	SMA Tahun 1998	II/a	Pranata Komputer	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
99.	Yanuar Candra	STM	II/a	Satpol PP	Honorer Satpol PP	Kantor SATPOL PP
100.	Yunani Fenti Florida	SMA Tahun 1985	II/a	Penginventaris Barang	Honorer Dinas Kim Bm	Dinas Permukiman dan Bina Marga
101.	Zaenal Abidin	SMK Tahun 1997	II/a	Teknisi Elektronik	Honorer Dkp	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
102.	Astutik, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103.	Eko Setiono	D II Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
104.	Erisa Permata Sari, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105.	Indah Hidayati, A.Ma.Pd	D2 PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
106.	Lulus Saidah, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
107.	Nuraini, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
108.	Nurnik Anisa Fatikhah Fitrianti, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
109.	Rachmawati, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
110.	Rukhiyati, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2003	II/b	Guru Kelas SD	Guru Bantu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
111.	Salis Fauziah, A.Ma.Pd	D II PGTK	II/b	Guru TK	Guru Bantu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112.	Siti Saidah, A.Ma.Pd	D-II PGTK Tahun 2005	II/b	Guru TK	Honorer Dinas P Dan K	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
113.	Suliyah	D2 PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114.	Tri Hananing Tyas, A.Ma.Pd	D-II PGSD Tahun 2005	II/b	Guru Kelas SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
115.	Umi Maimunah, A.Ma.Pd	D-II PGSD	II/b	Guru Kelas SD	Guru Sukwan Sdn Pendem 02	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116.	Yuli Wijayanti, A.Ma.Pd	D II PGSD	II/b	Guru SD	Honorer Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
117.	Dodi Kurniawan, A.Md	D-III Keperawatan	II/c	Perawat Terampil	Honorer Dinkes	Dinas Kesehatan
118.	Faisal Imron, A.Md	D-III Ekonomi Perhotelan	II/c	Pemandu Wisata	Honorer Dinas Kim & Bm	Dinas Pariwisata
119.	Guritno Pribadi, A.Md	D-III Akuntansi	II/c	Auditor	Honorer Bawas	Badan Pengawasan
120.	Moh. Husen Sayudi, A.Md	D-3 Akuntansi Tahun 2002	II/c	Penata Laporan Keuangan	Honorer Bagian Kepegawaian	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu
121.	Muth'ah, A.Md.Keb.	D-III Kebidanan	II/c	Bidan	Honorer Dinkes	Dinas Kesehatan
122.	Setyo Pambudi, A.Md	D- III Teknik sipil	II/c	Teknisi Bangunan dan Instalasi	Honorer Dinas Kim & Bm	Dinas Permukiman dan Bina Marga
123.	Tutut Mudayati, A.Md	D-III Teknik Sipil	II/c	Teknisi Pengairan	Honorer Dinas Klh	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
124.	Welly Gunawan, A.Md	D-III	II/c	Pemandu Wisata	Honorer Dinas Pendapatan	Dinas Pariwisata
125.	Wiwit Yulianto, A.Md	D-III Teknik Elektronika	II/c	Teknisi Elektronika	Honorer Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kota Batu

126.	Yuli Dwi Astuti, A.Md	D-III Manaj. Perkantoran Tahun 1999	II/c	Pemandu Wisata	Honorer Bagian Kepegawaian	Dinas Pariwisata
127.	Adiek Iman Santoso, S.E.	S1 Manajemen	III/a	Petugas Pembina Industri	Honorer Kasda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
128.	Agus Suprasetiyo, S.Pd	S1 P. Geografi Tahun 1997	III/a	Guru SMA Geografi	Guru Tidak Tetap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
129.	Ananto Prasetya, Sh	S1 Hukum Tahun 1999	III/a	Penyusun Peraturan Perundang-undangan	Honorer Bagian Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Batu
130.	Andi Arifian, S.Ip	S1 Sospol	III/a	Penyuluh KB	Honorer PMP	Badan KB dan Kessos
131.	Andian Prasetiando, S.T.	S1 Teknik Pengairan	III/a	Konselor Pengairan	Honorer SDAE	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi
132.	Anik Karyawati, S.E.	S1 Akuntansi	III/a	Auditor	Honorer Bagian Keuangan	Dinas Pendapatan Daerah
133.	Anis R, S.Psi	S1 Psikologi Tahun 2001	III/a	Penyuluh KB	Honorer	Badan KB dan Kessos
134.	Any Rachmawati, Se	S-1 Manajemen Tahun 1999	III/a	Petugas Layanan Bimb. Adm. Pemegang Bukuan	Honorer Set. DPRD	Kantor Koperasi dan UKM
135.	Arfan F, S.Sos	S1 Adm. Negara	III/a	Pustakawan	Honorer Sek. KPU	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
136.	Ari Mardiana Christanti, S.T	S-1 T.Arsitektur Tahun 2001	III/a	Perencana Teknik Bangunan	Honorer Dinas Permukiman & BM	Dinas Permukiman dan Bina Marga
137.	Arie Nurendah Meilane, S.T.	S1 Teknik Arsitektur	III/a	Pengadministrasi Rencana Pembangunan Taman	Honorer Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
138.	Asri Dwi Wahyuni, S.E.	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Honorer Bagian Keuangan	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
139.	Bambang Eko Pribadi, S.Pd	S1 P. Matematika Tahun 1998	III/a	Guru SMP Matematika	Guru Tidak Tetap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140.	Bambang Supriyanto, Se	S1 Manaj. Keuangan	III/a	Pemegang Kas	Honorer	Kantor Kas Daerah
141.	Budin Indrawati, S.Pd	S1 P. B. Inggris	III/a	Guru SMK Bahasa Inggris	Guru Sukwan SMU 2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
142.	Budiono, Sp	S-1 Bud. Pertanian	III/a	Pengawas Benih Tanaman	Honorer	Dinas Pertanian
143.	Chairul Anwar, S.E.	S1 Ekonomi	III/a	Pemegang Kas	Kordinator Parkir Ddlajd	Kantor Perhubungan
144.	Cicilia Triwinarti, S.E.	S1 Akutansi	III/a	Penyusun Anggaran Verifikasi	Honorer Bagian Kepegawaian	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu
145.	Darmanto, S.E.	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Rencana Kerja Diklat	Honorer Kab. Malang	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Tenaga Kerja
146.	Deddy Apriyanto, S.T	S1 T. Industri Tahun 1999	III/a	Perekayasa	Honorer Perindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
147.	Dedik Fajar Hariyanto, S.Pd	S1 P. B. Inggris	III/a	Guru SMA Bahasa Inggris	Honorer Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
148.	Diah Herawati Palupi, S.P	S-1 Pertanian '97	III/a	Guru SMK Pertanian	Honorer Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
149.	Dian Asmarani, S.Sos	S-1 Fisip Kom.2002	III/a	Pranata Hubungan Masyarakat	Honorer Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kota Batu
150.	Dody Everantau, S.Psi	S1 Psikologi	III/a	Penyuluh KB	Honorer Dns Perindustrian & Perdagangan	Badan KB dan Kessos
151.	Dody Irawan, S.T	S1 T. Industri	III/a	Perekayasa	Honorer Dinas Infokom&Perpus	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
152.	Dony I, S.T.	S1 Teknik Mesin	III/a	Analisis Teknik Mesin	Honorer Kimpraswil	Dinas Permukiman Dan Bina Marga
153.	Erni Listwati, S.Pd	Sarjana Tahun 2004	III/a	Penyuluh KB	Honorer Bagian Umum	Badan KB dan Kessos
154.	Erwan Susanto, S.T.	S1 Sipil	III/a	Perencana Teknis Jalan	Honorer Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dinas Permukiman Dan Bina Marga
155.	Fatimah Hammi, S.Pi	S1 Perikanan	III/a	Pengawas Benih Ikan	Honorer Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
156.	Fatimah, S.Pd	S1 B. Indonesia '00	III/a	Guru SMK Bahasa Indonesia	Guru Kontrak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

157.	Fitrya Faradevi, S.H	S1 Hukum	III/a	Perantara Hubungan Perindustrian	Honorer Bakesbang Linmas	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja
158.	Frederikus To Goa, S.Pd	S-1 Bhs & sastra Inggris Tahun 2002	III/a	Guru SLTP Bahasa Inggris	Honorer Dinas P Dan K	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
159.	Hermawan Setiaji, S.E	S-1 Ekonomi Manajemen Tahun 2002	III/a	Pengumpul Data Organisasi	Honorer Bagian Ekbang	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Batu
160.	Heru Sudjatmiko, S.Pd	S1 Pand. Matematika Tahun 2000	III/a	Guru SMK Matematika	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
161.	Ika Zulaicha Ipp., S.Pd	S1 MIPA Tahun 1999	III/a	Guru SMA Kimia	Hoorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
162.	Imam Syaiful Bahri, S.T.	S1 Teknik Kimia	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan	Honorer Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
163.	Kasmari, S.Pd	S1 P. Biologi	III/a	Guru SMA Biologi	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
164.	Khayumiyah, S.Sos	S1 Adm.Negara Tahun 2005	III/a	Pengadministrasi Jabatan Fungsional	Honorer Dinas Kependudukan, Capil Dan Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
165.	Kushendro Wahyu Nugroho, Se	S1 Akuntansi Tahun 2001	III/a	Auditor	Honorer Badan Pengawasan	Badan Pengawasan
166.	Kusmawati, Sab	S-1 FIA Niaga Tahun 2003	III/a	Petugas Pembina Industri	Honorer Bawas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
167.	Lilik Afifah Aryani, Se	S1 Akuntansi Tahun 2001	III/a	Penata Laporan Keuangan	Honorer Sekre. DPRD	Sekretariat DPRD
168.	Liza Yossana Lucas, S.Si	S-1 Bhs.Inggris Tahun 2000	III/a	Pemandu Wisata	Honorer Pariwisata	Dinas Pariwisata
169.	Maida Yuana Budi, S.Pd	S1 P. B. Inggris Tahun 1997	III/a	Guru SMK Bahasa Inggris	Guru Kontrak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
170.	Mar'an Komaru Saiful, Se	S1 Akuntansi Tahun 2001	III/a	Pemegang Kas	Honorer Kantor Satpol Pp	Kantor Satpol PP
171.	Marhaini Widi S., S.Pd	S1 P. B. Indonesia Tahun 2001	III/a	Guru SMP Bahasa Indonesia	Guru Kontrak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172.	Millati, Se	S1 ilmu Eko. Pembanguna nTahun 1997	III/a	Petugas Layanan Bimb. Adm. Pemegang Bukuan	Honorer Bagian Ekonomi & Pembangunan	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Batu
173.	Moch. Ridwan, S.Pd	S-1 P. Jasmani Tahun 2005	III/a	Guru SMK Penjaskes	Guru Kontrak Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
174.	Muchammad Noor, S.T.	S1 T. Planologi	III/a	Perencana Tata Ruang	Honorer Dinas Permukiman Dan Bina Marga	Badan Perencanaan Daerah
175.	Muhammad Ghufron Sholihin, S.Ag	S1 Agama Islam	III/a	Guru SMK Agama Islam	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
176.	Munir Affandi, S.Pd	S1 P. PPKN	III/a	Guru SMK PPKN	Guru Honorer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
177.	Nanang Triaji, S.Psi	S1 Psikologi	III/a	Guru BK SMK	Guru Kontrak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
178.	Neny Rukmiati, Sp	S-1 Pertanian Tahun 1996	III/a	Guru SMK Pertanian	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
179.	Nur Rochman Budiardi, S.Sos	S1 Sosial	III/a	Pemroses Mutasi Pegawai	Honorer Kantor Satpol PP	Kantor SATPOL PP
180.	Nurul Fitri, Sp	S1 Pertanian	III/a	Penyuluh Pertanian	Honorer Bagian Keuangan	Dinas Pertanian
181.	Nurul Fitria, S.Pd	S1 Tarbiyah Tahun 1998	III/a	Guru SLTP Agama Islam	Honorer Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
182.	Oktavia Five Anggraini	S1 FMIPA	III/a	Perekayasa	Honorer Dinas Pendapatan	Badan Perencanaan Daerah
183.	Prayuni Mastika, S.E.	S1 Akuntansi	III/a	Petugas Pembina Industri	Honorer Bagian Pemerintahan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

184.	Rahman Safii, S.E.	S1 Akuntansi	III/a	Auditor	Honoror Badan Perencana Daerah	Badan Pengawasan
185.	Reny Widayanti, Se	S-1 IESP Tahun 1998	III/a	Guru SLTP Akuntansi	Honoror	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
186.	Retno Probowati, S.Sos	S-1 SOSPOL Tahun 1999	III/a	Penelaah Data Bahan Evaluasi Dan Laporan	Honoror Bagian Umum	Bagian Umum Setda Kota Batu
187.	Riafita Dyah Isworini	S1 Ekon. Manaj Tahun 2000	III/a	Pengolah dan Penyaji Program Diklat	Honoror Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
188.	Rini Yogiastuti, Sp	S1 Pertanian	III/a	Penyuluh Pertanian	Honoror Bagian Perlengkapan	Dinas Pertanian
189.	Robi Elbitrul , St	S-1 Arsitektur Thn 2001	III/a	Perencana Teknik Bangunan	Honoror Infokom	Dinas Permukiman dan Bina Marga
190.	Shinta Kumil Laily Hatuwe, S.Hut	S1 Kehutanan	III/a	Pengendali Ekosistem Hutan	Honoror Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
191.	Siska Maharani, S.Pd	S-1 Pendidikan Sejarah Tahun 2004	III/a	Guru SLTP Sejarah Nasional	Honoror Dinas P Dan K	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
192.	Sispuwo Julianto, S.Pd	S1 P. Ekonomi	III/a	Guru Akuntansi SLTP	Guru Kontrak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
193.	Siti Chotipah, Se	S-1 E. Akuntansi Tahun 2000	III/a	Pemegang Kas	Honoror Dinas P Dan K	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
194.	Siti Khotijah Sujatmiko, S.Pt	S1 Peternakan	III/a	Pengawas Bibit Ternak	Honoror Dinas Infokom Dan Perpustakaan	Dinas Pertanian
195.	Siti Rodiatin, S.Pd	S1 P. PPKN Tahun 2001	III/a	Guru SMP PPKN	Guru Tk. Dharma Wanita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
196.	Siti Sulichah, S.Pd	S1 P. Biologi Tahun 1994	III/a	Guru SMP Biologi	Guru Yayasan Diponegoro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197.	Sri Utami, Sp	S-1 Pertanian Tahun 2001	III/a	Penyuluh Pertanian	Honoror Disperindag	Dinas Pertanian
198.	Sri Wulan Romdaniyah, S.Pd	S1 P. Fisika	III/a	Guru Fisika SLTP	Guru Bantu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
199.	Subiantoko, S.Hut	S1 Kehutanan	III/a	Pengendali Ekosistem Hutan	Honoror Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
200.	Suhermin Rahayu, S.Pd	S1 P. Matematika Tahun 1995	III/a	Guru SMK Matematika	Guru Yayasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
201.	Suroso, S.Pd	S1 PENDIDIKA N PPKN	III/a	Guru PPKN SMA	Honoror Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
202.	Sutejo, S.Pd	S1 Penddkn IPS	III/a	Guru SMA Sejarah	Guru Sukwan Smu 2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
203.	Tutri Laksono Adi, S.E	S1 Manajemen	III/a	Penyiapan Bahan Evaluasi Ketatalaksanaan	Honoror Bagian Umum Setda	Bagian Umum Setda Kota Batu
204.	Umi Solikah, S.Pd	S1 P. Biologi	III/a	Guru SMA Biologi	Guru Sukwan Smu 2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
205.	Vardian Budi Santoso, St	S-1 T. Pengairan Tahun 2002	III/a	Konselor Penasehat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengairan	Honoror Dinas Kim Bm	Dinas Permukiman dan Bina Marga
206.	Yatik Hariani, Se	S1 Ekon. Manaj. Tahun 2005	III/a	Penata Laporan Keuangan	Honoror	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Batu
207.	Yudhi Supnadi Arifin, S.Sos	S1 Ilmu Adm Negara	III/a	Analisis Kepegawaian	Honoror Bagian Umum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
208.	Yuli Efendi Mas'ud, S.Pd	S-1 Pend. Islam Tahun 2005	III/a	Guru SMA Agama Islam	Honoror Setda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
209.	Achmad Rifai, Dr.	S1 Kedokteran	III/b	Dokter Umum	Honoror Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

210.	Andy Abdul Rachman Afriliansjah	D-III Mesin	II/c	Teknisi Mesin	Honoror Dinas Kim Bm	Dinas Permukiman & Bina Marga
211.	Zedi Purnomo	SMA IPS	II/a	Pustakawan	Honoror Dinas Kih	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
212.	Muji Pangestu	S1 Hukum	III/a	Petugas Pemberi Batuan Hukum	Honoror Dinas Pertanahan	Bagian Hukum Setda Kota Batu



Lampiran 3 :

Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu tahun 2006 yang berasal dari tenaga honorer adalah sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Pendidikan	Gol/ Ruang	Jabatan	Unit Kerja	
					Asal	Penempatan
GURU TK/RA						
1	MIESKE MONNY KALENGKONGAN, A.Md	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
2	YAYUK IRIANI	SLTA	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
3	DINAWATI RAHAYU, A.Md	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
4	SULIKAH	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
5	ISMIATI	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
6	SRIYAMI	S P G	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
7	MARSINI	SPG TK	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
8	LIES MINTARSIWATI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
9	WIJAYATI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
10	SULISTIN	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
11	ARTININGSIH	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
12	AMARUSANA	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
13	RUSMINI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
14	SUGIARTI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
15	SUPIAH	PGAN	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
16	SITI MAIMUNAH	PGAN	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
17	LUBENA	KPG TK	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
18	SUPRAPTI, A.Md	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

19	DETTY RUSMAYA NURWULANDARI	SPG TK	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
20	MARIA THERESIA TRIREJEKI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
21	CHRISTINA RIBUT	SPG SD	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
22	SRI WIHARTI	SPG TK	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
23	SULISTYOWATI	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
24	SITI FATIMAH	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
25	RETNO WULAN KARTIWI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
26	SITI ASTUTIK	SPG TK	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
27	SRI WAHYUNINGSIH	SMA	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
28	HANIFAH	PGAN	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
29	NGATIYAH	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
30	LILIK JUBAIDAH, A.Ma	D II PG TK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
31	SITI ASTUTIK, A.Ma	D II PG TK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
32	ANI FIRDHIYATI, A.Ma	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
33	TITIK SHOFIATUR ROHMAH, A.Ma	D-II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
34	ENI PENI, A.Ma	D II PG TK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
35	UYUNUR RAHMAH, A.Ma.	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
36	SUDARMI	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
37	SULISTYOWATI, A.Ma	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
38	WIWIN AGUSTINA, A.Ma	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
39	AGUS SUNARYO	D II PGTK	II/b	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
GURU SD/MI						
40	AWAN HERMAWAN	SLTP	I/c	PENJAGA SEKOLAH	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
41	SRI RETNONINGTYAS	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

42	ISKANDAR	S1 PAI	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
43	TRESIA MARIA WINARTI OCTAVIANI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
44	SUMAKYAH	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
45	SUNTIANAH	MAN	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
46	DWI HARTATIK	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
47	MARKUS MARDIHARSONO	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
48	TITIK SUNAENI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
49	UTAMI RESTUWATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
50	PATREM ERNA VIANA	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
51	M.M. SULISTYAWATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
52	KUSWATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
53	PRIHATIN MUKTININGSIH	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
54	PRAYITNO	SGO	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
55	SUSIAMI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
56	ENDAH SUGIATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
57	YUSTINA MULYATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
58	SUHARTATIK	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
59	PAINI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
60	WIJAYA LASMI	PGAN	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
61	HIDAYATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
62	RUJITO	D II PGSD	II/b	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
63	SRIWATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
64	TRI PANGESTUTI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
65	ENY ISNAINI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

					Batu	Kota Batu
66	NUNUNG UMBARYANI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
67	NURHAYATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
68	MARIYANAH	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
69	SOFWAN HADI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
70	KUSMIATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
71	PUJI PRIHATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
72	SUGIATI	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
73	AHMAD MUDHOFAR	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
74	SUPRIYANTO	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
75	BETTY YOUHANNA	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
76	IMAM SOPI'I	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
77	MULIATI	SPG	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
78	YAYUK SARIYASTUTIK	SPG SD	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
79	PRAYOGI BANGUN PRIBADI	SMA IPS	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
80	AMININGSIH, A.Ma	D II PGSD/MI	II/b	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
81	NURUL DJAZIROH	KPG	II/a	GURU TK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
82	NUR HAYATIN	KPG	II/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
83	KUSRIYANTINIK	D II PG SD	II/b	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
84	SOLIKIN	SARMUD A. ISLAM	II/c	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
85	NOOR KHASANAH	D3 TARBIYAH	II/c	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
86	SUTRISNO, A.Ma.Pd	D-3 / A-III PPKn	II/c	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
87	MUCHAMAD SUWITO, S.Pd	S-1/A-IV B.INDONESIA	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
88	Dra. SITI NURUL JIROIDAH	S1 P. DASAR	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
89	KUSWANTO,	S-1 / A- IV A.	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan	Dinas Pendidikan

	S.P.AK	KRISTEN			Kebudayaan Kota Batu	Dan Kebudayaan Kota Batu
90	Dra. SUCIATI	S1 K. DASAR	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
91	Drs. AKHMAD SYAHRUDDIN	S1 T. MATEMATIKA	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
92	SULISTYANI, S.Pd.	S-1 / A-IV PSIKOLOGI	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
93	Drs. SYARIF PEHANG	S-1 / A-IV PAI	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
94	Drs. M. KHOTIB	S-1 / A-IV PAI	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
95	MOHAMMAD JAELANI, S.Pd	S1 A. PENDIDIKAN	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
96	BOTOR TRILAMBANG, S.Pd	S-1/A-IV PPKn	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
97	MARIANI, S.Pd	S-1/A-IV PPKn	III/a	GURU SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
98	MOH. SYAFII					
99	SUNARDI					
GURU SMP/MTs						
100	UMI NASIKAH	D-1 / A-I PMP	II/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
101	MUSLINAH, S.Pd	S-1 / A-IV MATEMATIKA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
102	Drs. HARI SUBROTO	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
103	AKH. MASRUR, S.Ag	S-1 TARBIYAH PAI	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
104	Ir. SURTINI	S1 PERTANIAN	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
105	Drs. TRISWANTO	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
106	Drs. ACHMAD SUDIRMAN	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
107	Dra. ASRI WILUJENG	S-1 / A-IV MATEMATIKA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
108	Dra. SITI MUKHAYANAH	S1 P. BIOLOGI	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
109	Dra. ROFA TRI YULYANTI	S-1 / A-IV MATEMATIKA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
110	SUPA'AT, S.Ag	S-1 TARBIYAH PAI	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
111	Dra. YULI NOOR THOYYIBAH	S-1 P. BHS. INGGRIS	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
112	Dra. SUSTRIASIH	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
113	SUBANDI, S.Pd	S-1 PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

114	Dra. HERMI SUGIARTI	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Batu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Kota Batu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
115	Drs. SUGENG SUBAGYA	S-1 ADM. NEGARA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
116	Dra. RUSMIATI	S-1 P. B. INDONESIA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
117	Dra. NUR AINI	S-1 ADM. NEGARA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
118	Dra. MASLAHAH	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
119	Drs. AGUS SETIAWAN	S-1 / A-IV ORKES	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
120	Dra. YULIANIK	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
121	Drs. ADAM	S1 P. BHS & S. INDONESIA	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
122	SAIFULLAH, S.Pd.	S-1 P. INGGRIS	III/a	GURU SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
123	LATIFAH		III/a			
124	SULISTYOWATI		III/a			
GURU SMA/MA						
125	DWI DEWI ROSINI, BA	D-3/ A-III EKONOMI	II/c	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
126	SITI ROKHMAH, S.Pd	S-1 / A-IV A. ISLAM	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
127	Drs. MASTHOHARI	S-1 / A-IV A. ISLAM	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
128	SOLIKIN, S.Pd	S-1 / A-IV B. INDONESIA	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
129	MUJI WINANTIK, SP.d	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
130	Drs. PURIADI	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
131	Dra. TUTIK SRI ANINGSIH	S-1 / A-IV IPS	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
132	Dra. SURIYA	S-1 / A-IV IPS	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
133	U'UM WILLATIFA, S.Pd.	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
134	Drs. BONARI	S-1 / A-IV GEOGRAFI	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
135	SUPRAPTO, S.Pd	S-1 / A-IV B. INGGRIS	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
136	KUMAI, S.Pd.	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
137	Drs. MARSUDI	S-1/A-IV MATEMATIKA	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

138	Drs. JOKO HADI WINARTO	S-1/A-IV MATEMATIKA	III/a	GURU SMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
GURU SMK						
139	ISNAINI, S.Pd	S-1 / A-IV IPS	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
140	Drs. NUR HADI	S-1 / A-IV B. Indonesia	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
141	UMI SALAMAH, S.Pd	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
142	EKA ERNY SETYANINGSIH, A.Md	D-3 / A-III AKUNTANSI	II/c	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
143	Dra. BA' INAH	S-1 / A-IV INGGRIS	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
144	TOTOK HARDIANTORO, S.Pd	S-1 / A-IV T. MESIN	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
145	GUNAWAN YUWONO, S.Pd	S-1 / A-IV T. ELEKTRO	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
146	AGUS MURDIANTO S.Pd	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
147	TRI RAHAYU	S-1 / A-IV PPKn	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
148	Drs. PAI	S-1 A-IV IPS	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
149	SUPRAPTO, S.P.	S-1 PERTANIAN	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
150	SRIWIDAYATI, S.Pd	S-1 / A-IV BIOLOGI	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
151	Drs. ABDUL MUTOLIB	S-1 / A-IV INGGRIS	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
152	CHUSNUL WALID, S.Ag	S-1 / A-IV PAI	III/a	GURU SMK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
153	IMAM CHANAFI		III/a			
GURU SLB						
154	ENDANG RETNO TITIK WULAN, S.Pd	S-1 P. LUAR BIASA	III/a	Guru SLB	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
155	SITI MUAWANAH MARIAM, S.Pd	S1 P. PPKn	III/a	Guru SLB	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
PENYULUH						
156	Ir. PUJI IRIANI	S-1 SOSEK PERTANIAN	III/a	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
157	YULIANTI NOVIDA, S.Pt	S-1 PETERNAKAN	III/a	Penyuluh Peternakan	Dinas Peternakan Kota Batu	Dinas Peternakan Kota Batu
DOKTER UMUM						
158	dr. SRI WIDIYAWATI	S-1 KEDOKTERAN	III/b	Dokter Umum	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
159	dr. MUHAMMAD MUFID	S 1 KEDOKTERAN	III/b	Dokter Umum	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
PERAWAT						
160	RONI PILU HANDOKO, Amd. Kep	D-III KEPERAWATAN	II/c	Perawat	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu

161	TRI ASTUTIK, Amd. Kep	D-III KEPERAWATAN	II/c	Perawat	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
162	LAORENCIA RINTA HERAWATI, Amd. Kep	D-III KEPERAWATAN	II/c	Perawat	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
BIDAN						
163	NINA PRIMI ASTUTI	BIDAN	II/a	BIDAN	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
164	ERMA YULIATMI	BIDAN	II/a	BIDAN	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
TENAGA TEKNIS STRATEGIS						
165	SUGENG PRIYANTO	SD	I/a	Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
166	DIRMANTO	SD	I/a	Satuan Pengamn Psar	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
167	TOIRIN	SD	I/a	Satuan Pengamn Psar	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
168	KUSAENI	SD	I/a	Pramu Kantor	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
169	BASORI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
170	WUSONO	SD	I/a	Penjaga Pasar	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
171	SHOLIKIN	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
172	AKHMAD	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
173	JEMANI	SD	I/a	Petugas Pemungut Retr	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
174	SUPRIYANTO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
175	MUKRONI	SD	I/a	Petugas Pemungut Retr	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
176	SULIYANTO	MI	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
177	NARI NERE	PAKET A	I/a	Petugas Pemungut Retr	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
178	ASROFI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
179	KASIADI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
180	MISKAN	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
181	TANG AGUS SLAMET	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
182	ISWANTO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
183	ARTOKO PRAMONO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
184	SUTRISNO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
185	SUPARNO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
186	JOKO SUPENO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu

187	AGUS	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
188	WARSONO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
189	MOEHAMAD JOESOEF	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
190	ANDIK	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
191	KARNAWI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
192	WARSITO	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
193	TONY KUSTONO	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
194	MOCHAMAD SOLEH	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
195	EDY SUSILO	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
196	JUMARI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
197	SUKARDI	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
198	JUNAIDI SAPUTRA	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
199	MISTOYO	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
200	PURWANTOHADI	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
201	SANTOSO	PAKET A	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
202	AHMAD SYAINUDDIN ALI	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
203	NURHADI	SD	I/a	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
204	ANANG IRAWAN	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
205	SUGITO	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
206	ANANG SUCIPTO	PAKET B	I/c	Pramu Kantor	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
207	PANJI	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
208	SUHARIONO	SMP	I/c	Petugas Pemungut Retr	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
209	AHMAD SUWITO	MT's	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
210	DWI SISWANDI	SMP UMUM	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
211	ADI SUCIPTO	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
212	LASTARIYONO	SLTP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
213	NOVI KURNIAWAN SULISTIONO	SMP UMUM	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
214	ROCHMAN SETYOWIDODO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu

215	BAMBANG ISWANTO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
216	SUTRISNO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
217	EFENDI KUSUMA	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
218	SUTRISNO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
219	PRANOWO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
220	HERMANTO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
221	MOCHAMAD NURHUDIN	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
222	WAWAN TONO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
223	ALI HAZAINI	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
224	HERIYANTO	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
225	KASIADI	MTS	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
226	RUDY PRIYO SANTOSO	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
227	HERMAN SUPRAPTO	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
228	EKO WAHYUDI	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
229	YASIN	PAKET B	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
230	SAMSUL ARIFIN	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
231	MEDIYO	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
232	SULIANTO	SLTP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
233	SUNARI	SMP	I/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
234	LUKAS UTA	SMA	II/a	Petugas Pemungut Pjk Dan Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
235	SUHARNO	SMA	II/a	Pengadministrasian Perlengkapan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
236	SUMIADI	SMA UMUM	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
237	HARIJONO	STM MESIN	II/a	Teknisi Listrik Telepon Dan Ac	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
238	DANIEL TOTOK SULISMANTO	SMA	II/a	Petugas Pajak Dan Retribusi	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
239	MOKH. JAELANI	PAKET C	II/a	Petugas Pemungut Retribusi	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
240	SUGENG RAHARJO	SMA BIOLOGI	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
241	RUDI YUNIARTO	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
242	ACHMAD AROFIK	STM	II/a	Teknisi Bangunan Dan Instalasi Air	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Batu
243	MOCH. SOLEH	SMA	II/a	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
244	KUSWANTO	SMA	II/a	Petugas Pemungut Retr	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
245	ANDI SUSILO UTOMO	STM	II/a	Kameramen / Fotografer	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpus Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpus Kota Batu
246	GATOT SUTRISNO	SMA IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu

				Laporan		
247	JOKO UTOMO	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Kelurahan Sisir Kecamatan Batu\	Kelurahan Sisir Kecamatan Batu\
248	KHOLIS	SMA	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
249	AGUS SUYADI	SMA	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
250	EDY PRABOWO	SMA	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
251	RIRIEN WISMARIANINGSIH	D-I PARIWISATA	II/a	Pemandu Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
252	SRI WAHYUNI	SMA	II/a	Pengadministrasi Umum	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
253	AGUS GUNAWAN	SMA	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
254	YUNUS RAKHMAD PURWANTO	SMA UMUM	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
255	ARIFIN	SPPN	II/a	Pengadministrasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
256	HABIL HARIJADI	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
257	MOHAMMAD YUNAN HIDAYAT	SMA IPA	II/a	Pengemudi	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
258	HADI SUWASONO	SMU IPS	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
259	ARIK KUNTO TRIYONO	D-1 KOMPUTER AKUNTANSI	II/a	Tenaga Teknis Strategis	Dinas Pendidikan Da Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Da Kebudayaan Kota Batu
260	MUHAMMAD SYAIFULLAH	SMU IPS	II/a	Petugas Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
261	ARIF RAHMAN	SMA	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
262	RUSMAN HADI	SMA IPS	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
263	MANSUR	D-1 KOMPUTER	II/a	Operator Komputer	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
264	RUDY KURNIAWAN ANTONIUS	SMA	II/a	Pendokumentasian Kehumasan	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpus Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpus Kota Batu
265	SETYA WIDJI SANTOSA	SMU IPS	II/a	Petugas Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
266	SITI CHUMAKYAH	SMA IPS	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker
267	YOGO PRIO TRI SULISTYO	SMA UMUM	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
268	EKO ALFANDI	SMK MESIN	II/a	Teknisi Mesin	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
269	SUTRISNO	SMK MESIN	II/a	Teknisi Mesin	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
270	WAHYUDI	SMK	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
271	SUMALI	SMK	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
272	SUTOMO ANTONI	SMK AKUNTANSI	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
273	YULI RACHMAN SALEH	SPP PETERNAKAN	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu

274	ANDHIKA FARDIANA ROSYIDA ANANDA	SMA IPA	II/a	Pengadministrasian Umum	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
275	ARIF SUSANTO	MAN	II/a	Penyedia Data Keb. Perleng	Kantor Kasda Kota Batu	Kantor Kasda Kota Batu
276	WISNU WIJANARKO	SMU IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
277	DINDA ANGGARANI	SMU	II/a	Pengadministrasian Umum	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
278	VERY ISWANTO	SMK	II/a	Teknisi Bangunan Dan Instalasi Air	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
279	HAVID ANDRIANTO	SMA IPS	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
280	MUHYIDIN	D-1 KOMPUTER	II/a	Operator Komputer	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
281	RUDI SETIAWAN	SMA UMUM	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
282	GURUH FATAH MARSUKI	SMU	II/a	Petugas Pemungut Pajak & Retribusi	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
283	WIEKE AN NISA	SMU	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
284	DODIK SETIAWAN	PAKET C	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
285	DIAN IRMA KUSUMAWATI	SMA IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
286	DINO BASTIAN	SMA UMUM	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
287	TIO ALAM FIRMANSYAH	SMK	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu
288	ENA MARDARITA	SMU	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker
289	ZAINAL ARIFIN	SMU	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
290	AWANG SUGESTIAN ARYANANTA	SMU	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
291	MAHMUDDIN	SMK	II/a	Pengagenda	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu
292	SYAHRUL ALDI	SMU IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
293	YEPPY SETIAWAN	SMK	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
294	MUKHAMAD SUBAGIO	SMA IPS	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
295	KUROTA AYUNI	SMK	II/a	Pengagenda	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu
296	TEGUH JAYANTO	SMK BISNIS	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
297	RIRIS FATMAWATI	SMU	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu
298	DIDIT EKO PURWANTO	SMU UMUM	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
299	MOCHAMAD DIDIK IFANTONO	SMA UMUM	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
300	INDAH	D-1 ADM.	II/a	Pengadministrasi	Pemerintah Kota	Pemerintah Kota

	KURNIAWATI	PERKANTORAN		Umum	Batu	Batu
301	AMIN MA'ARIF	SMK	II/a	Teknisi Bangunan Dan Instalasi Air	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
302	ADI SETIA IRJAYANTO	SMU	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
303	YOHANA RIYANTISA	SMA IPA	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Naker
304	INDRA CAHYONO	SMK	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
305	AGUNG YULIANTO	SMK LISTRIK	II/a	Teknisi Elektronik	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
306	MARTI SUZANNA	SMU	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu
307	ARGA HERNIAWAN	SMA UMUM	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kependdkn Catatan Sipil& Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil &Naker
308	NURUL AFDHOLIAH	SMU UMUM	II/a	Petugas Pelayanan Perijinan	Dinas Informasi Komun Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpust Kota Batu
309	MUHAMMAD YULIZAR KASIRI	SMU	II/a	Pendokumentasian Kehumasan	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpustakaan Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi Dan Perpustakaan Kota Batu
310	AINUR RIFQI	SMU	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Informasi Komun Dan Perpust Kota Batu	Dinas Informasi Komun Dan Perpust Kota Batu
311	EDY SUSANTO	SMU	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
312	AFITA PUJI CHRISMAWATI	SMU	II/a	Pendokumentasian Kehumasan	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
313	DEWI RATIH, A.Md	D-III PERHOTELAN	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Informasi Komun &Perpus Kota Batu	Dinas Informasi Komun Dan Perpust Kota Batu
314	ADI HARYO UTOMO	D III AKUNTANSI	II/c	Penata Laporan Keuangan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
315	HUSODO TRI WIDJATMOKO	D-III PERHOTELAN	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
316	DIAN BUDI GAYATRI, A.Md	D-III PERHOTELAN	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
317	OKTAVIANDI HERDIAN, A.Md	D-III M. INFORMATIKA	II/c	Operator Komputer	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
318	I GUSTI KETUT ARYA KURNIAWAN, A.Md	D-III PERHOTELAN	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
319	DESSY ESTHERITA, A.Md	D-III PERHOTELAN	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
320	ALIK SUHARIYANI, S.Pd	S-1 P. B. INDONESIA	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
321	STEPHANUS MARDIYANTO, S.P	S-1 AGRONOMI	III/a	Teknisi Pertanian	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
322	NOOR HALIM, S.P	S-1 AGRONOMI	III/a	Teknisi Pertanian	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
323	EDI WINARTO, S.Pd	S-1 P. KOPERASI	III/a	Petugs Layann Bim.Adm. Pemegang Bukuan&Adm. Usaha Koperasi	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
324	TOTO PRIANTORO, S.T.	S-1 T. MESIN	III/a	Analisis Teknik Mesin	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
325	RADEN MUHAMAD SYAFIOEDIN, S.T.	S-1 T. ELEKTRO	III/a	Teknisi Elektro	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
326	ANNA SANTI WATI,	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran /	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan

	S.E.			Verifikasi	Setda Kota Batu	Setda Kota Batu
327	CEFFA CAUDRIYANTO, S.Pt	S-1 PRODUKSI TERNAK	III/a	Teknisi Peternakan	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
328	BAMBANG SULIYANTO, S.P	S-1 B. PERTANIAN	III/a	Teknisi Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
329	ODA NUSANTARA ARIF, S.T.	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Petgs Pembina Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
330	ASA FAISHOL, S.Sos	S-1 ADM. NEGARA	III/a	Penyiap Bhn Eva.Ketatalaksanaan	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
331	MUHAMMAD HARTOTO, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Evaluai& Lap.	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
332	SRI INDARTIK, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Anggaran	Badan Kb Dan Kessos Kota Batu	Badan Kb Dan Kessos Kota Batu
333	BAMBANG WAHJU KUNTJORO, S.T.	S-1 T. SIPIL	III/a	Perencana Bangunan	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
334	SUHARTONO, S.S	S-1 ARKEOLOGI	III/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
335	PRIAMBODO ISWAHYUDI WIDODO, S.T.	S-1 T. SIPIL	III/a	Perekayasa Sipil	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
336	ACHMAD BUCHORI, S.Ag	S-1 P. AGAMA ISLAM	III/a	Pengumpul&Pengolah Data Laporan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
337	AGUS SETIAWAN EKO ARIADI, S.T	S-1 T. MESIN	III/a	Perencana Mesin	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
338	SUYANTO, S.Pd	S-1 TARBIIYAH	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
339	MIFTAKHUL AZIZ, ST	S-1 T. SIPIL	III/a	Perencana Bangunan	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
340	BAMBANG HENDRIANTO, S.P	S-1 B. PERTANIAN	III/a	Pengawas Bibit Tanaman	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
341	SOFI RAKHMAWATI,S.P	S-1 PERTANIAN	III/a	Teknisi Pertanian	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
342	GATOT NOEGROHO, S.T.	S-1 T. MESIN	III/a	Perekayasa	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu
343	NINIK SRI SETYOWATI, S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap.Keuangan	Badan KB Dan Kessos Kota Batu	Badan KB Dan Kessos Kota Batu
344	MOH. MUA'DZ, S.Ag	S-1 TARBIIYAH	III/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
345	RENI APRIANA WIDOWATI, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Penyusun Dokumentasi Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Batu	Bagian Hukum Setda Kota Batu
346	ROMI INDRIATMONO, S.T.	S-1 T. MESIN	III/a	Perekayasa	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
347	PRASETIYA DWI PALUPI, S.E.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyiap Bhn Eva.Ketatalaksanaan	Sekretariat KPU Kota Batu	Sekretariat Kpu Kota Batu
348	FRANSISCUS SUHYADI, SH	S-1 HUKUM	III/a	Petugas Pemberi Bantuan Hkm	Dinas Pertanahan Kota Batu	Dinas Pertanahan Kota Batu
349	ERRA VERRA SETYAWATI, S.E.	S-1 EKONOMI	III/a	Pemberi Konsultasi&Bantuan Hukum	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
350	NANANG KOSIM, S.Pd	S-1 P. BHS INDONESIA	III/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
351	NUR FITRI AZIZAH, S.Pt	S-1 PETERNAKAN	III/a	Pengawas Bibit Ternak	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
352	INOL ERTADIYANSAH, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Perancang Perat.Perundang-Udangan	Bagian Pemerintahan Setda Batu	Bagian Pemerintahan Setda Batu
353	DWI DADANG SETIAWAN, S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap. Keuangan	Dinas Kependudukan Cattn Sipil & Tenaga Kerja Kota Batu	Dinas Kependudukan Cattn Sipil&Tenaga Kerja Kota Batu
354	HERI SULISTIO, S.Sos	S-1 I. PEMERINTAHA	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Pemerintahan Setda	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu

		N			Kota Batu	
355	SUSMIATI WIDYA FLORETA, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penata Lap. Keuangan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Kependudukan Catatan Sipil&Naker
356	SATRIYA HERY SETYAJI, SE	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penata Lap. Keuangan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
357	MARIA MAKDALENA HENI KURNIAWATI	S-1 PERTANIAN	III/a	Teknisi Pertanian	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
358	NUR WIWIT PUJI MAHASTITI IKA, S.T.	S-1 T. PLANOLOGI	III/a	Perencana Tata Ruang	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
359	MELIANI, S.T	S-1 T. PLANOLOGI	III/a	Perencana Tata Ruang	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
360	LUSIANA JUWITA, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Anggaran	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
361	ANTON ANDI SANJOKO, S.Pi	S-1 PETERNAKAN	III/a	Pengawas Bibit Ternak	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
362	ARIEF HAMZAH, S.Sos	S-1 KOMUNIKASI	III/a	Pranata Humas	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
363	DEWI KARYA INDAH UTAMI, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Pengumpul Data Organisasi	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
364	NOVI KURNIAWATI, S.IP	S-1 PEMERINTAHAN	III/a	Penelaah Data Bhn Evaluasi & Lap Pemeriksaan	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
365	NOVI KRISWANTI, SH	S-1 HUKUM	III/a	Penyusun Dokumentasi Hukum	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
366	DIYAH WAHYUNI, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Rencana Bhn Perlengkapan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
367	ANTON SANJAYA, S.T	S-1 T. MESIN	III/a	Analisis Teknik Mesin	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
368	ARIS WIJAYA, S.Pd	S-1 P. B. INGGRIS	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
369	MINHAR	S-1 KOMUNIKASI	III/a	Penghubung Antar Lembaga	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
370	BERKAH YOEDO POETRANTO	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penata Lap. Keuangan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
371	HIMA KHUSNITA, ST	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Perencana	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu
372	HASAN SYAMSURI, S.S	S-1 S. INGGRIS	III/a	Phnsum Dok.Khumasan	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
373	SOEGENG HARIYANTO, S.Si	S-1 B. INGGRIS	III/a	Pemandu Wisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
374	ENDEA SANTI UTAMI, SE	S-1 E. PEMBANGUNAN	III/a	Pengumpul Data Organisasi	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
375	WIWIN DWI ASTUTI, S.Sos	S-1 KOMUNIKASI	III/a	Penghubung Antar Lembaga	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu	Dinas Infokom & Perpust. Kota Batu
376	FARDHON MURDIYANTORO, S.T	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Petugas Pembina Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
377	SITI YUROHTUL AINI, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bahan Evaluasi Dan Laporan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
378	IMELDA MURBA TRIGUNA, S.T	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Perantara Hubungan Industrial	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan L.H. Kota Batu
379	RIRIN ANGGRAINI, SE	S-1 AKUNTANSI	III/a	Auditor	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
380	DEVI AVIYANTI KUMALA SARI, S.Sos	S-1 A. NIAGA	III/a	Penyusun Bahan Evaluasi Dan Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
381	ALFANDO ROY KUSUMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	II/c	Tenaga Teknis Strategis	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu
382	SYEH ZAENAL ARIFIN, ST	S-1 T. SIPIL	III/a	Perencana Sipil	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
383	EKO IRAWAN, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu

384	LUKMAN HAKIM, S.T	S-1 TEKNIK MESIN	III/a	Teknisi Mesin	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
385	MULIA DE REUTER, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Penyusun Dokumentasi Hukum	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
386	FAFAN FIRMANSYAH, S.T.	S-1 T. ARSITEKTUR	III/a	Perencana Tata Ruang	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
387	SRI LESTARI, S.E.	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Evaluasi Dan Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja
388	HARTONO, S.E.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Badan KB Dan Kessos Kota Batu	Badan Kb Dan Kessos Kota Batu
389	drh. UTAMI KURNIAWATI	S-1 KEDOKTERAN HEWAN	III/b	Medik Veteriner	Dinas Pertanian Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
390	WAKIDI		I/a			
391	SEGER		I/a			
392	TUKIDI		I/a			
393	MAHFUD		I/a			
394	NURUL JANAH		III/a			
395	DEDI ARIYANTO		III/a			
396	SUPRAPTO		I/a			
TENAGA ADMINISTRASI						
397	WARDI	SD	I/a	Petugas Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
398	SUCIPTO	PAKET A	I/a	Pengemudi	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu
399	SRI RAHBINI	PAKET A	I/a	Pramu Kantor	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
400	ANSELMUS DHAKE	PAKET A	I/a	Petugas Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
401	GATOT AKHIRTA DWI SUGIARTO	SD	I/a	Penjaga Kantor	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
402	ABDUL ROCHIM	SMP	I/c	Pramu Kantor	Kelurahan Temas Kec. Batu	Kelurahan Temas Kec. Batu
403	UMAR MAKSUM A.R.	SMP	I/c	Petugas Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
404	HARI MULYONO	SLTP	I/c	Petgs Pemungut Retribusi	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
405	SUGENG WAHYUDI	SMP	I/c	Pramu Kantor	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
406	PRIYO HADI WAHYONO	SMP	I/c	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
407	IRIANI	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
408	YULI YULAICHA	SMA	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
409	SRI PURWATI	SMA	II/a	Agendaris	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
410	WARIH CAHYANI	SMA	II/a	Agendaris	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
411	SRI HARIATI	SMA IPA	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
412	NGATEMAN	SMA	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
413	ABDUL MAJID	SMA IPA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Kelurahan Temas Kec. Batu	Kelurahan Temas Kec. Batu

414	EKO MARSIT PURWANTO	D-1 PERHOTELAN	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu
415	INDAH WILUJENG	SMEA	II/a	Arsiparis	Sekretaris Dprd Kota Batu	Sekretaris Dprd Kota Batu
416	JARWOKO	SMA	II/a	Pemelihara Peralatan Dan Perlengkapan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
417	WIWIK SULISTYOWATI	SMEA	II/a	Agendaris	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
418	HARIYONO	MA	II/a	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
419	BAMBANG SUTIKNO	SMA	II/a	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
420	ARI SUMANTRI	SMA	II/a	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
421	SOFRAN WIJAYA	SMA	II/a	Operator Telkomunikasi	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
422	AGUS TRIYANTO	SMA	II/a	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
423	YULI SETYANINGSIH	SMEA	II/a	Pengadministrasi Umum	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
424	YUYUN SRIWIJAYANTI	SMA	II/a	Pengagenda	Kantor Kecamatan Bumiaji	Kantor Kecamatan Bumiaji
425	BUDI YUWONO ATASAGAWA	STM	II/a	Satpol Pp	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
426	HERI SUSIYO	SMA	II/a	Pengadministrasi Umum	Kelurahan Temas Kec. Batu	Kelurahan Temas Kec. Batu
427	CHOIRUN NAJIB	STM MESIN	II/a	Teknisi Bangunan Dan Instalasi Air	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
428	SUTATIK	SMA	II/a	Agendaris	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
429	DWI KURNIA RAHAJU	SMA	II/a	Agendaris	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
430	ESTI WINARNI	SMA	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
431	NONA DORTJE SIWALETTE	SMA IPS	II/a	Agendaris	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
432	MOCHAMAT MOEDJIADI	MAN BIOLOGI	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
433	SUTARDIYONO	SMEA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
434	SLAMET SUBAGIYO	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
435	HENGKI TRIASMORO	STM	II/a	Teknisi Listrik Telepon Dan Ac	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
436	FERRYA RASTRATAMA SYUHADA	SMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
437	SULARSIH	D1 SEKRETARIS	II/a	Pengagenda	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
438	DETTY MIEKE BANOWATI	SMEA	II/a	Agendaris	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu
439	ANA AKHIRIANI	SMA	II/a	Pengagenda	Sekretariat Kpu Kota Batu	Sekretariat Kpu Kota Batu
440	ATIM MULYO SUWITO	STM LISTRIK	II/a	Operator Telekomunikasi	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
441	ANINGTYAS RETNO WULANDARI	SMA IPS	II/a	Pengagenda	Kantor Koperasi Dan Ukm	Kantor Koperasi Dan Ukm
442	WAHYU HANDAYANI	SMA	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
443	DWI ANANG PRAMONO	SMA	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu

444	AHMAD HUNAIFI	D-1 PERKANTORAN	II/a	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
445	FAJAR MAHENDRA	SMA	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
446	MUCHAMAD AWALUDIN	MAN	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kota Batu
447	ANIS ANDAYANI	SPP-SPMA	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dns Kependudukan Catatan Sipil & Naker
448	AGUS IRAWAN	STM	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
449	SAFRUDDIN MUSTAIN	MA	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
450	SUBKHAN ARIF	SMA	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
451	EKO SASI INDAH PURUSANINGRUM	D-1 KOMPUTER	II/a	Operator Komputer	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
452	AGUS TRIWANTO	SMK	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
453	MARIATI	SMA	II/a	Pengadministrasi Umum	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
454	AJI BUDIONO	SMA	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
455	HARI MURTOPO	SMA IPS	II/a	Pemelihara Perleng Dinas	Badan KB Dan Kessos Kota Batu	Badan KB Dan Kessos Kota Batu
456	MUHYADI	SMK	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dns Kependudukan Catatan Sipil & Naker
457	NUR FATCHURACHMAN	SMU IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu
458	SITI SHOFIYAH	D-1 PERHOTELAN	II/a	Pengadmnstrs Perjlnn Dinas	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
459	ROFIK AFANDIK	MA	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
460	BAHRUL ULUM	MAN	II/a	Penyedia Data Keb. Perleng	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
461	TOMY KISMANTO	SMU	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Dinas Kependudukan Catatan Sipil&Naker	Dinas Kependudukan Catatan Sipil&Naker
462	INDRA BAYU KRISNAWAN	D-1 PERKANTORAN	II/a	Pengumpul&Pengolah data Laporan	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
463	WIWIT WINTOYO	MAN	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
464	WAHYUDI PUJI UTOMO	SMU	II/a	Tenaga Administrasi	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
465	MAMIK PURIANI	SMK ADM. PERKANTORAN	II/a	Agendaris	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kntr Perhubungan Kota Batu
466	KRISTIAWAN	SMU IPS	II/a	Pendokumentasian Kehumasan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
467	EKO WAHYUDI	D-1 KOMPUTER	II/a	Operator Komputer	Badan Kesbang Dan Linmas Kota Batu	Badan Kesbang Dan Linmas Kota Batu
468	ANTONIUS SAU ASUAT	SMK	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Hukum Setda Kota Batu	Bagian Hukum Setda Kota Batu
469	SHERLY OLIVIA PRIVANA	SMA	II/a	Agendaris	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
470	SITI QOMARIAH	SMK ADM PERKANTORAN	II/a	Pengadmins Naskah Dinas	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kntr Perhubungan Kota Batu
471	YUDO PRASETYO	SMU	II/a	Penginventaris Barang Dan Atk	Badan KB Dan Kessos Kota Batu	Badan KB Dan Kessos Kota Batu
472	ENDANG ANITA WIJAYA	D-1 KOMPUTER	II/a	Operator Komputer	Kantor Kasda Kota Batu	Kantor Kasda Kota Batu

473	LUPIYANTO	SMK	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
474	FERRY	SMU	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
475	SUKRIS WAHYUNI	SMU	II/a	Sekretaris Pimpinan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
476	HENDY KUSUMA	SMU	II/a	Pengadministrasian Perlengkapan	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
477	SHONY ISMADIEANTO	SMA	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
478	IIN IRAWATI	SMK	II/a	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
479	AGUS LUKMAN HAKIM	SMU	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
480	NORMA AWWAL LUDDIN	MAN IPS	II/a	Penyedia Data Keb Perleg	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dns Kependudukan Catatan Sipil&Naker
481	SELFI SRI RAHAYU	SMA	II/a	Pengadministrasian Umum	Kecamatan Junrejo Kota Batu	Kecamatan Junrejo Kota Batu
482	DODY DWI PERMANA	SMU	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
483	VIVI OKTAVIA	SMK	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Badan Pengawasan Kota Batu	Badan Pengawasan Kota Batu
484	ITA NURUL KHOTIMAH	SMU	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
485	TISA SANDY SARTIKA	SMU	II/a	Agendaris	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
486	NOVI WAHYUNINGTYAS	D-I AKUNTANSI	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
487	LUSY DWI WAHYUNI	SMU	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
488	EVA ARYANI NINGTYAS	SMU IPS	II/a	Pengagenda	Sekretariat Dprd Kota Batu	Sekretariat Dprd Kota Batu
489	DWI KUSHARIANTI	SMU	II/a	Pengagenda	Sekretariat Kpu Kota Batu	Sekretariat Kpu Kota Batu
490	SUSILOWATI	SMU	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
491	BENY MISTANTO	SMU	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
492	UMI NUR FAIDA	SMK BISNIS	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Kantor Perhubungan Kota Batu	Kantor Perhubungan Kota Batu
493	ARIS WIJAYA	SMK	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
494	FIFIN WAHYU NUR HIDAYAT	STM	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
495	RIKA DIAH AGUSTIN	SMK	II/a	Pengumpul Data Organiss	Kantor Koperasi Dan UKM	Kantor Koperasi Dan UKM
496	JONI FAHAMZAH	SMK	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
497	WINDARTI	SMK	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
498	HENY PUSPITAWATI	SMU	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Bagian Ekbang Setda Kota Batu	Bagian Ekbang Setda Kota Batu
499	ISA UMAMI	SMU	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
500	BAMBANG RETNO ADI	SMK	II/a	Penginventaris Barang & Atk	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
501	RINDA KHOLIFAH LAILY	SMK	II/a	Pengagenda	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dns Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
502	ENDAH TRI NURCAHYANI	MAN	II/a	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu

503	INDAH KURNIASIH	SMU	II/a	Pengadministrasian Umum	Sekretaris KPU Kota Batu	Sekretaris KPU Kota Batu
504	EKO WAHYUDI	SMK	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
505	IRSYA YUSRISTIN	SMU	II/a	Pengagenda	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bag Pemerintahan Setda Kota Batu
506	MASHURI	SMK	II/a	Penginventaris Barang & Atk	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
507	LILIS SULISTYORINI	SMK	II/a	Pengumpul& Pengolah Data Laporan	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
508	RAHARDINI ARIESTA MAHARSANTI	SMU-IPS	II/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kantr Pemberdayaan Masy Kota Batu
509	YUNITIA NUGRAHANI	SMU	II/a	Pengadministr Perjlln Dnas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
510	DINA CRISDIANINGRUM	SMU	II/a	Agendaris	Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Naker	Dns Kependudukan Catatan Sipil&Naker
511	CITRA AYU RAHMANDA	SMU	II/a	Pengagenda	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
512	MOCHAMAD SOLEH, A.Md	D III KOPERASI	II/c	Penganalisa Kebutuhan	Kantor Koperasi Dan UKM Kota Batu	Kantor Koperasi Dan UKM Kota Batu
513	DIRGA NOVIDA RIANTO, A.Md	D III PERHOTELAN	II/c	Penyusun Rencana Bhn Perlengkapan	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
514	TATIT ASRININGSIH, A.Md	D III ADM. NIAGA	II/c	Pemroses Pemberian Penghargnn& Kesejahteraan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu
515	RUDIANTO A.Md.Kom	D-III INFORMATIKA	II/c	Operator Komputer	Dinas Kesehatan Kota Batu	Dinas Kesehatan Kota Batu
516	DESIANA HERDIAN, A.Md	D-III KOMPUTER	II/c	Operator Komputer	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
517	HARRY MEIRIZON, A.Md	D III NIAGA	II/c	Penyedia Data Kebutuhan Perlengkapan	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
518	DIAN PRISTIKAWATI	D-III PARIWISATA	II/c	Pemandu Pariwisata	Dinas Informasi Komunikasi &Perpus Kota Batu	Dinas Informasi Komunikasi&Perpus takaan Kota Batu
519	Drs. NOOR EDDY SOEPRAPTO	S-1 ADM. NEGARA	III/a	Pengumpul Data Organisasi	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu	Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu
520	NGUNAPI, S.E.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyiap Bhn Evaluasi Ketatalaksann	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
521	DIDIK FERIDIJANTO, S.H.	S-1 H. KEPERDATAAN	III/a	Perancg Peratr Perundang-Udangan	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
522	R. MOH. RUSTAM EFFENDI, SE	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penata Lap Keuangan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
523	FARIDAH, S.E	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran	Kantor Kasda Kota Batu	Kantor Kasda Kota Batu
524	RENI SUHARYATI, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Perantara Hub Industrial	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
525	WALUYO SETIADI, S.Sos	S-1 ADM. NEGARA	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksann	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
526	M.NASEH LUKMAN, S.T.	S-1 T. SIPIL	III/a	Perekayasa Sipil	Bappeda	Bappeda
527	ERNAWATI ULFA, S.IP	S-1 I. PEMERINTAHAN	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu	Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
528	ZAMZAM RAHMAWAN L., SE.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
529	SUWOKO, S.P	S-1 B. PERTANIAN	III/a	Pengawas Bibit Tanaman	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Dinas Pertanian Kota Batu
530	WAHYU SIH WINARNI, S.E.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Kantor Koperasi Dan UKM	Kantor Koperasi Dan UKM
531	ENDANG KARTIKAWATI, S.E.	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penyusun Anggaran	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu
532	ARIEF H, S.E.	S1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap Keuangan	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
533	KUSMIATI, S.Pd	S-1 P. Koperasi	III/a	Penyusun Rencn Bhn Evaluasi& Lap	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu

534	SRI WAHYUNI UTAMI, S.Pd.	S-1 P. IPS	III/a	Pengumpul Data Organisasi	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
535	NURRUL HANIEF, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Pengumpul Data Organiss	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
536	BUDI JOKO SUNINDYO, S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap Keuangan	Kantor Kasda Kota Batu	Kantor Kasda Kota Batu
537	PANIADI NUGROHO, S.T	S-1 T. MESIN	III/a	Perekayasa Mesin	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
538	NASRUL HADI, S.Sos.	S-1 I. PEMERINTAHA N	III/a	Penyiap Bhn Eva.Ketatalaksanaan	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
539	JOKO PURWANTORO, S.T	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Petgs Pembina Industri	Kantor Koperasi Dan Ukm	Kantor Koperasi Dan Ukm
540	MOHAMAD FAHRUDI ANDRIAN, S.T	S-1 T. SIPIL	III/a	Perekayasa Bangunan	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
541	SITI SUNDHANA, S.E	S-1 MANAJEMEN	III/a	Pengumpul Dan Pengolah Data Laporan	Kecamatan Batu	Kecamatan Batu
542	MOCH. AGUS FACHRUDDIN, S.T.	S-1 T. MESIN	III/a	Perekaya Mesin	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
543	HERU SETIAWAN, S.E	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyiap Bhn Eval.Ketatalaksanaan	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan Bm Kota Batu
544	NINE RAHAYU, S.E.	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penata Lap. Keuangan	Kantor Koperasi Dan Ukm Kota Batu	Kantor Koperasi Dan Ukm Kota Batu
545	MIRA KENDRIANITA, S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Auditor	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
546	EFENDY, S.E.	S-1 EKONOMI	III/a	Penyiap Bhn Eval.Ketatalaksanaan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
547	ENDI SUHADI, S.Pd	S-1 P. ORKES	III/a	Pengumpul Data Organss	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
548	ANIS MUFIDIYANTI, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Penyusun Dok.Hukum	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
549	DWI SULISTIAWATI,S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap Keuangan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
550	ENDAH PUSPITASARI, S.E	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
551	AGUS SALIMULLAH, S.Pd.	S-1 P. BHS. INDONESIA	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
552	MOHAMMAD RIFKI, SE	S-1 M. KEUANGAN	III/a	Penata Lap Keuangan	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
553	ANDONO JOYO, S.H.	S-1 HUKUM	III/a	Pemberi Konsultasi& Bantuan Hkm	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
554	ILIA WIDIASTUTI SETIYANI, S.E.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran/ Verifikasi	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
555	DEWI ISLAMIATI, S.E.	S-1 MANAJEMEN	III/a	Penyusun Bhn Evaluasi& Lap	Kantor Satpol PP Kota Batu	Kantor Satpol PP Kota Batu
556	NINIK HERAWATI, S.E	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kntr Pemberdayaan Masy Kota Batu
557	ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
558	SANTI YUSITA, S.E	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kntr Pemberdayaan Masy Kota Batu
559	IIN RATNA SURAYA, S.Sos	S-1 ADM NIAGA	III/a	Petugas Pembina Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
560	CHILMAN SUAIDI, S.E	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Laporan Keuangan	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
561	IIN NURBAITI CHANIAGO, SS	S-1 S. INGGRES	III/a	Pemandu Wisata	Dinas Pariwisata Kota Batu	Dinas Pariwisata Kota Batu
562	PUJI ROESMININGSIH, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ev. Rencana Dan Program	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
563	KUSMIATI, SE.	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penyusun Anggaran	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu	Dinas Pemukiman Dan BM Kota Batu

564	SRI RAHAYU, S.Pd	S-1 P. BIOLOGI	III/a	Penyuluh KB	Badan KB Dan Kessos Kota Batu	Badan KB Dan Kessos Kota Batu
565	ERNAWATI, S.Psi	S-1 PSIKOLOGI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batu
566	ROSE IPTRIWULANDHAN I, S.Pi	S-1 PSIKOLOGI	III/a	Penganalisa Kebutuhan	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu	Bagian Kepegawaian Setda Kota Batu
567	HENDRAWAN SASONGKO, SH	S-1 HUKUM	III/a	Penyusun Dok Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Batu	Bagian Hukum Setda Kota Batu
568	AHMAD RUSYDI	S-1 EKONOMI	III/a	Peny. Anggaran / Verifikasi	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
569	SILVI RESTU INDRAYANTI, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Kantor Satpol Pp Kota Batu	Kantor Satpol Pp Kota Batu
570	MOHAMMAD ARIF BUDIMAN, ST	S-1 T. MESIN	III/a	Teknisi Mesin	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
571	YENNI NOOR HAMIDHA, S.E	S-1 ADM. NIAGA	III/a	Penyusun Rncna Bhn Perlengkapan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu	Kntr Pemberdayaan Masy Kota Batu
572	GURUH GALIH GENTAYU, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ev. Rencana Dan Program	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
573	BUDI WIJAYA, S.E	S-1 EKONOMI	III/a	Penata Lap Keuangan	Kantor Koperasi Dan Ukm Kota Batu	Kantor Koperasi Dan Ukm Kota Batu
574	DHANA WARDHANA, S.Pd.	S-1 P. EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
575	RESTU BAHARI, S.Sos	S-1 KOMUNIKASI	III/a	Penghubung Antar Lembaga	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
576	BAYU SIGIT PRASETYO, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Perencana Bidang Ekonm	Bappeda Kota Batu	Bappeda Kota Batu
577	SUPRIYATI, S.S	S-1 B. INGGRES	III/a	Pranata Humas	Bagian Umum Setda Kota Batu	Bagian Umum Setda Kota Batu
578	BENNY TRIANTO, S.Sos	S-1 ADM. NEGARA	III/a	Penyusun Renc Bhn Perlengkapan	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu
579	TEGUH WIDODO, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Rncn Evaluasi Dan Laporan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
580	MUHAMMAD RONNY YUNIARTO	S-1 T. INDUSTRI	III/a	Perantara Hub Industrial	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
581	DWI WULANDARI, SE	S-1 AKUNTANSI	III/a	Peny. Anggaran / Verifikasi	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
582	NUKE OKTAFIYANTI, SH	S-1 HUKUM	III/a	Pemberi Konsultasi& Bantuan Hkm	Bagian Hukum Setda Kota Batu	Bagian Hukum Setda Kota Batu
583	ARIF DWI PRASETYO, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penata Lap Keuangan	Bagian Keuangan Setda Kota Batu	Bagian Keuangan Setda Kota Batu
584	SRI PUJI ASTUTIK, S.Pd	S-1 A. PENDIDIKAN	III/a	Penyusun Bhn Evaluasi Dan Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Batu
585	EDI SETIAWAN, S.IP	S-1 PEMERINTAHAN	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Dinas Pendapatan Kota Batu	Dinas Pendapatan Kota Batu
586	ISTIANI NURHASANAH,S.E.	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Sekretariat DPRD Kota Batu	Sekretariat DPRD Kota Batu
587	ADI KURNIAWAN, SE	S-1 AKUNTANSI	III/a	Penata Lap Keuangan	Kantor Kasda Kota Batu	Kantor Kasda Kota Batu
588	RIRIS SISWO HANDAYANI, SE	S-1 EKONOMI	III/a	Penyusun Bhn Ketatalaksanaan	Kecamatan Junrejo Kota Batu	Kecamatan Junrejo Kota Batu
589	ANTONO		II/a			
590	IRFAN		II/a			
591	ICHE EKALICHA RACHMAT	SMA	II/a	Pengadministr Naskah Dinas	Kecamatan Batu	Kecamatan Batu

Lampiran 4 :

Data Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Tahun 2007 dari Tenaga Honorer adalah sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Usia		Pendidikan	Gol/ Ruang	Jabatan	Unit Kerja
		Th	Bln				
GURU TK							
1.	SULIKATIN, A.Ma.Pd	42	09	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	JUMI'ATI, A.Ma.Pd	42	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	SITI SAADAH	41	09	Paket C	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	LI'ANAH	41	07	Paket C	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	LUKMAN HAKIM	41	03	SMT Grafika	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	KARNATI	41	01	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	SRI ATMININGSIH, A.Ma.Pd	41	03	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Dra. SUCI RAHAYU	40	05	S1/A-IV Indonesia B.	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	SUSIOWATI, A.Ma.Pd	39	07	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	MARIATUL QIBTIYAH, A.Ma.Pd	39	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	HARIATI	38	03	Paket C	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	SUNGGARWATI	39	02	S1/A-IV Indonesia B.	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	MIATI	39	00	SLTA	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	IRMAWATI	40	03	MAN	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15.	RESTI MANGARI, S.PAK	38	01	S1 / A-IV Kristen	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	INAMA, S.Pd	37	11	S1 / A-IV P. Koperasi	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	YAYU MUJI RAHAYU	37	09	SPG TK	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	SULIATI NASRUN, A.Ma.Pd	37	06	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Dra. TRI RAHAYU	37	06	S1 / A-IV Tarbiyah	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.	INDAH AGUSTINA, A.Ma.Pd	37	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	MISNI, S.Pd	37	03	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22.	MUSTAMILAH, A.Ma.Pd	37	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	SRI WARNI, A.Ma.Pd	37	01	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24.	ERY JULAIKAH, A.Ma.Pd	36	11	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25.	CICIK KHOIRIYANTI, A.Ma.Pd	36	09	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26.	NUNIK WULANDARI, A.Ma.Pd	36	08	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.	ZUMARO, S.Ag	36	04	S1 / A-IV Agama Islam	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.	ENI KUSRINI	36	04	SLTA	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.	RUKIYATI, A.Ma.Pd	37	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.	RUMAYAH, A.Ma.Pd	35	06	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan

							Kebudayaan
31	SITI ROFIQOH, A.Ma.Pd	35	04	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	SR. GETRUDIS ESTHER	34	08	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	YOHANA FATER FIANI, A.Ma.Pd	34	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	MAHMUDAH, A.Ma.Pd	34	03	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	NOOR FARICHA, A.Ma.Pd	34	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	YAYUK YULAIKHAH, A.Ma.Pd	33	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	TITIK UMINARTI, A.Ma.Pd	33	00	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	SULIKAH, A.Ma.Pd	32	07	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	TRI ISNAWATI	32	06	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	SITI KOLIFAH, S.Pd.I	32	05	S1 / A - IV Agama Islam	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	DESI WIDOWATI, S.E	32	05	S1 / A-IV Ekonomi	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	SITI MUALIMAH, A.Ma.Pd	32	03	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	ATIK WIDAYANTI, A.Ma.Pd	30	11	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	NINIK NURHAYATI, A.Ma.Pd	29	08	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	TUTIK SUPARMI, A.Ma.Pd	29	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	SITI KAROMAH	29	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	ENDAH KUSUMANINGRUM, A.Ma.Pd	28	11	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	NUR HIDAYATI	28	09	Paket C	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	SITI SUMIATUN, A.Ma	28	08	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	CHOSIAH, A.Ma	28	07	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	LILIK HARIYANTI, A.Ma	28	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	IBADI HARIATI, A.Ma	28	04	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	NURYANI KUSTININGSIH, A.Ma	28	03	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	ETA DAIFITSEN, A.Ma	27	09	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	SITI FARIDA ULFA	27	03	Paket B	I/c	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	ISTIQOMAH, S.Pd	25	10	S1 / A-IV Bahs Inggris	III/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57	SETIYA AROHMAH, A.Ma.Pd	25	02	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	LAILATUL ISTIKOMAH, A.Ma.Pd	25	00	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	DEASY RETNO ANGGARINI	24	10	SMU	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60	CHRISDIAWATI	24	07	SMK	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61	ERMAWATI, A.Ma.Pd	23	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	RANTI DYAH CAHYANING	22	11	SMU	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	FITRI SUSANTI DIANASARI	22	05	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64	RINI RAHAYU, A.Ma.Pd	21	10	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	FAHRIDA NURIA	21	09	MAN	II/a	Guru TK	Dinas Pendidikan dan

66	ELOK YUNIATI	21	07	MAN	II/a	Guru TK	Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	ASIH WIBAWANTI, A.Md.Pd	21	04	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68	RINA IVA YANTI	19	06	SLTP	I/c	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SD/MI							
69	ENDAH NURHAYATI, A.Md.Pd	38	04	D-II PGSD/MI	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
70	NGATIANI	38	02	SPG-SD	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71	NURWIDAYATI, A.Ma.Pd	38	01	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
72	SURIYADI, S.Pd	38	00	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73	Dra. SASE DYAH RETNOWATI	38	00	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
74	Drs. SAMADI	38	00	S1 / A-IV T. Pendidikan	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
75	KAPRAWI	37	10	SMA	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
76	SUYANTO, S.Pd	37	08	S1 /A-IV P. Olahraga	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
77	IIK SUYANTI, A.Md.Pd	37	07	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
78	SRI WAHYUNI, A.Ma.Pd	37	05	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
79	NGATEMI	37	03	SMA	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80	MOKHAMAD HARIYONO, A.Ma.Pd	36	08	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
81	ERLIS KURNIAWATI, S.Pd	35	10	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82	NURUL AENI, S.Pd	35	09	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	RUSMIATI, S.Ag	35	09	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84	MULYATINI, A.Ma.Pd	35	08	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
85	MUIS	35	07	SGO	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
86	YULIANTI, S.Pd	35	06	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
87	NGATMINI, A.Ma.Pd	35	06	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
88	SOESMIARTI, S.Pd	35	06	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
89	T. DARMAJI	35	03	SPG-SD	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90	ULI ASTUTIK, A.Ma.Pd	35	02	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	HERI PURNOMO, A.Md	34	07	D-III/ A-III Bahs Inggris	II/c	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	DEWI LUTFIAH, S.Pd	35	01	S1 A-IV P. B. Indonesia	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
93	UNTORO, A.Ma.Pd	33	10	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94	KHOLIFAH, S.Ag	33	02	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	SRI HANDAYANI	33	01	SGO	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	MARSIANA IKA SUPRIHARSINI, S.Pd	33	00	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	SUPRIYANTO, A.Ma	32	06	D-II PGSD/MI	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	ENDANG SULISTYORINI, S.Pd	32	04	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	KHOIRUL BASORI	31	11	SMA	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

100	SUTIAMIN, A.Ma.Pd	31	09	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101	SEPNITA, S.Ag	30	09	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
102	KARTIKASARI, S.TP.	30	04	S1 T. Pertanian	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103	RINI SETYAWATI, S.Pd	30	00	S1 / A-IV A. Pendidikan	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
104	RAKHMAD SUPRIADI	30	00	Sarjana	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105	MASAMAH, A.Ma.Pd	37	06	D-II-PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
106	RINI AGUSTINA, A.Ma.Pd	29	05	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
107	HENY SUSWANDARI DWI TANTI, S.Pd	29	03	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
108	ANIS SULISTIN, S.E.	29	01	S1 / A-IV IESP	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
109	CHUSNUL CHOTIMAH, S.Pd.	28	11	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
110	WAHYU IKA SETYAWATI, A.Ma.Pd.	28	09	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
111	KANTI MURTI, S.Pd.	28	08	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112	HELMINA MAULUDIYAH, S.Pd.	27	11	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
113	SUGENG PRAMUJI, S.PdI	27	09	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	KUSDIANA ENDAH SARI, A.Ma.Pd.	27	07	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
115	SITI ROICHATUL CHASANAH, S.PdI	27	04	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
116	USWATUN HASANAH, A.Ma.Pd	27	02	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
117	NINIK LUTFI HANDAYANI, S.Pd.	27	01	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
118	ERNA NURDHIANA, S.Pd.	26	10	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
119	MUADID DINIATIN N	26	09	S.1 Bahasa Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
120	RISZA KRISTİYANA	26	04	SMU	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
121	SITI NURDHIYAH, S.Pd	26	03	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
122	FARIDA DWI PRASETYANINGSIH, A.Md.Pd	25	11	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
123	IRMA ANGGRAINI YUNIAR, S.Psi	25	07	S1 Psikologi	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
124	CATUR WULANDARI, S.Pd.	25	03	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
125	YENI RAHMAWATI, A.Md	24	10	D-III Keu & Perbankan	II/c	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
126	SRI ASTUTIK, A.Ma.Pd	24	05	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
127	DEWI NUGRAHENY, S.S.	24	05	S1 Sastra Inggris	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
128	ANIFAH NOOR AIDA, S.Si	24	04	S1 Matematika	III/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
129	LANNY EKA PUTRI	24	03	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
130	NUR SAIFUDDIN, A.Ma.Pd	24	03	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
131	SUDIBYO, A.Ma.Pd	23	10	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
132	ELITA DENNY, A.Ma.Pd	23	09	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
133	YUYUN ANI FATUROHMAH, A.Ma.Pd	23	08	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
134	CAHYO PRANOTO, A.Ma.Pd	23	08	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

135	PUJI ASTUTIK, A.Ma.Pd	23	04	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
136	YUDHI HERDIANTO, A.Ma.Pd	23	03	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
137	ISTICHORO	23	02	MA	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	SULISTYOWATI, A.Ma.Pd	23	01	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	MUNTIANI, A.Ma.Pd	22	11	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140	SUMARNO, A.Ma.Pd	22	10	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	ENI INDRAYANI, A.Ma.Pd	22	10	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
142	PUTRI KURNIASARI, A.Ma.Pd	22	09	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	SULI WAHYUDI	22	03	SMK	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
144	CANDRAHARI PURNOMO, A.Ma.Pd	22	02	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
145	TUTIK INDRAMATI, A.Ma.Pd	22	01	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
146	ZENI KURNIAWATI, A.Ma.Pd	22	00	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
147	YENI DEWI ANGGRAENI, A.Ma.Pd	22	00	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
148	DWI INDAH PERMATA SARI, A.Md.Pd	22	00	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
149	NENCI WIDAWANTI	22	00	Paket C	II/a	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
150	YULIANA, A.Md.Pd	22	00	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
151	KHOTIMAH, A.Md.Pd	22	00	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
152	IKA FITRIA IRMAWATI, A.Ma.Pd	21	07	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
153	DINA FATMAWATI, A.Md.Pd	21	07	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
154	AVIK YULIANTO, A.Md.Pd	21	06	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
155	HETTI RATNA P	21	04	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
156	VINORIA HENY NURHAYATI, A.Md.Pd	21	02	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
157	INTAN PUSPA AYU MAHARANI SAPUTRI, A.Md.Pd	20	11	D-II PGSD	II/b	Guru SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMP/MTS							
158	LATIFAH	39	11	D-II PGSD	II b	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
159	Dra. ENDANG SUSILOWATI	39	02	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
160	Drs. KHOIRUL ANWAR	39	02	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
161	Drs. ALI MAHMUDI	38	08	S1 / A-IV Agama Islam	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
162	ISNAINI, S.Pd	38	07	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
163	KHUSNUL KHOTIMAH, S.P	38	06	S1 / A-IV M. Pertanian	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
164	Dra. SITI CHOTIMAH	37	10	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
165	TITIK WIDAYATININGSASI, S.Pd	37	07	S1 / A-IV P. B. Indonesia	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
166	Dra. IDA MISAROH	38	00	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
167	Drs. SUYONO	37	11	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
168	Dra. TITIK SUPARTI	38	02	S1 / A-IV P. B. Indonesia	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

169	ERNAWATI	36	08	S1 / A-IV P. B. Indonesia	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
170	Dra. ZULAIKHAH	37	03	S1 / A-IV T. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
171	Dra. ZUROH IRFA	37	01	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172	HARLINA, S.Pd	37	02	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
173	Dra. LUKITANINGTYAS	37	02	S1 / A-IV P. B. Indonesia	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
174	EKO SANTOSO	37	00	S.1 Agama	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
175	Dra. SRI RAHAYU	36	10	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
176	MOHAMAD SAMSUDI, S.Pd	36	10	S1 - A-IV P Biologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
177	NUROHMAN, S.Pd	36	08	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
178	MOKHAMAD RUBA'I, S.Pd	36	05	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
179	Dra. ANIK ZULAIKHAH	37	08	S1 / A-IV T. B. Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
180	SRI HASTUTIK, S.Pd	36	00	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
181	SUPRIYATI, S.Pd	35	08	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
182	YAYUK SITI MUAWANAH	35	06	A-IV Kependidikan	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
183	MISTIANI, S.Pd	35	05	S1 - A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
184	M. TRESNANING, S.Pd	35	04	S1 - A-IV P. Fisika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
185	M. SYAMSOEDIN, S.Pd	35	03	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
186	MISTIAH, S.Pd	35	03	S1 - A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
187	SYAHRUL FITROTUL, S.Ag	35	02	S1 A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
188	ERNI DWI S, S.P.	33	09	S1 / A-IV B. Pertanian	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
189	SRI DEWI, S.Pd	33	08	S1 - A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
190	SULIH TRI HARININGSIH, S.Pd	33	05	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
191	DWI LAKSITORINI, S.Pd	33	03	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
192	EKA MUSTIKA, S.Pd	32	07	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
193	NUR YAYUK FARIDAH, S.Ag	30	06	S1 / A-IV Tarbiyah B. Arab	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
194	MOHAMAD TAUFIQ AL FAJAR, S.Pd	29	10	S1 / A-IV P. Sejarah	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
195	TRISE ROSIDA PRIHANTINI, S.Pd	29	10	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
196	MU'AD ROZIQIN, S.Fil.I	28	07	S1 / A-IV Aqidah Filsafat	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197	ANIS SYAIDAH, S.Pd	28	06	S1 / A-IV P. B Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
198	M. MAULUDDIN ZUHRI, S.Pd.I	27	11	S1 / A-IV P. Islam	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
199	HERLINA EVI DWI SETYOWQTI, S.Psi	27	10	S1 Psikologi	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
200	MUJI TEGUH MULYONO	27	00	SMU	II/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
201	NUR CAHYANINGSIH, S.Pd	26	11	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
202	BAITILL' IZZAH, S.HI	26	05	S1 Hukum Islam	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
203	DARMANING DIAH	26	03	S1 / A-IV P. B.	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan

	OKTASARI, S.Pd			Inggris			Kebudayaan
204	NURFINA YUNI RESTUTY	25	07	S.1 Pend. Sejarah	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
205	YULIANAH, S.S	25	11	S1 / A-IV Sastra Inggris	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
206	LAILA K, S.Pd I	24	05	S1 / A-IV P. Islam	III/a	Guru SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMU/MAN							
207	AGUSTIN WULAN CAHYANI, S.Pd	41	05	S1 / A-IV PPKn	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
208	Dra. MESIYATI	39	07	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
209	Dra. WAHYUNI	40	10	S1 / A-IV Biologi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
210	Dra. NGATMINAH	39	10	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
211	Dra. PUJI LESTARI	40	11	S1 / A-IV Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
212	YOSWA L SIONITA, S.PAK.	41	06	S1 / A-IV Agm Kristen	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
213	NINA DWIYANA, S.Pd	39	08	S1 / A-IV Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
214	FADJAR HARI MEGAWATI, S.Pd	42	07	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
215	MARIANI	40	01	S1 / A-IV Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
216	CHRISTIANA R., A.Ma.Pd	37	04	D-II PGTK	II/b	Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
217	JUWARIYAH, S.Pd	38	04	S1 / A-IV P. Fisika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
218	M. FATKHUR ROHMAN	37	06	Sarjana	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
219	JUMIATI, S.Pd	39	11	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
220	TEGUH SUGIHARTO, S.Pd	37	11	S1 / A-IV Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
221	MAFTUHAH AMINI, S.Pd	37	09	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
222	Dra. RITA KHOLIFAH S	37	04	S1 / A-IV P. Kimia	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
223	ANWAR KHOSIIN	35	03	PGAN	II/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
224	SITI AMINAH, S.Pd	37	04	S1 - A-IV B. Inggris	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
225	FENI TIN FAIZAH, S.Pd	36	11	S1 - A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
226	Dra. ATIEQ ROSJIDA	36	09	S1 - A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
227	RATNAWATI MISTRI DIANI, S.Pd	38	08	S1 - A-IV P. PPKn	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
228	TITIK SRIANI, S.Pd	36	01	S1 / A-IV P.B. Inggris	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
229	TRI MULYANI, S.Pd	35	09	S1 / A-IV Geografi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
230	MAHMUD HUDA, S.Ag	33	05	S1 - A-IV P. Agama	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
231	IMAM MAHFUDZI, S.Ag	34	00	S1 - A-IV P. Agama	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
232	DWI PUDJI HASTUTIK, S.Pd	35	06	S1/A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
233	KUSDIYO, S.Pd	36	07	S1/A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
234	M. YUSUF SUPONO	37	08	S1 / A-IV fisika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
235	TITIK SUSWATI, S.Pd	39	09	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
236	ASIH HARI LESTARI, S.Pd	36	01	S1 - A-IV Penjaskes	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
237	LILYANA APRILIYANTI, S.P	32	09	S1 Pertanian	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

238	WIDIYANTI	34	06	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
239	RINI WAHYUNING, S.Pd	32	03	S1 / A-IV Sastra Jepang	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
240	EKO SUJANTO, S.Pd	35	02	S1 / A-IV Penjasokes	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
241	ELLY YULI SRI KRISTANTI, S.Sos	36	04	S1 Adm. Negara	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
242	WIDIYANTI, S.Pd	31	05	S1 / A-IV P. Sejarah	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
243	ISNAINI ROKHMAWATI	32	11	S1 Peternakan	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
244	SITI NUR HIDAYAH, S.Pd			S1 / A-IV P. Sejarah	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
245	MARIA CICILIA TRI PALUPI, S.Pd	31	00	S1 / A-IV P. Geografi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
246	CHAMIM MAWARDI, S.Pd	30	07	S1 / A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
247	MOHAMAD HAIRUDDIN, S.Pd	31	08	S1 / A-IV P. B. Inggris	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
248	ADRIANTO, S.Pd	29	11	S1 / A-IV Sejarah	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
249	SITI JUWARIYAH, S.Psi	28	01	S1 Psikologi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
250	ELISA MARIANA MAGNANI, S.Pd	26	08	S1 / A-IV P. Fisika	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
251	WIWIK HIDAYATI, S.Psi	27	07	S1 / A-IV Psikologi	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
252	ANA NUR INDAH, SE	27	02	S1 Manajemen	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
253	ELMI NAFIK, S.Pd	26	11	S1 / A-IV P. Teknik Mesin	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
254	MARIATUL KIFTIYAH, S.Pd	28	07	S1 / A-IV P. Teknk Bgnan	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
255	IMMATUL FARIDAH, S.Pd.I	25	01	S1 / A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
256	AKHMAD FAUZI RAHMAN	25	06	SMU	II/a	Guru SMU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SMK							
257	Ir. VIVA HARDINI	39	06	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
258	DIENNA YULIA NURHASANA, SP	31	06	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
259	Ir. HINDUN NING HANDAYANI	38	01	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
260	EDY MINTARJO, S.T	37	10	S1 Teknik Mesin	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
261	TUWADI, SP	38	08	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
262	NURLAELA, S.Pd	36	07	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
263	BAMBANG TRIONO, S.P	32	08	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
264	CAHYA BUDHI IRAWAN, S.E.	32	05	S1 Manajemen	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
265	AINUR ROSIDHA, S.Pt	32	04	S1 Peternakan	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
266	ROCHMAWATI NUR'AINI, S.Pd	31	08	S1 / A-IV Koperasi	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
267	EMY KHURIYAH, S.Pd	31	02	S1 / A-IV P. Kimia	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
268	FAJAR CAHYONO, S.T	31	00	S1 T.Sipil	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
269	ADY WICAKSONO, S.Pd	30	10	S1 / A-IV P. Seni Rupa	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
270	SOFIATUR ROSIDA, A.Md	29	11	D-III Tata Boga	II/c	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
271	SYAMSUL HUDA, S.P.	29	08	S1 Sosek Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
272	YUSAK SANTOSO	29	06	SMA	II/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

273	TEGUH KUSTONO, S.P	28	08	S1 T.H. Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
274	RETNO WIJAYANTI, S.Sn	27	10	S1 Desain Kom Visual	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
275	ERNI SUSANTI, S.P.	29	00	S1 Budidaya Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
276	SITI NUR AISSYAH ERMAWATI, S.P	27	07	S1 Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
277	FEBRY TUNGGAL ADIJAYA, S.P.	26	11	S1 Sosek Pertanian	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
278	HARYANTI, S.Pd	26	02	S1/ A-IV P. Matematika	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
279	RACHMAWATI, A.Md	25	06	D-III Tata Boga	II/c	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
280	FITRIA RACHMAWATI	25	06	S1 Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
281	NANING RAHAYU, A.Md	25	00	D-III Tata Busana	II/c	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
282	FATMA T, A.Md	24	11	D-III Tata Busana	II/c	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
283	INDAH DWI WAHYUNI, S.S	24	11	S1 / A-IV B. Inggris	III/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
284	INDAH MAYA SARI, A.Md	24	08	D-III Tata Busana	II/c	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
285	HERVY ARIA PUTRA	21	02	SMK	II/a	Guru SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
GURU SLB							
286	Dra. EMA WIJAYATI, S.Pd	37	02	S1 / A-IV P. Sejarah & Sos	III/a	Guru SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
287	MULIAH, A.Md.Pd	35	11	D-II PGSD	II/b	Guru SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
288	ICHWANTO	32	07	SMU	II/a	Guru SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
289	LAELA ISWANDARI, S.Pd.I	36	04	S1/ A-IV P. Agama Islam	III/a	Guru SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
290	DEDDY SETIAWAN RAHMANTO, A.Md	25	06	D-III Pertanian	II/c	Guru SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PENYULUH PERTANIAN							
291	AGUS SULIYANTO, S.P	35	04	S1 B. Pertanian	III/a	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian
292	TRI AGUS ABDI SHOLEH, S.P	32	05	S1 Agronomi	III/a	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian
PENYULUH PETERNAKAN							
293	HOSLI, S.Pt.	28	09	S1 Produksi Ternak	III/a	Penyuluh Peternakan	Dinas Pertanian
DOKTER UMUM							
294	dr. SUSANA INDAHWATI	29	09	S1 Kedokteran Umum	III/b	Dokter Umum	Dinas Kesehatan
295	dr. ANTONIA JUNITA DWIRAHMASARI	29	07	S1 Kedokteran umum	III/b	Dokter Umum	Dinas Kesehatan
PERAWAT							
296	KRISMA PURWITA	23	11	SMU	II/c	Perawat	Dinas Kesehatan
LABORAN							
297	SUSWANTI ANDAYANI	25	07	SMAK	II/a	Tenaga Laboratorium	Dinas Kesehatan
ADMINISTRASI KESEHATAN							
298	LILIK HANDAYANI	34	11	SMU	II/a	Pengadministrasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
REFRAKSIONIS							
299	IRFAN JUNAEDDY	42	07	D-III Kesehatan Refraksi Optisi	II/c	Refraksionis	Dinas Kesehatan
TENAGA TEKNIS STRATEGIS							
300	SUWARTO	45	10	STM	II/a	Penginventaris Perlengkapan	SLTP Umum
301	SAMIADI	45	7		II/a	Pengadministrasi Inventarisasi Barang	Sekolah Dasar

302	SUSIANI, SS	45	07	S.1 Sastra Sejarah	III/a	Pengadm.Sejarah& Nilai Tradisional	Sekolah Menengah Umum
303	EKO CAHYO SISWANTONO	19	09	SMK	II/a	Pengurs Brg Invntrs&brg Hbs Pakai	Dinas Kebersihan & Pertamanan
304	MOHAMAD SOLEH	41	03	SD	I/a	Juru Taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
305	SLAMET	40	03	SD	I/a	Operator Mesin Rumput	Dinas Kebersihan & Pertamanan
306	NURKOLIS	37	09	SMA	II/a	Penginventaris Sarana Kerja	Dinas Kebersihan & Pertamanan
307	JOKO LELONO	32	11	SPP	II/a	Pengelola Prasarana Taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
308	GATOT WAHYUDI	27	07	SMU	II/a	Pengelola Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Kebersihan & Pertamanan
309	RUDIATI EVA DEWI, S.Pd	27	03	S1 / A-IV B. Indonesia	III/a	Pengadministrasi Dokumen Informasi	Dinas Pertanahan
310	EFI MAY FIANA	26	08	Paket C	II/a	Sekretaris Pimpinan	Asisten Pemerntn Dan Pembangunan
311	AGUNG WIDIASMORO	23	08	SMU	II/a	Penginventaris Sarana Kerja	Dinas Kebersihan & Pertamanan
312	FAUZAN	23	00	SMK	II/a	Pengelola Sarana Taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
313	HADI WAHYONO	22	11	SMU	II/a	Pengelola Kendaraan Dinas	Dinas Kebersihan & Pertamanan
314	NOVELLY GAT MELLISA	21	02	SMU	II/a	Penghimpun Data dan Informasi	Dinas Infokom & Perpus
315	Drs. SUPRIHATIN	36	05	S.1 Ekonomi	III/a	Penyusun Bahan Laporan Keuangan	Dinas Pertanahan
316	ANDIK DJUNIADI	35	07	SMEA	II/a	Pengolah Data Info Reklame dan PJU	Dinas Kebersihan & Pertamanan
317	FAJAR SUKMONO, S.Pd	33	04	S1 / A-IV Tata Niaga	III/a	Pengolah Data Informasi, Publikasi dan Penyuluhan	Dinas Infokom & Perpus
318	AGUS PURWANTO	30	04	SMA	II/a	Pengolah Data Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
319	SRI SUGIARTI, S.Pt	30	03	S1 Peternakan	III/a	Pengadmnr Perijinan Usaha Peternkn	Dinas Pertanian
320	MOCH. SOLEH	29	09	STM	II/a	Pengumpul Data Penyediaan Sarana Pemakaman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
321	WAHYU WIBAWANTO, SH	28	05	S1 Hukum	III/a	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Asisten Pemerintahan Dan Pembangunan
322	RAHMAWATI	27	07	SMA	II/a	Pengumpul Data Sistem Informasi	Dinas Infokom & Perpus
323	DENNY MARTIN	27	05	SMU	II/a	Pengolah Data Pengaduan Publik	Dinas Infokom & Perpus
324	DAFIK SETYAWAN	27	03	SMU	II/a	Pengolah Komunikasi Data	Dinas Infokom & Perpus
325	ADI PRASETIYO	27	01	SMU	II/a	Pengolah Data Penerima Lain2 Daerah	Dinas Pendapatan
326	ANDIK BUKHORI, SE	27	01	S1 Ekonomi	III/a	Penyriap Bahan Penyusun Anggaran	Dinas Infokom & Perpus
327	INDARTO ASKANINGRUM, SE	26	00	S1 Ekonomi	III/a	Penyriap Bahan Penyusun Anggaran	Dinas Pertanahan
328	WILIS ANDRIYANI, SE	25	11	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Evaluasi Bahan Laporan	Dinas Pertanahan
329	CHOIRUZ ZAMAN, A.Md	25	00	D - III	II/c	Penyriap Bahan Analis dan Penyaji Informasi	Dinas Infokom & Perpus
330	MAS'UT EFENDY	20	11	SLTP	I/c	Pengelola Prasarana Taman	Dinas Kebersihan & Pertamanan
331	ROSIDA KURNIAWATI, SE	33	11	S1 Ekonomi	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Asisten Pemerintahan Dan Pembangunan
332	MUHAMMAD SYAMSUL ARIF, S.Pd	29	11	S1 / A-IV Teknik Mesin	III/a	Pengevaluasi Perencanaan Program Pelayanan Informasi Rencana Kota	Dinas Infokom & Perpus
333	MUTTAQIN DZAWIL CHAQ	26	02	SMU	II/a	Pemelihara Barang	Asisten Administrasi
334	NAHRUL LAIL, S.Psi	36	09	S1 Psikologi	III/a	Penyriap Bahan Pembinaan dan Pemeliharaan Sikap	Dinas Pertanahan

						Mental Pegawai	
335	RULY ISTANTO, S.Pt	27	10	S1 Pternakan	III/a	Pengawas Standar Bibit Ternak	Dinas Pertanian
336	YESISKA MEITA MARDANIA, SE	27	08	S1 Ekonomi	III/a	Pengadministrasi Verifikasi Angg.Rutin	Asisten Pem. Dan Pembangunan
337	DIAN WAHYU PURWIASTUTI, SE	26	01	S1 Ekonomi	III/a	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial	Badan KB Dan KS
338	CHOIRUL SALEH	24	03	SMU	II/a	Pengadministrasi Umum	Asisten Administrasi
339	ANGGARA BINA GRHASTA	22	08	SMK Pariwisata	II/a	Pengumpul Data Hasil Pengukuran	Dinas Pertanian
340	MEGI SUGIYANTO	20	08	SMK	II/a	Pengumpul Data Hasil Pengukuran	Asisten Administrasi
341	WAHYU HARYANTO	37	04	SMA	II/a	Pengumpul Data Pemb Prasarana Lingkungan	Dinas Kehutanan &Lingkungan Hidup
342	YUDHA WIRAWAN, S.E	33	06	S1 IESP	III/a	Penyusun Diklat Pemberdayaan Masy	Badan KB dan Kessos
343	MUHAMMAD RIDWAN, S.T	33	04	S1 Teknik Geodesi	III/a	Pengolah Data Pemakaian Perumahan dan Tanah	Dinas Pertanian
344	TAUFIQ, S.T	28	09	S1 Teknik Mesin	III/a	Teknisi Mesin	Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
345	DIAN SARWORINI, S.Sos	26	01	S1 Ilmu Komunikasi	III/a	Penyusun Konsep Pengemb Sistem Infor	Dinas Informasi Komunik&Perpus
346	IWAN CATUR SUJATMIKO	21	10	SMU	II/a	Petugas Pembedayaan Kel Sos Kemasyarakatan	Badan KB dan Kessos
347	AKHMAD	37	03	SMP	I/c	Pengelola Sarana Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
348	PATEMAN	36	05	Paket A	I/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
349	ANDI VISTA, S.E	36	00	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
350	SHOLIHIN	33	09	MA	II/a	Penelihara Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
351	HARTONO	33	08	SMA	II/a	Pemelihara Perlengkapan Dinas	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
352	KARMAN	31	11	SD	I/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
353	INDAH WAHYONO	30	07	SPP	II/a	Pengelola Prasarana Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
354	ANANG SYAIFUDIN	30	05	SMP	I/c	Pengelola Prasarana Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
355	IWAN JAIRUDIN	28	09	SMEA	II/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
356	JOKO WINOTO	28	02	SMU	II/a	Pemelihara Rumah Tangga	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
357	ZULKARNAIN, S.T	27	10	S1 T. Elektro	III/a	Teknisi Elektro	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
358	ACHMAD FADIRATNO	27	05	SMP	I/c	Pengelola Sarana Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
359	BUDI SUNANTO	26	10	MA	II/a	Pengolah Data Kebersihan Pasar	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
360	ENI HARNANI, S.E.	26	08	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Badan KB dan Kessos
361	FITRI NUR FARIDA	27	03	SMU	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
362	WINARDI	26	00	SMK	II/a	Pengolah Data Kendaraan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
363	FIRLY APRILIA BURHAN, S.Sos	25	09	S1 Ilmu Komunikasi	III/a	Penata Pelayanan Data dan Informasi	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
364	ISAROTUL MARIA ULFA	24	06	SMK	II/a	Pengumpul Data Diklat	Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
365	DIDIK SUWARNO	24	04	SMK	II/a	Pengumpul Data Reklame dan PJU	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
366	SAMPURNO	23	08	SLTP	I/c	Pengelola Prasarana Taman	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
367	SODIQ SUSANTO	20	09	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
368	RUDIYANTO	20	07	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan

							Pertamanan
369	JUNAEDI	20	05	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
370	MOHAMMAD SHOLEH	20	02	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
371	ARIF MARSUDI	18	10	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
372	KUSBIANTO	36	07	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
373	MUNIRI	35	09	SMEA	II/a	Petugas Layanan Kebersihan Pasar	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
374	SITI JAMILAH, S.Sos	34	06	S1 Admin. Negara	III/a	Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan	Badan KB dan Kessos
375	RIADI	34	01	SMA	II/a	Petugas Layanan Kebersihan Pasar	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
376	KASIADI	34	01	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
377	SUPARDI	33	09	SD	I/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
378	FEPY HERDIAN PUTRANTO	33	08	SMA	II/a	Penarik Retribusi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
379	FEPY HERDIAN P			SMA	II/a	Petugas PJU	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
380	SULIS TRIJANTO	33	06	SMA	II/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
381	DIDIT PUNGKAS WITJAKSONO	30	11	SMA	II/a	Petugas PJU	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
382	DINI LESTARI	27	03	D-1 Informatika	II/a	Operator Komputer	Bagian Ekonomi Pembangunan SekDa
383	AGUS SETIAWAN	26	09	SMK	II/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
384	DARWANTO	26	04	SMU	II/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
385	IBNI ALFAN	25	11	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
386	ANDIK SUSANTO	25	11	SMP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
387	WIDYAWATI	25	10	SMU	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
388	ABDUL FAQIH	25	08	SMK	II/a	Petugas Pemungut Retribusi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
389	MUHAMAD KARIS	25	05	SMU	II/a	Petugas Pemelihara Sarana Kerja	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
390	IKHWAN NURDIN	25	05	SMK	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan Dinas	Dinas Kesehatan
391	NOVI HARIYANTO	25	02	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
392	EDY HARIMINTO	24	11	MTs	I/c	Penjaga Kantor	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
393	KUSWANTO	24	07	SMK	II/a	Pengadministrasi Peralatan Kantor	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
394	B. HENKY IRAWAN	23	10	SMU	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan Dinas	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
395	ZAINUL ABIDIN	23	01	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
396	INDRA SETIYAWAN	22	11	SMK	II/a	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
397	HUSNI	22	04	MI	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
398	SUGENG MULIONO	21	06	SMK - Pariwisata	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan Dinas	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
399	MUSA	21	04	SMK - Otomotif	II/a	Pemelihara Kendaraan Dinas	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
400	CICI RIA ASMIA DESTRIANTO	21	01	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
401	MOCH. RIDUWAN	21	00	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
402	AGUS RUDIANTO	20	05	SLTP	I/c	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
403	NANANG PUJIONO	26	07	SD	I/a	Petugas Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

404	GATOT SUSANTO, S.T	37	04	S1 Teknik Mesin	III/a	Teknisi Mesin	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
405	BAMBANG HARNOWO, S.T	35	02	S1 Teknik Sipil	III/a	Teknisi Bangunan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
406	NUR FARIDA	34	02	SMEA	II/a	Ptgs Layanan Promosi dan Info Wisata	Dinas Pariwisata
407	SITI SUBAIDAH, S.E.	33	11	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408	BENNY SEKTI ANGGARWATI, S.E	30	08	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Bagian Ekonomi Pembangunan SekDa
409	RAKHMAD HADI M, S.H	29	00	S1 Hukum	III/a	Penelaah Bahan Hub Antar Lembaga	Bagian Ekonomi Pembangunan SekDa
410	MOCHAMAD ARIFIN	28	08	SLTP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pertanian
411	ABDUL ROKIM	28	05	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pertanian
412	RETNO WULAN PRIHATINI, S.T.	27	05	S1 Teknik Kimia	III/a	Penguji Mutu	Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
413	FARI ZULKARNAEN	27	02	SMU	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Pendapatan Daerah
414	NENI TRIWIYANTI	27	03	SMK	II/a	Petgs Laynn Promosi dan Informasi Wisata	Dinas Pariwisata
415	SRI PURNOMO PRABOWO, SP.	26	11	S1 T.H. Pertanian	III/a	Penguji Hasil Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian
416	EMIL SALIM	26	06	SMU	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Pariwisata
417	EDI SUHARIONO	26	06	SLTP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pertanian
418	ASIH WINARTI	26	03	SMEA	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
419	WAHYU FIRMAL FIDURIS	18	09	SLTP	I/c	Pramu Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah
420	AGUS SISWANDI	42	05	SMA	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan Dinas	Dinas Pemukiman dan Bina Marga
421	PUJI PURNAWAN	36	03	SMA	II/a	Pengadministrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dinas Pemukiman dan Bina Marga
422	SAMSUL RIADI, S.E.	33	11	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Anggaran Rutin	Dinas Pemukiman dan Bina Marga
423	EIVA DIMALA, S.E.	26	10	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Anggaran Rutin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
424	CHOIRUL ANWAR	20	10	MA	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Pendapatan Daerah
425	HARMOKO	20	00	SMK	II/a	Pengolah Data Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
426	BAGUS SURJANTONO, S.T	33	10	S1 T. Arsitektur	III/a	Penyusun Gambar dan Rancang Bangunan	Dinas Pemukiman dan Bina Marga
427	RUNIK SULISTYOWATI	29	03	SMA	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Badan KB dan Kessos
428	LINTANG SENJA P.	20	00	SLTA Umum	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Pariwisata
429	GUNAWAN	20	00	SMK	II/a	Pengumpulan Data Permodalan dan Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
430	AJI SAKTI PRAMONO, S.E	37	00	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Anggaran Rutin	Dinas Pariwisata
431	Rr. RATNA DEWATI, S.T., M.Si	33	03	S1 T. Planologi	III/a	Perancang Teknis Bangunan Pelayanan Umum dan Bangunan Umum Lainnya	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
432	ZAENAL ARIFIN	30	10	SMK	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Pendapatan Daerah
433	DENY EKO PRASETYO	30	09	SMA	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
434	DENI EKAWATI, S.E	25	07	S1 Manajemen	III/a	Penyusun Anggaran Rutin	Bagian Ekonomi Pembangunan SekDa
435	YOHANES WAHYU DEWODARU, S.S	25	06	S1 Sastra Inggris	III/a	Penata Pelayanan Data dan Informasi	Dinas Pariwisata
436	IRFAN YULIANTO	23	06	SMU	II/a	Pengumpul Data Sistem Informasi	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
437	ANDI JULI ANGGORO	23	06	SMK	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
438	PURWO ADI SULISTYO	22	08	SMK	II/a	Petgs Layanan Informs	Badan KB dan Kessos

						dan Penyuluhan	
439	LILIK ERNAWATI	20	07	SMU	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
440	ROMMY DIANIS	21	00	SPP Peternakan	II/a	Petugas Layanan Pengaduan Publik	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
441	JOKO SULISTIONO	21	00	SMA	II/a	Pengadministrasian Umum	Dinas Pendapatan Daerah
442	AGUS EKO PRASETYO	19	05	SMK	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
443	HERY PURWANTO, S.Sos	37	05	S1 Adminis. Negara	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
444	NGATEMUN ADI WASONO	37	04	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
445	WIWIT PANDEWANTI, S.E	35	06	S1 M. Keuangan	III/a	Penata Administrasi Laporan Keuangan	Bagian Ekonomi Pembangunan SekDa
TENAGA ADMINISTRASI							
446	STIFANUS OKTANANDA	35	03	SMA	II/a	Pengadministrasi Naskah Dinas	Sekretariat DPRD
447	BAMBANG PRIAMBODO, ST.	33	08	S1 Teknik Industri	III/a	Petugas Pembina Industri	Bagian Umum Sekretariat Daerah
448	L. BAYOE AJIMPOE, S.E	33	08	S1 E. Manj.Keuangn	III/a	Penata Laporan Keuangan	Dinas Pendapatan Daerah
449	SRI WAHYUNI, S.Pd	32	02	S1 / A-IV P. T. Mesin	III/a	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
450	IWAN SETIAWAN, S.T	30	10	S1 Teknik Kimia	III/a	Pengkaji Pengolah Data Status Barang	Bagian Umum Sekretariat Daerah
451	SENTOT SUGIARTO	29	02	SMK	II/a	Teknisi Mesin	Dinas Sumberdaya Air dan Energi
452	MUFLIKHAH	29	01	D-I Komputer	II/a	Operator Komputer	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
453	FARIANTO MASRUL, S.Sos	29	00	S1 Administ Niaga	III/a	Penyusun Anggaran Pembangunan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
454	DENNI LILIS MARIYANI, S.E.	28	01	S1 Manaj Keuangan	III/a	Pemegang Buku Bendahara	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
455	LUKMAN ZAZULI, S.E.	27	05	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Bahan Laporan Keuangan	Sekretariat DPRD
456	YULI RIWAYATI	27	06	D-I Sekretaris	II/a	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
457	PRIYONO K BUDI, S.T.	27	03	S1 T. Sipil	III/a	Konselor Penasehat Jasa Konstruksi	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
458	DANIEL HERMANTO	27	01	SMU	II/a	Penyelenggara Dokumentasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah
459	SRI WIDAYATI	26	08	SMK	II/a	Pengumpul Bahan Evaluasi	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
460	SUHARTOYO	26	01	SMU	II/a	Pengumpul Data srn&prsrna Pengairan	Dinas Sumberdaya Air dan Energi
461	ROMI HARDIANTO	25	11	SMU	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP
462	JOKO SULISTIYO	23	04	SMU	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP
463	ARIEF SETIADHY	22	09	SMU	II/a	Pengadministrasi Barang Inventaris	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
464	OYANG TARAGA	22	01	SMU	II/a	Pengolah Data Pengaduan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
465	HOSAIMAH	21	09	SMK	II/a	Petgs Layanan Informasi Data Kependudukan	Dns Kependudukan Catatan Sipil&Tenaga Kerja
466	INDRA PURNAMA	21	07	SMU	II/a	Pengolah Data Pengaduan Publik	Kantor Satpol PP
467	SIVA ANGGRAENI	21	00	SMU	II/a	Pengadministrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
468	TRIFASA YUNIARTI	20	07	SMU	II/a	Petugas Layanan Akte Kelahiran	Dinas Kependudukan Ctn Sipil&Tng Kerja
469	SUDARSONO	35	02	Paket B	I/c	Pramu Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah
470	ARDIYAN PUTRA H, A.Md	31	09	D-III Akuntansi	II/c	Pengumpul Data Akuntansi Pendapatan	Dinas Pendapatan Daerah
471	SILLY NOVITA, S.E.	29	11	S1 Akuntansi	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Kantor Kas Daerah
472	TINA PRAHASTUTI, S.H.	29	09	S1 Hukum	III/a	Penelaah Bahan Hub Antar Lembaga	Bagian Umum Sekretariat Daerah

473	DORRY HASTANTO	28	05	SMU	II/a	Pengadministrasi Perengkapan Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah
474	HERNIATI	28	03	Sarjana	III/a	Penyusun Anggaran / Verifikasi	Asisten Pemerintahan Dan Pembangunan
475	RATRI CIPTANING SRI RAHAYU	27	08	SMA	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah
476	AGUNG HERAWANTO	26	10	SPPN	II/a	Pengadmn Kemitraan dan Kemasyarakatan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
477	JUMADI	26	02	MAN	II/a	Pengadministrasi Perengkapan Dinas	Sekretariat DPRD
478	HIJRAH AKHIRUDDIN	26	01	MA	II/a	Pengadmn Pembinaan Perangkat Kelurahan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
479	DINA MAHANANI PRIHATININGTYAS	26	00	SMU	II/a	Penata Laksana Administrasi Keuangan	Dinas Pendapatan Daerah
480	NILASARI FEBRINA	24	11	SMU	II/a	Pengadministrasi Verifikasi Pendapatan & Belanja Rutin	Dinas Pendapatan Daerah
481	USMAN HINDRIANTO	24	09	MA	II/a	Pengadministrasi Umum Produk Hukum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
482	ULFA DIANA	23	05	SMK	II/a	Petugas Administrasi dan Keuangan	Dinas Sumberdaya Air dan Energi
483	DEDI KUNCAHYO	21	05	SMK	II/a	Pengadministrasi Perengkapan Kantor	Kantor Perhubungan
484	TONY HERMANSYAH, S.E.	35	10	S1 Akuntansi	III/a	Penata Laksana Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan Kota Batu
485	TRISILOWATI	35	10	D-III Akuntansi	II/c	Pengumpul Data Akuntansi Pendapatan	Badan Pengawasan
486	SLAMET NUR HASAN, S.P	35	02	S1 B. Pertanian	III/a	Penyiap Kerja Pertanian&Pembgunan	Dinas Kesehatan
487	SUJIYANTO, S.T.	35	00	S1 Teknik Elektro	III/a	Teknisi Elektro	Dinas Kesehatan
488	LULUK SETYAWATI, S.T.	33	04	S1 Teknik Elektro	III/a	Teknisi Elektro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
489	NURROHMAN BUDIARDI	31	11	S.1 Admin Negara	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Asisten Pemerintahan Dan Pembangunan
490	YOHANA MARIA	29	08	SMPS	II/a	Pengadm Verifikasi pjk&Retrbsi Daerah	Kantor Perhubungan
491	VITA BACHTIAR	29	04	SMU	II/a	Pengadministrasi Perengkapan Dinas	Kantor Perhubungan
492	ANANG PRASETYO W	28	11	Stm Mesin	II/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Asisten Pemerintahan Dan Pembangunan
493	WIDJI TRIWAHYUNI, S.E.	28	08	S1 Manajemen	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Bagian Umum Sekretariat Daerah
494	DODIT GAGARIN YUDITARA, S.E.	26	08	S1 Manj Keuangan	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Kantor Satpol PP
495	MUHAMMAD FATIH SA'DI, S.Sos	26	06	S1 Adm. Negara	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Kecamatan Batu
496	SUPARNO	26	00	SMU	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah
497	MULYO WIBOWO	24	08	SMU	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Kecamatan Bumiaji
498	FAJAR UTOMO, S.E.	24	00	S1 Manajemen	III/a	Penyiap Bhn Evaluasi Ketatalaksanaan	Badan Perencanaan Pembgnn Daerah
499	SETIONO	23	00	SD	I/a	Pramu Kantor	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
500	ANITA LIEFA ANGGRIYANI	22	10	MA	II/a	Pengadmn.Verifikasi Pajak/Retribusi Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
501	KUSTINA IRAWAN	21	05	SMU	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP
502	TITIK MUJIATI	20	09	SMU	II/a	Satpol PP	Kantor Satpol PP
503	AHMAD MUSTAIN	38	05	MA	II/a	Pengadministrasi Perengkapan Dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah
504	BAMBANG SUBEKTI, S.S.	36	10	S1 Sejarah	III/a	Teknisi Museum dan Benda Bersejarah	Kelurahan Sisir
505	RISKI ARIFIYANTI, S.Pd	26	06	S1 / A-IV P. Biologi	III/a	Pengadministrasi Data Pemeliharaan Bangunan dan Ling	Dinas Pertanahan
506	IGA Dewi Utami			SMA	II/a	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	Bagian Umum Sekretariat Daerah
507	LINDA SETYAWATI	26	02	SMU	II/a	Pengadministrasi Umum Kepegawaian	Kelurahan Sisir

508	RINA MARDYANI, S.Sos	25	11	S1 Adm. Negara	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
509	VINY SAFITRI, S.E.	25	05	S1 Manajemen	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Kantor Kas Daerah
510	MUHAMMAD ARIS MUZAINI	22	05	SMU	II/a	Pengadministrasi Umum Kepegawaian	Kelurahan Songgokerto
511	Dra. DWI NARNI	37	06	S1 Psikologi Pend. & Bimbingan	III/a	Penyiap Bahan Pembinaan dan Pemeliharaan Sikap Mental Pegawai	Kecamatan Batu
512	MUJAYIN	33	08	SMP	I/c	Pramu Kantor	Dinas Pertanian
513	UUT INDRASTUTI, S.E.	30	07	S1 Manajemen	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Kantor Kecamatan Batu
514	YUDI STIRIYANTO	30	07	SMU	II/a	Pengadministrasi Perlengkapan	Kecamatan Junrejo
515	TUT'ANI	30	00	SMEA	II/a	Pengadministrasi Umum Kepegawaian	Kecamatan Junrejo
516	Ary Mardiana	37	02	S1	III/a	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
517	ANDI SETIAWAN	27	00	SMK	II/a	Pengadministrasi Umum Kepegawaian	Kecamatan Junrejo
518	FIDA PUSFITA	26	09	SMU	II/a	Pengadm Perawatan Sarana dan Prasarana	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
519	ETI YULIANI, S.E.	26	07	S1 Manajemen	III/a	Pengonsep Rencana Anggaran Rutin	Dinas Informasi Komun&Perpustakaan
520	DINA SUSANTI, S.H.	25	03	S1 Hukum	III/a	Petugas Pemberi Bantuan Hukum	Kelurahan Ngaglik

